



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

• • •

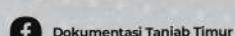
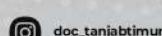
LKJIP

TAHUN 2021

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat
Telp. (0740) 7370006





H. ROMI HARIYANTO, SE
Bupati Tanjung Jabung Timur



H. ROBBY NAHLIYANSYAH, SH
Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur



Saprili, S.I.P
Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 yang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 merupakan media penyampaian informasi kinerja pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sebagai wujud pelaksanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Secara eksternal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam rangka menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan secara internal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu alat kendali untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kiranya dokumen Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semoga Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Muara Sabak, Maret 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. ROMI HARIYANTO, SE.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. KELEMBAGAAN	38
1.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	48
1.4. ISSU-ISSU STARTEGIS.....	60
1.5. ISSU-ISSU STRATEGIS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	77
1.6. MAKSUD DAN TUJUAN.....	78
1.7. LANDASAN PENYUSUNAN.....	79
1.8. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA TAHUN 2021.....	81
II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	83
2.1. VISI DAN MISI	86
2.2. TUJUAN DAN SASARAN	88
2.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	90
2.4. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	128
2.5. PERJANJIAN KINERJA	135
III. AKUNTABILITAS KINERJA	139
3.1. INDIKATOR KINERJA	140
3.2. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA	140
3.3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN	141
3.4. KINERJA KEUANGAN	162
IV. PENUTUP	168
4.1. SIMPULAN.....	168
4.2. SARAN.....	169
V. LAMPIRAN	
LAMPIRAN I. INDIKATOR KINERJA UTAMA	
LAMPIRAN II. PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN	
LAMPIRAN III. RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN	
LAMPIRAN IV. PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN KABUPATEN	
LAMPIRAN V. PERJANJIAN KINERJA KEPALA OPD	



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 merupakan LKjIP memasuki tahun kelima atau terakhir dalam rentang waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Periode pembangunan jangka menengah daerah selanjutnya Tahun 2021-2026 dimulai sejak dilantiknya kembali Bupati Tanjung Jabung Timur H. Romi Hariyanto, SE dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur H. Robby Nahliansyah, SH pada tanggal 26 April 2021. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (RPJMD) Tahun 2021-2026 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

LKjIP Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 melaporkan capaian kinerja (*Performance Results*) selama tahun 2021 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 yang mengacu kepada RPJMD Tahun RPJMD Tahun 2021-2026 serta APBD Tahun 2021 berdasarkan arahan dari Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten / Kota dan Provinsi Kementerian



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Sesuai dengan RPKD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 menetapkan 195 program dan 552 kegiatan serta 1362 sub kegiatan. Rata-rata Capaian Kinerja dari 4 misi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026, Tahun 2021 masuk kedalam kategori sangat berhasil yakni 709,5% lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	MISI KABUPATEN	RATA-RATA CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)
		2021
1	MISI 1: MEWUJUDAKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERTUMPU PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.274
2	MISI 2 : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING	94
3	MISI 3: MENINGKATAN INVESTASI DAERAH YANG KOMPETITIF DAN LESTARI	363
4	MISI 4: MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI GUNA PENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM TATANAN KEHIDUPAN YANG NYAMAN DAN HARMONIS	107
RATA-RATA		709,5

Perkembangan kinerja makro pembangunan tercermin pada indikator ekonomi. Salah satu hal yang menonjol pada pencapaian



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

indikator ekonomi adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari peningkatan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB). Selain itu, bila dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor dominan. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui kebijakan memantapkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2021 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan RKPD di masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada indikator kinerja program yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan, serta meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketataan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan

3. Lebih mendorong pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan.
4. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama dengan *stakeholders*, sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat. Selain itu, pengawasan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.
5. Lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Selain itu, agar perencanaan pembangunan daerah yang disusun dapat



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dievaluasi dan diperbandingkan kinerjanya baik di tingkat nasional maupun regional, maka perencanaan pembangunan daerah akan lebih didasarkan kepada informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasil-hasil potensi daerah yang ada dapat lebih dicermati. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan daerah yang tersedia di beberapa instansi khususnya informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan lebih diberdayagunakan.



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas kondisi umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

1.1 LATAR BELAKANG

Tuntutan terselenggaranya “good governance” pada Pemerintah Daerah di era otonomi ini semakin dirasa. Dasar penyelenggaraan good governance sendiri sebenarnya sudah ada sebelum adanya keputusan pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 seperti Tap MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasca diberlakukannya Otonomi Daerah, penyelenggaraan good governance dipertegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sangat diperlukan dalam percepatan terselenggaranya “good governance”. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Disamping itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, profesionalisme serta akuntabilitas. Sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah kabupaten yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi manejerial secara menyeluruh.

Esensi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, adalah penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur rencana strategis (Renstra) yang didasarkan pada indikator, antara lain :

1. Masukan (Input), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan meliputi SDM, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2. Keluaran (Output), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik), sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
3. Hasil (Outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini telah disesuaikan pula dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni:

1. Fungsi alokasi : meliputi potensi daerah, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa, pelayanan masyarakat;
2. Fungsi distribusi : meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan;



3. Fungsi stabilisasi : meliputi antara lain membantu bidang pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter.

Dengan demikian pemberdayaan potensi daerah merupakan prioritas utama untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa potensi daerah tersebut antara lain :

1.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdiri sejak tahun 1999 dengan ibukota Muara Sabak berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan luas wilayah 5.445,0 Km².

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33 persen (225.047,6 Ha) merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Tahura, serta Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 Ha, sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67 persen). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031, luas Wilayah Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurang lebih 8.507,70 Km² yang terdiri dari daratan seluas 5.085,705 Km² dan lautan atau perairan seluas 3.421,995 Km². Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5 persen dari panjang pantai Provinsi Jambi.

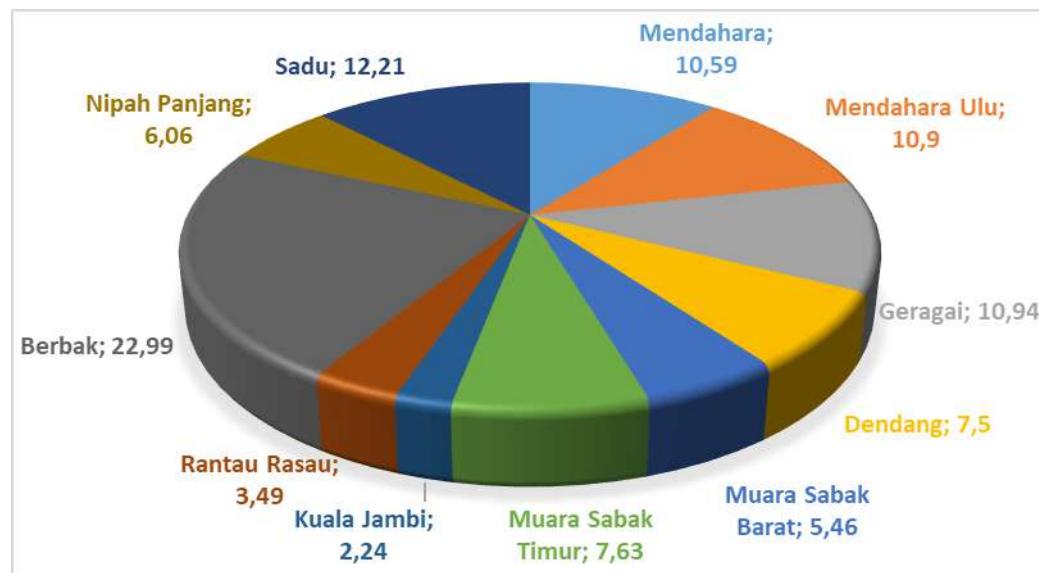
Apabila ditinjau dari sudut Kecamatan, wilayah terluas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Kecamatan Berbak yaitu meliputi 22,99% dari luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kuala Jambi yaitu sebesar 2,24%.

Gambar I.1.

Persentase Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurut Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021

Tabel I.1.

Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Jumlah	Jumlah	Luas Kecamatan	
		Kelurahan	Desa	Km ²	(%)
1.	Mendahara	1	8	538,578	10,59
2.	Mendahara Ulu	1	6	554,226	10,90
3.	Geragai	1	8	556,303	10.94
4.	Dendang	1	6	381,516	7,50
5.	Muara Sabak Barat	7	0	277,469	5,46
6.	Muara Sabak Timur	2	10	388,059	7,63
7.	Kuala Jambi	2	4	113,952	2,24
8.	Rantau Rasau	1	10	177,552	3,49
9.	Berbak	1	5	1.169,17	22,99
10.	Nipah Panjang	2	8	307,941	6,06
11.	Sadu	1	8	620,939	12,21
JUMLAH		20	73	5.085,705	100,00

Sumber : Perda No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur 2011-2031

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 8 - 9 desa/kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang memiliki



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

desa/kelurahan terbanyak yaitu 10 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Kuala Jambi dan Berbak merupakan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa/kelurahan yaitu masing-masing 4 desa 2 kelurahan dan 5 desa 1 kelurahan. Sebaran desa/kelurahan bisa sangat mempengaruhi berkaitan tingkat sebaran pelayanan administrasi pada masyarakat. Secara ideal, jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat harus sedekat mungkin berada di sekitar masyarakat. Namun tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan tingkat sebaran dan tingkat kepadatan masyarakat pada suatu wilayah.

1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara $0^{\circ}53'$ Lintang Selatan sampai $1^{\circ}41'$ Lintang Utara dan antara $103^{\circ}23'$ - $104^{\circ}31'$ Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, disebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

1.1.3 Topografi

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian secara topografi, seluruh kawasan mempunyai kelerengan antara 0 - 3 % (datar). Kondisi ini mempunyai drainase sangat terhambat sampai terhambat sehingga



menjadi faktor kendala bagi pengembangan budidaya pertanian. Kawasan ini dapat dikembangkan sebagai kawasan pertanian dengan syarat input drainase, yang berfungsi juga sebagai saluran irigasi karena adanya pengaruh arus pasang. Berdasarkan hasil studi serta pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya, semua elevasi di daerah rawa-rawa sepanjang Sungai Batanghari dinyatakan dalam acuan ketinggian yang sama, yaitu dalam meter di atas Project Reference Level (M + PRL). Acuan ketinggian di kawasan perencanaan diambil dari ketinggian BM (*Bench Mark*) BK 63.

1.1.4 Geologi

Berdasarkan pada jenis batuan dan kesarangannya, maka akuifer di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikelompokkan menjadi dua sistem, yaitu:

1. Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir.

Sistem akuifer ini terdapat pada sedimen lepas, yaitu endapan alluvial dan rawa yang disusun oleh material lepas berukuran lempung sampai kerakal. Permeabilitas pada umumnya bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Material halus pada umumnya mempunyai kelulusan 10 - 5 s/d 10 - 2 m/h dan material kasar antara 10 - 1 s/d 10 - 2 m/h. Sebaran akuifer ini menempati daerah yang luas dengan ketebalan bervariasi mulai 5 s/d 40 m. Dari kondisi tersebut akuifer ini termasuk kedalam akuifer produktif sedang.



2. Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir dan rekahan.

Sistem akuifer ini terjadi dari berbagai jenis batuan yang bersifat padu dan kurang padu, menempati sebagian kecil daerah penyelidikan. Batuan yang termasuk dalam sistem akuifer ini dapat dikelompokkan menjadi 2 akuifer sebagai berikut :

- Satuan batuan vulkanik muda, terdiri atas breksi gunung api, lava, dan tufa bersusun andesit-basalt. Satuan ini berbentuk morfologi perbukitan bergelombang lemah dengan penyebaran terbatas meliputi daerah Geragai dan sekitarnya.
- Formasi Muara Enim dan Formasi Air Benakat, terdiri atas batupasir, batulempung, serpih, batulanau dan napal. Dijumpai setempat-setempat dengan luas singkapan relatif sempit.

1.1.5 Hidrologi

Bentuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, Berbak, Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu) merupakan dataran landai. Wilayah ini merupakan cekungan yang membentuk rawa belakang yang jenuh air sehingga air tidak dapat menembus tanah atau mengalir sebagai *run off*, sehingga air terjebak berupa rawa. Air permukaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi masalah terutama pada musim penghujan yang menggenangi areal permukiman dan lahan pertanian. Berdasarkan bentuk wilayah tersebut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pola aliran permukaan air



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

menjadikan daerah yang tergenang periodik dan selalu tergenang. Berdasarkan daerah tangkapan hujan atau Daerah Aliran Sungai (DAS), Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi atas 5 DAS, yaitu DAS Mendahara, DAS Lagan, DAS Batanghari, DAS Air Hitam dan DAS Benuh.

DAS Batanghari mencakup seluruh Provinsi Jambi. Sungai ini merupakan sungai terbesar dan terpanjang di kawasan pantai timur. Dibagian hilir sungai bercabang dua yaitu Sungai Batanghari yang arahnya ke Muara Sabak dan cabang satu lagi yaitu Sungai Berbak mengarah ke Nipah Panjang. Sungai ini merupakan urat nadi transportasi di Provinsi Jambi maupun di kawasan pantai timur.

Beberapa sungai besar lain yang mengalir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Sungai Pemusiran, Sungai Sadu, Sungai Simpang Jelita, Sungai Simpang Datuk sedangkan berdasarkan geometrik sungai berbentuk meandering (berkelok-kelok) dan pada sepanjang kedua tanggulnya dimanfaatkan sebagai pemukiman dan lahan pertanian.

A. Pasang Air Laut

Tinggi muka air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditentukan oleh pasang surut air laut, air pasang sepanjang pantai Selat Berhala dibedakan atas tipe pasang kecil dan pasang besar.

- Pasang Kecil (Pasang perbani)
- Pasang Besar (Pasang purnama)



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Tinggi muka air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini ditentukan oleh pasang surut air laut. Selama pasang kecil (pasang perbani, neap-tide) pasang surut di kawasan perencanaan berpola semi diurnal, dengan 2 kali air pasang dan 2 kali air surut setiap harinya, sedangkan selama pasang besar (pasang purnama, *spring-tide*) pasang surut menjadi diurnal, dengan hanya satu kali pasang dan surut pada setiap hari. Perbedaan elevasi air tertinggi dan air terendah (*tidal range*) bervariasi antara 2 meter pada pasang kecil sampai 3,5 meter pada pasang besar. Pada musim hujan, muka air rata-rata di muara sungai adalah 10 - 30 cm lebih tinggi dari muka air pada musim kemarau. Variasi musiman ini akan bertambah lebih tinggi dari muara ke hulu sungai. Berdasarkan tata air, kawasan perencanaan dapat dibedakan menjadi kawasan tergenang periodik dan tergenang terus-menerus. Sebagian besar wilayah di kawasan perencanaan merupakan kawasan yang tergenang terus-menerus.

B. Fluktuasi Pasang Surut di Sungai dan Saluran

Fluktuasi pasang surut di sungai berangsur-angsur melemah semakin jauh dari pantai. Elevasi air rendah harian bertambah, sedangkan elevasi air tinggi tidak banyak berpengaruh. Selama waktu aliran tinggi (banjir) di Sungai Batanghari hampir tidak ada fluktuasi pasang yang terjadi di sebelah hulu (Simpang).



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Tabel I.2

Tinggi Muka Air (dalam M + PRL)

Sungai & Lokasi	Jarak dr Muara Sungai	Pasang Surut	Musim Hujan				Musim Kemarau			
			Pasang	Rata ²	Surut	Range	Pasang	Rata ²	Surut	Range
Sungai Batanghari										
Pertemuan	61 km	Purnama	+ 2,50	+ 1,90	+ 1,00	+ 1,50	+ 2,40	+ 1,50	+ 0,30	+ 2,10
Berbak		Rata ²	+ 2,30	+ 1,90	+ 1,20	+ 1,10	+ 2,20	+ 1,50	+ 0,50	+ 1,70
		Perbani	+ 2,20	+ 1,90	+ 1,50	+ 0,70	+ 2,10	+ 1,50	+ 0,90	+ 1,20
Tinggi Banjir Maksimum : + 3,30										
Pertemuan	41 km	Purnama	+ 2,50	+ 1,60	+ 0,20	+ 2,30	+ 2,40	+ 1,30	- 0,40	+ 2,80
Pamusiran		Rata ²	+ 2,30	+ 1,60	+ 0,50	+ 1,80	+ 2,20	+ 1,30	- 0,10	+ 2,30
		Perbani	+ 2,20	+ 1,60	+ 1,00	+ 1,20	+ 2,10	+ 1,30	+ 0,50	+ 1,60
Tinggi Banjir Maksimum : + 3,10										
Sungai Pamusiran										
Pamusiran	31 km	Purnama	+ 2,30	+ 1,50	+ 0,00	+ 2,30	+ 2,20	+ 1,20	- 0,60	+ 2,80
AWLR		Rata ²	+ 2,20	+ 1,50	+ 0,30	+ 1,90	+ 2,00	+ 1,20	- 0,30	+ 2,30
		Perbani	+ 2,10	+ 1,50	+ 1,80	+ 1,30	+ 1,90	+ 1,20	+ 0,30	+ 1,60
Tinggi Banjir Maksimum : + 2,80										
Sungai Berbak										
Nipah	0 km	Purnama	+ 2,50	+ 1,30	- 0,80	+ 3,30	+ 2,40	+ 1,10	- 0,10	+ 3,50
Panjang		Rata ²	+ 2,30	+ 1,30	- 0,40	+ 2,70	+ 2,20	+ 1,10	- 0,70	+ 2,90
		Perbani	+ 2,20	+ 1,30	+ 0,30	+ 1,90	+ 2,10	+ 1,10	+ 0,00	+ 2,10

Sumber : RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur 2011 – 2031

C. Kualitas Air dan Rembesan Air Laut

Selama musim kemarau, rembesan air laut mencapai areal Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Sungai Berbak, Sungai Batanghari, dan Sungai Pemusiran serta saluran-saluran drainase/irigasi. Selama hal tersebut berlangsung, air tidak dapat dipergunakan untuk air minum atau untuk air tanaman tetapi air asin tidak berbahaya untuk tanaman yang tidak diirigasi dan juga tidak mempengaruhi air tanaman. Akibat pencucian dan drainase lahan, kualitas air saluran menjadi asam dan berwarna hitam, khususnya di awal musim hujan



antara bulan September - Oktober. Air ini kurang cocok untuk keperluan air minum dan juga tidak baik dipakai untuk irigasi tanaman.

1.1.6 Klimatologi

Iklim merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh cukup besar terhadap berhasil tidaknya pembangunan. Kondisi iklim secara makro sangat sulit untuk dikendalikan karakteristiknya, karena dipengaruhi oleh letak geografis dan bentuk kawasan. Dalam hal ini kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi iklim setempat.

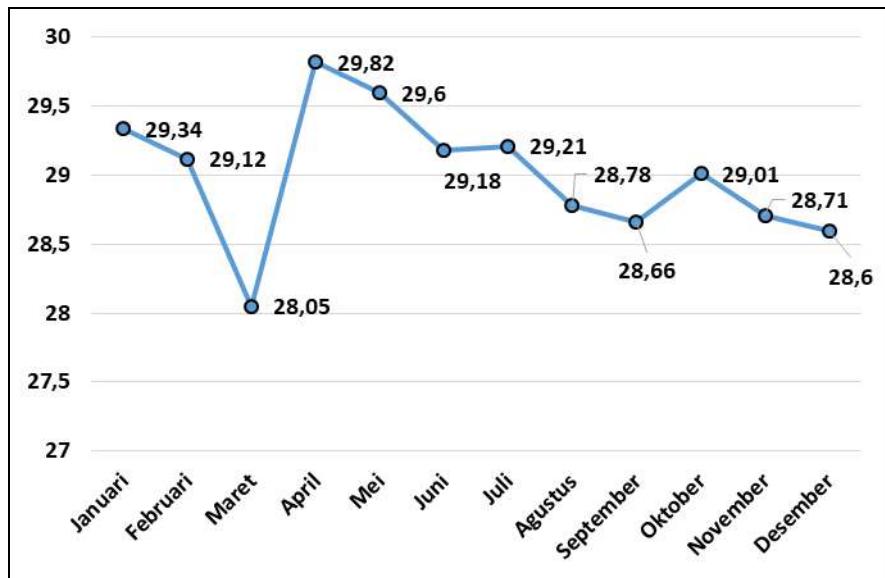
Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.000 - 3.000 milimeter per tahun. Pada Tahun 2019 Suhu udara rata-rata sebesar 27,324° Celsius dengan Suhu Maksimum sebesar 28,246° Celsius pada bulan Mei dan Suhu Minimun sebesar 26,596° Celsius pada bulan April. Curah Hujan rata-rata sebesar 162,6 mm per tahun. Curah Hujan maksimum sebesar 319 mm pada bulan maret dan minimun sebesar 45 mm pada bulan Juli. Kondisi Suhu dan Curah Hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada gambar berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Gambar I.2.

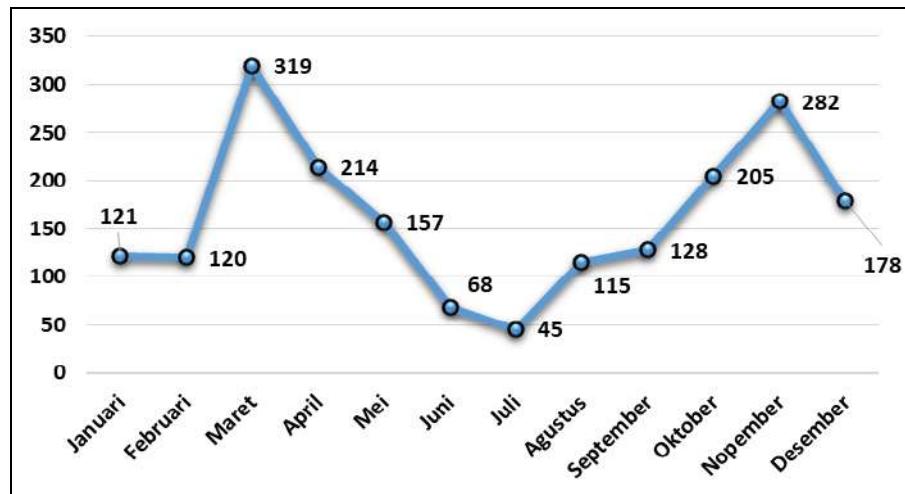
Kondisi Suhu Udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : BPS, Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2021

Gambar I.3.

Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : BPS, Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2020



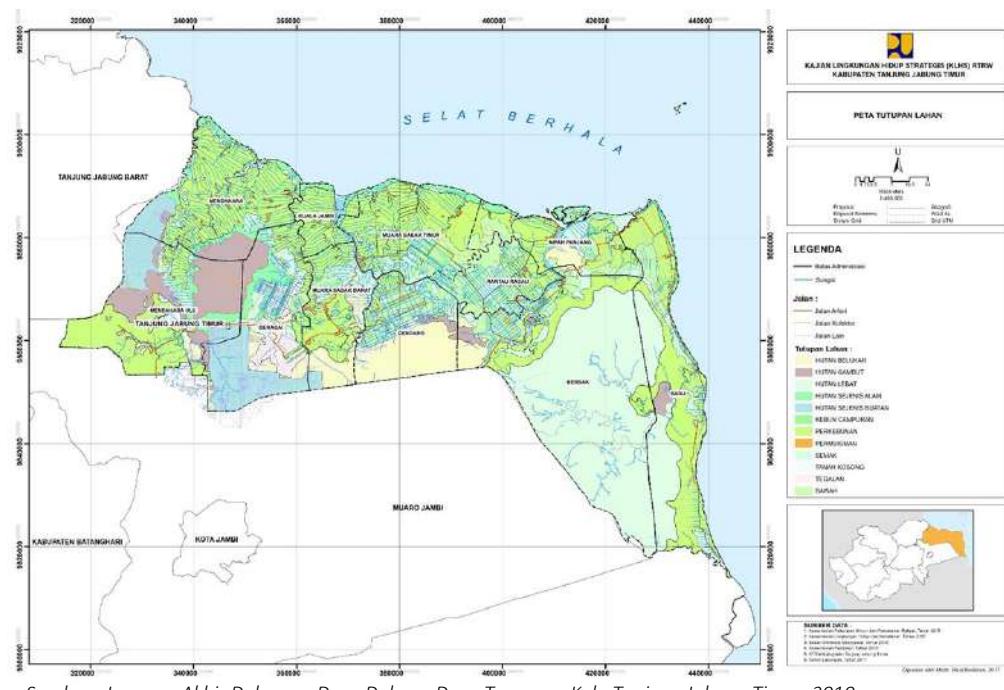
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

1.1.7 Penggunaan Lahan

Dari analisa yang dilakukan dengan menggunakan SIG (*interpretasi citra satelit*), maka diperoleh penggunaan lahan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut

Gambar I.4.

Peta Guna Lahan Kab. Tanjung Jabung Timur



Sumber : Laporan Akhir Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 bertambah sebanyak 9.828 jiwa dari 219.985 jiwa pada tahun 2019 menjadi 229.813 jiwa pada tahun 2020 atau dengan laju pertumbuhan 1,1 %. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2019 sebesar 45 jiwa/km² dan sex ratio 104,33.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Dari data pada tabel II.4 dapat diketahui bahwa kepadatan tertinggi di kecamatan Rantau Rasau, hal ini karena memang jumlah penduduknya yang relatif besar dan mempunyai luas wilayah relatif kecil bila dibanding kecamatan lain. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama.

Tabel I.3

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Tahun 2019 dan 2020

Kecamatan	2019			2020		
	Σ Penduduk	SR (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Σ Penduduk	SR (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)
Mendahara	26.443	104,22	29,01	26.675	104,23	50,00
Mendahara Ulu	19.001	112,87	49,83	16.676	108,14	30,00
Geragai	23.435	113,53	82,13	26.202	105,82	47,00
Dendang	15.078	103,76	31,53	16.485	103,95	43,00
Ma Sabak Barat	18.092	105,31	71,86	21.409	103,22	77,00
Ma Sabak Timur	31.475	101,13	76,72	32.606	102,36	84,00
Kuala Jambi	14.755	102,82	122,43	14.485	106,54	127,00
Rantau Rasau	23.831	104,86	66,92	24.780	103,52	140,00
Berbak	9.939	104,89	51,11	10.591	106,45	9,00
Nipah	25.660	102,22	109,33	26.503	102,48	86,00
Sadu	12.276	105,9	6,74	13.401	105,35	22,00
Jumlah	219.985	105,36	40,4	229.813	104,33	45,00

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021

Dari tabel diatas terlihat dimana kepadatan penduduk pada tahun 2020 (45/Km²) meningkat dari tahun 2019 (40,4 Km²). Tahun 2020, tingkat kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Rantau Rasau yaitu sebesar 140/Km², sementara tingkat kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Berbak sebesar 9/ Km².



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Selanjutnya, struktur usia penduduk menunjukkan sebaran penduduk berdasarkan kelompok usianya yang secara garis besar terbagi kedalam tiga kelompok yaitu usia belum produktif, usia produktif dan usia tidak produktif (usia lanjut). Kelompok usia belum produktif adalah penduduk berusia 0 - 14 tahun yang jumlahnya mencapai 55.654 jiwa atau sekitar 24,22 persen dari total jumlah penduduk. Kelompok penduduk usia produktif adalah penduduk yang termasuk ke dalam usia kerja yaitu berumur 15 - 64 tahun. Kelompok usia ini merupakan tulang punggung perekonomian yang secara produktif melakukan aktivitas ekonomi untuk memperoleh pendapatan. Jumlah penduduk kelompok usia ini mencapai 159.877 jiwa atau 69,57 persen dari total jumlah penduduk. Selanjutnya Kelompok usia tidak produktif yaitu yang berumur dari 65 - 75+ mencapai 14.282 Jiwa atau sebesar 6,21 persen dari total jumlah penduduk. Pengelompokan umur penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin dan rasinya disajikan pada Tabel I.4.

Tabel I.4

Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KELOMPOK UMUR (TAHUN)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN
0 - 4	8.896	8.804	17.700	101,04
5 - 9	9.665	9.473	19.138	102,03
10 - 14	9.620	9.196	18.816	104,61
15 - 19	9.650	9.257	18.907	104,25
20 - 24	9.978	9.576	19.554	104,20
25 - 29	9.613	9.219	18.832	104,27
30 - 34	9.911	9.620	19.531	103,02
35 - 39	9.810	9.099	18.909	107,81
40 - 44	8.895	8.557	17.452	103,95
45 - 49	7.922	7.614	15.536	104,05
50 - 54	6.648	6.286	12.934	105,76
55 - 59	5.392	4.986	10.378	108,14
60 - 64	4.031	3.813	7.844	105,72
65 - 69	2.989	2.824	5.813	105,84
70 - 74	2.023	2.063	4.086	98,06
75+	2.302	2.081	4.383	110,62
	117.345	112.468	229.813	104,34

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur mayoritas masih berada pada usia muda. Proporsi penduduk usia sekolah (5 - 19 tahun) mencapai 24,74 persen dari total jumlah penduduk. Bila ditambahkan dengan penduduk usia pendidikan tinggi (20 - 24 tahun) jumlahnya mencapai 76.415 jiwa atau sebesar 33,25 persen dari total jumlah penduduk. Hal ini berimplikasi pada perlunya penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan secara lebih memadai dengan kualitas yang relatif lebih baik untuk menjamin kualitas pendidikan kelompok generasi muda.

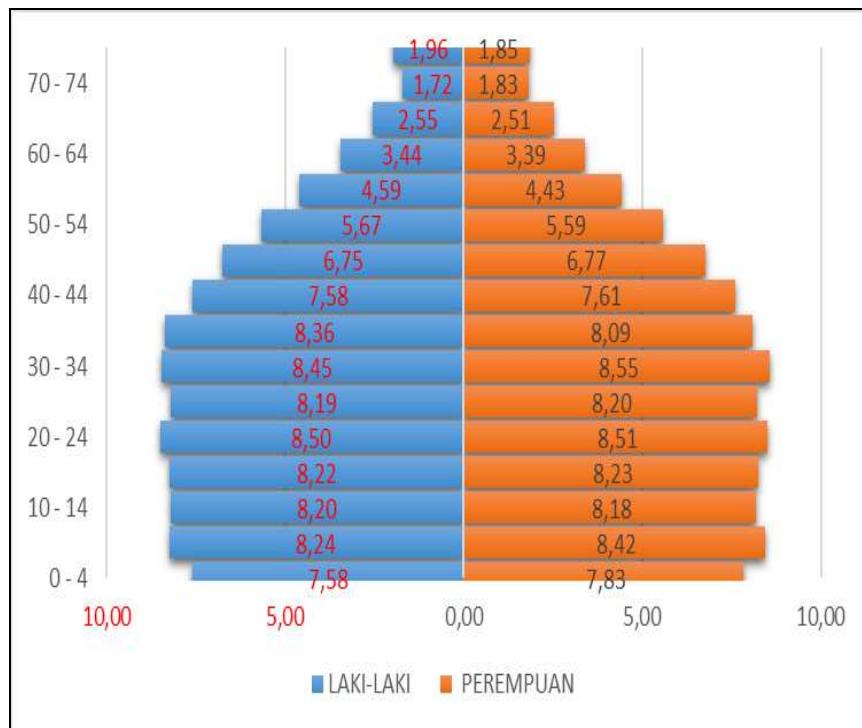


PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Untuk melihat Gambaran komposisi umur lima tahunan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, dapat dilihat pada Gambar II.5

Gambar II.5.

Piramida Penduduk Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Piramida penduduk secara umum terdiri dari tiga bentuk yaitu: (1) *Expansive*, bila sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur termuda. Bentuk piramidanya melebar kebawah dan semakin keatas semakin menyempit; (2) *Constructive*, bila penduduk yang berada pada kelompok umur termuda jumlahnya sedikit, pada umur pertengahan lebih banyak dan semakin sedikit pada umur-umur diatasnya. Bentuk piramidanya menyempit pada bagian bawah, melebar bagian tengah dan kembali menyempit pada bagian-bagian ke atasnya; (3) *Stationary*,



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

bila banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama banyaknya, kecuali pada kelompok umur tertentu. Bentuk piramidanya lebih lurus dan hanya menyempit pada bagian puncaknya.

Dari gambaran tersebut dapat dikemukakan bahwa bentuk piramida penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk kategori "expansive". Dalam bentuk piramida ini akan adanya ledakan penduduk pada periode-periode mendatang terutama jika program keluarga berencana tidak terus diintensifkan dalam rangka penurunan angka kelahiran. Hal ini disebabkan angka kelahiran rendah pada periode-periode 15 tahun sebelumnya. Jumlah penduduk pada kelompok umur diatasnya terutama umur 15 - 29 tahun dimana pada kelompok perempuan masih relatif tinggi. Penduduk perempuan pada kelompok umur ini termasuk kelompok usia subur yang berpotensi pada peningkatan total kelahiran dan pertumbuhan penduduk tinggi.

Distribusi penduduk menurut agama memperlihatkan bahwa pemeluk agama islam dengan jumlah terbesar merupakan mayoritas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jumlah terbesar berikutnya berturut turut Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha dan Hindu. Keragaman pengikut agama ini memerlukan pembinaan untuk menumbuhkan rasa toleransi dan tenggang rasa antar pemeluk agama agar tidak muncul konflik yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Gambaran komposisi Jumlah Penganut



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Agama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.5.

Jumlah Penduduk menurut Penganut Agama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

Kecamatan	Agama					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Mendahara	25.954	11	14	-	5	-
Mendahara Ulu	16.955	479	-	-	-	-
Geragai	20.764	103	653	1	3	-
Dendang	19.534	155	200	2	4	-
Muara Sabak Barat	8.871	29	261	-	-	-
Muara Sabak Timur	39.451	245	8	-	-	-
Kuala Jambi	14.304	2	85	-	16	6
Rantau Rasau	22.802	172	201	-	-	-
Berbak	9.828	24	45	-	-	-
Nipah Panjang	26.396	15	91	135	-	-
Sadu	12.174	24	8	35	39	-
Total	227.033	1.259	1.566	173	67	6

Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2019

1.3 Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016-2019 mengalami tren peningkatan cukup signifikan, namun pada tahun 2020 mengalami pemerosotan yang cukup tajam. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sebesar 2,65 persen meningkat menjadi 3,07 persen pada tahun 2017, meningkat pada tahun 2018 menjadi 3,09 persen, meningkat kembali 4,25 persen pada tahun 2019. Pada akhir tahun 2019 pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia yang dimulai dari Propinsi Wuhan di China dan mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Dampak pandemi Covid-19 yelah memaksa komunitas masyarakat Harus beradaptasi terhadap berbagai bentuk perubahan sosial Yang

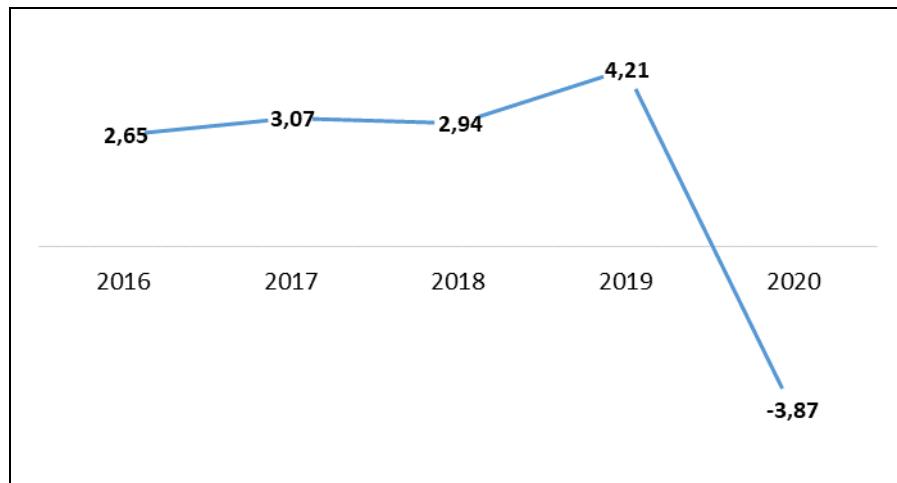


PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Diakibatkannya. Pola kehidupan sosial Pra-Pandemi harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan standar protokol kesehatan menuju kenormalan baru atau New Normal. Pandemi Covid-19 ini sangat memukul perekonomian Nasional termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pertumbuhan ekonomi merosot tajam dibawah nol persen yaitu minus 3,87 persen dan dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar minus 0,46. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 - 2020 disajikan pada Gambar I.6.

Gambar II.6.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHK) Tahun 2016 - 2020



Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021

Berbeda dari tahun 2016 sampai dengan 2019, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang ditopang oleh 17 sektor, 8 sektor diantaranya tumbuh negatif. Pertumbuhan ekonomi secara berurutan dari yang tertinggi dicapai oleh kategori sebagai berikut : 1) Informasi dan Komunikasi sebesar 7,73 persen; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,81 persen; 3) Jasa Kesehatan dan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Kegiatan Sosial sebesar 6,13 persen; 4) Industri Pengolahan sebesar 5,18 persen; 5) Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,42 persen; 6) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,01 persen; 7) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,68 persen; 8) Industri Pengolahan sebesar 1,25 persen; 9) Jasa Pendidikan sebesar 0,40 persen; 10) Konstruksi sebesar - 0,09 persen; 11) Real Estate sebesar - 0,18 persen; 12) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar - 0,34 persen; 13) Jasa Perusahaan sebesar - 0,34 persen, 14) Transportasi dan Pergudangan sebesar - 1,25 persen, 15) Jasa lainnya sebesar -1, 52 persen dan 16) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar - 7,24 persen dan 17) Pertambangan dan Penggalian sebesar - 7,47 persen. Tabel II.7. menunjukkan laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha pada periode tahun 2016 – 2020.

Tabel II.7.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016 – 2020

Kategori	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		1	2	3	4	5	6	7			
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		8,58		6,41		4,11		2,95		2,68
B	Pertambangan dan Penggalian		- 0,31		0,87		1,53		4,38		-7,47
C	Industri Pengolahan		1,08		1,93		4,35		0,28		1,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas		5,26		2,00		4,43		3,42		5,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		5,13		2,61		7,24		5,46		6,81
F	Konstruksi		6,54		13,32		5,79		7,54		-0,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		12,61		7,19		6,01		6,19		3,01
H	Transportasi dan Pergudangan		7,74		6,17		4,66		5,20		-1,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		10,29		10,54		8,11		2,44		-7,24



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

J	Informasi dan Komunikasi	9,91	7,69	9,46	7,69	7,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,95	5,40	1,24	3,85	3,42
L	Real Estate	8,23	8,81	8,48	9,13	-0,18
M,N	Jasa Perusahaan	7,67	5,32	4,51	3,33	-0,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,44	4,55	5,46	4,55	-0,34
P	Jasa Pendidikan	8,59	6,03	4,88	6,03	0,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,76	6,06	4,88	6,07	6,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,83	5,37	6,67	4,11	-1,52
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		2,65	3,07	2,94	4,25	-3,87

Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam Angka, 2021

1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan digunakan PDRB yang dihitung menurut harga berlaku (*current price*), hal ini karena PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) mengandung unsur inflasi makro. Sedangkan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun digunakan PDRB yang dihitung menurut harga konstan (PDRB ADHK) yang lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah.

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku yang digunakan untuk menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara PDRB dasar harga konstan dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga tahun dasar tertentu yang dipilih dan bertujuan untuk



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 dalam dokumen ini menggunakan tahun dasar 2010.

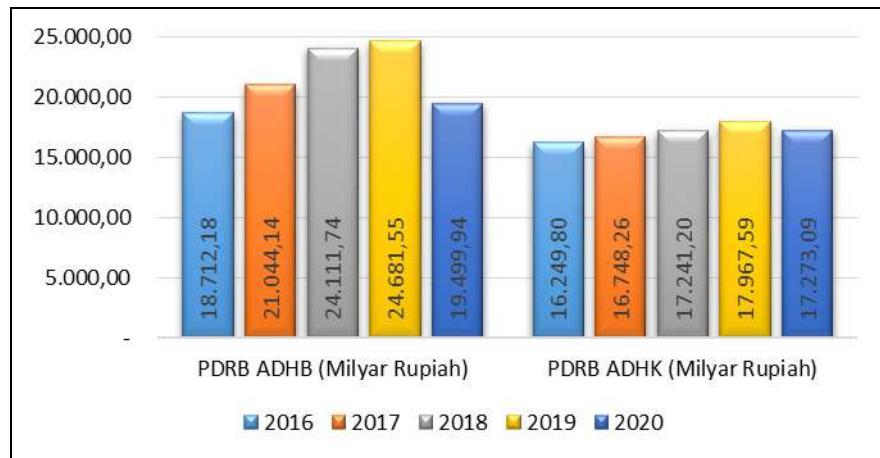
Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha pada tahun 2020 mengalami penurunan dari Tahun 2019, begitu juga dengan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menurut lapangan usaha yang mengalami penurunan pada periode yang sama. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2020 menurut lapangan usaha dalam satuan miliar sebesar Rp 24.681,55 turun sebesar Rp. 5.181,61 menjadi Rp. 19.499,94 pada Tahun 2020. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dalam satuan miliar Tahun 2019 sebesar Rp. 17.967,59 menurun sebesar Rp. 694,5 pada tahun 2020 yang sebesar Rp. 17.273,09. Nilai PDRB tersebut diatas dalam satuan miliar rupiah. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 tersaji pada Gambar II.7.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Gambar II.7.

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB - ADHK) dengan Migas Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021 (diolah)

1.5 Struktur Ekonomi

Peranan/kontribusi sektor lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor lapangan usaha.

Struktur perekonomian sebagian masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2017 – 2020 didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha, diantaranya pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; Industri pengolahan; konstruksi; serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Tahun 2020 struktur ekonomi masih mengandalkan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 35,3 persen (angka ini turun dari 50,13 pada Tahun 2019), urutan kedua yaitu kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 24,27 persen (naik dari 18,33 persen pada Tahun 2019), urutan ketiga yaitu kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,2 persen (naik dari 7,35 persen pada Tahun 2019), urutan keempat yaitu kategori Industri Pengolahan sebesar 9 persen (naik dari 7,04 persen pada Tahun 2019), dan urutan kelima yaitu kategori konstruksi sebesar 5,88 persen (naik dari 4,55 persen pada Tahun 2019).

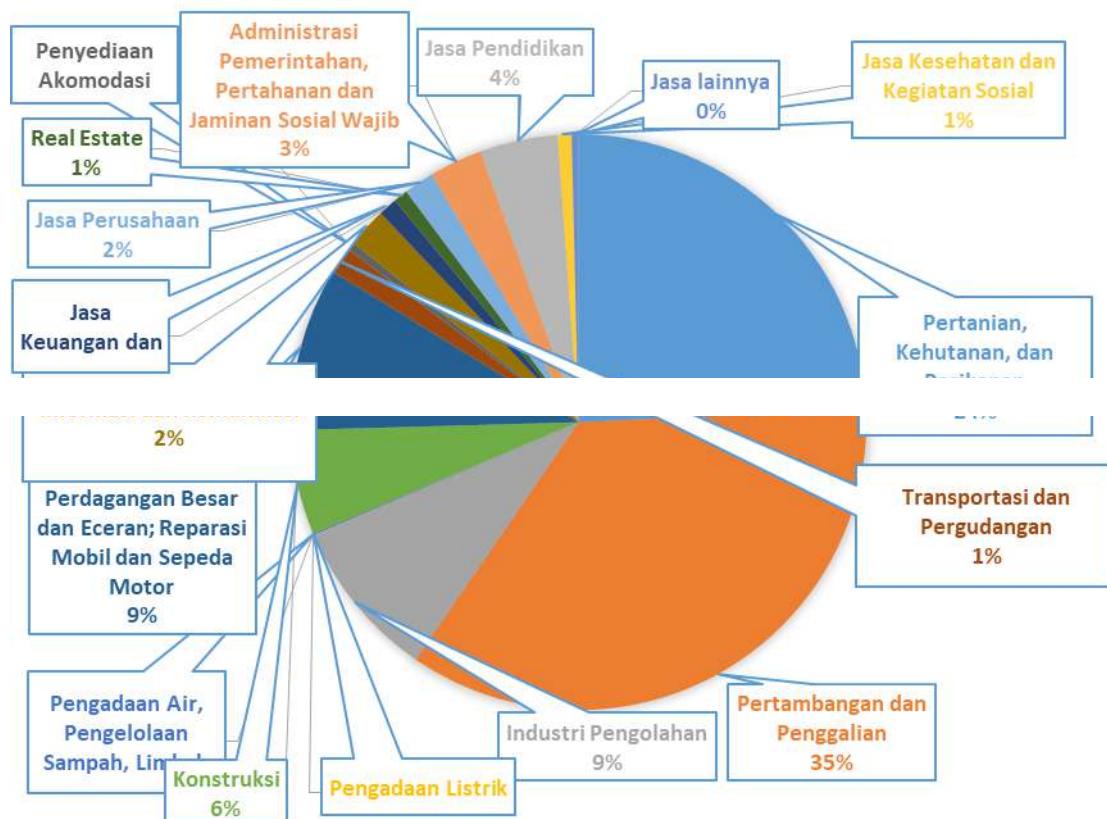
Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki peranan yang cenderung meningkat. Peranan kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sempat meningkat pada tahun 2018 namun mengalami penurunan pada Tahun 2019 dan 2020. Sedangkan kategori lapangan usaha Industri pengolahan pada tahun 2016-2019 peranannya cukup stabil pada angka 7-8 persen dan meningkat menjadi 9 persen pada tahun 2020. Gambar II.5 dan Tabel II.8. menunjukkan struktur ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 dan peranan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Gambar II.8.

Struktur Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020



Sumber : BPS, PDRB Kab. Tanjung Jabung Timur menurut lapagan usaha, 2021.

Tabel II.8.

peranan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,16	19,17	17,76	18,31	24,27
B	Pertambangan dan Penggalian	48,27	49,39	52,20	50,16	35,30
C	Industri Pengolahan	7,90	7,71	7,16	7,04	9,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08
F	Konstruksi	4,25	4,37	4,24	4,55	5,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,11	7,20	6,92	7,34	9,20
H	Transportasi dan Pergudangan	1,31	1,26	1,17	1,22	1,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,37	0,39	0,37	0,39	0,45
J	Informasi dan Komunikasi	1,48	1,52	1,48	1,64	2,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,86	0,83	0,76	0,80	1,06
L	Real Estate	0,59	0,59	0,58	0,62	0,80



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
M,N	Jasa Perusahaan	1,32	1,31	1,24	1,34	1,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,36	2,26	2,22	2,34	2,97
P	Jasa Pendidikan	3,14	3,14	3,04	3,32	4,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,52	0,52	0,50	0,54	0,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,29	0,28	0,27	0,30	0,38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber : BPS, PDRB Kab. Tanjung Jabung Timur menurut lapangan usaha, 2021

1.6 PDRB Per Kapita

Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Walaupun secara teoritis angka yang diperoleh merupakan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut.

Sama halnya dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik ADHB maupun ADHK mengalami pertumbuhan positif diperiode 2015-2019, namun mengalami kontraksi dan melemah pada Tahun 2020. Pada Tahun 2020 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 84.851.336,00 mengalami penurunan bila dibandingkan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 112.262.791 atau melemah sebesar minus 24,37 persen, begitu juga dengan PDRB



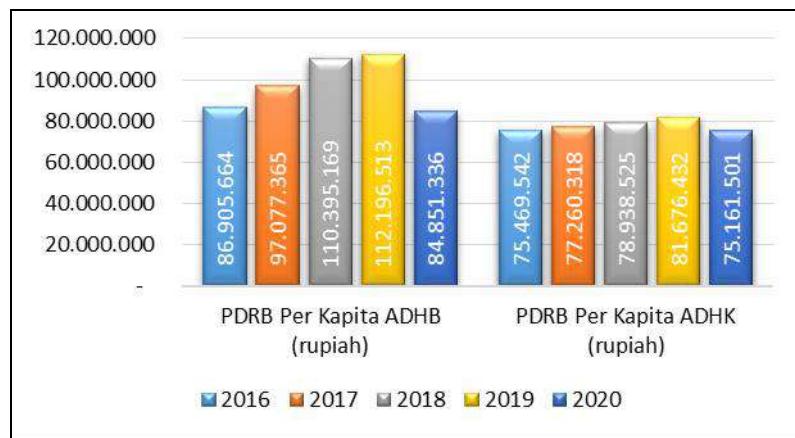
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

perkapita ADHK juga mengalami pelemahan sebesar minus 7,98 persen pada Tahun 2020 atau sebesar Rp. 75.161.501,00 Yang perlu menjadi perhatian adalah PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan. PDRB per kapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2016 - 2020 disajikan pada Gambar II.9. dan untuk grafik laju pertumbuhan PDRB per kapita Tahun 2016 - 2020 tersaji pada Gambar II.10.

Gambar II.9.

PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016 – 2020

Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2020.



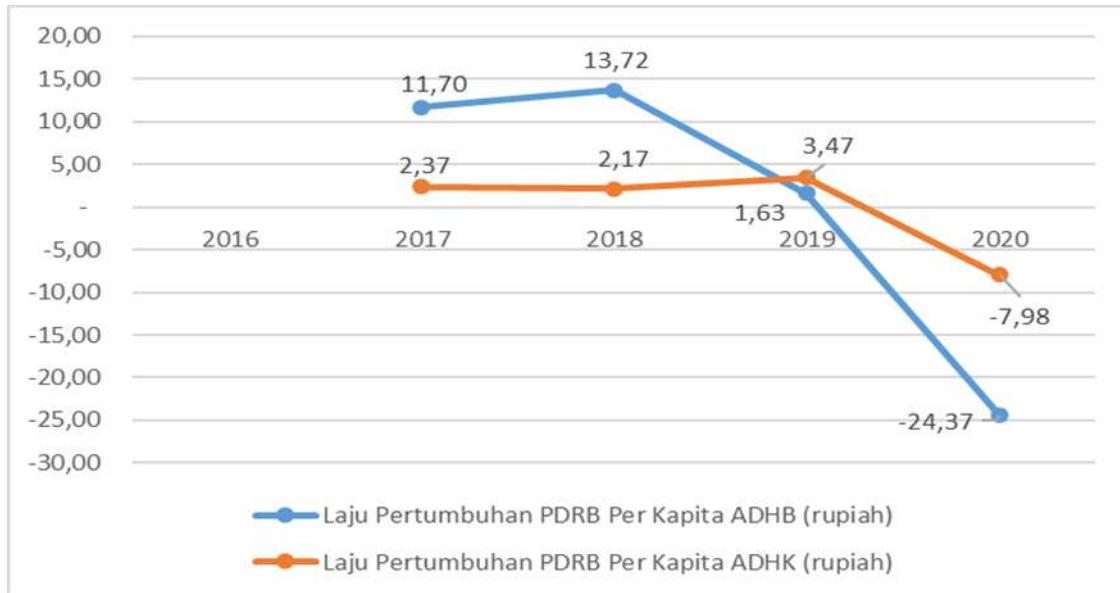
Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Gambar I.10.

Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Tahun 2016 - 2020 (persen)



Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021.

1.7 Inflasi

Salah satu indikator untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah laju inflasi, yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum dan diukur dengan perkembangan indeks harga konsumen. Tingkat inflasi yang tinggi secara terus menerus akan dapat menimbulkan stagflasi, dimana kegiatan sektor-sektor ekonomi menjadi terhenti. Sebaliknya jika inflasi terus menerus rendah (deflasi) akan dapat menimbulkan resesi ekonomi. Sehingga untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap berada pada satu titik yang diharapkan menjadi permasalahan yang terus berkembang. Tingkat Inflasi Kota Jambi dijadikan sebagai acuan inflasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Tabel II.9.

Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Year on Year, Kota Jambi Tahun 2016 - 2020

NO	INFLASI	2016	2017	2018	2019	2020
1	Desember	0,36	1,52	0,98	0,38	0,72
2	Desember (Tahun Kalender)	4,54	2,61	3,02	1,27	3,09
3	Desember terhadap Desember (year on year)	4,54	2,68	3,02	1,27	3,09

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2021

1.8 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mengatur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana semakin mendekati 0 semakin menunjukkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2016-2020 menunjukkan angka yang Fluktuatif dan cenderung mendekati 0. Hal ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang cukup mengecil. Indek Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada posisi ketimpangan rendah menuju kearah ketimpangan yang hampir sempurna, akan tetapi perlu mendapat perhatian karena adanya trend naik sejak capaian pada Tahun 2016 yang sebesar 0,26 dibanding Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang sebesar 0,29. Data pada Tabel II.10. disajikan perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2016 - 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Tabel II.10.

Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Gini Ratio	0,26	0,28	0,29	0,29	0,25

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

1.9 Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Secara umum kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan. Saat ini Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun Tahun 2015 sampai dengan 2020 menunjukkan tren angka menurun. Pada Tahun 2015 penduduk miskin berjumlah 30.180 orang. Pada Tahun 2016 sampai dengan 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun dengan jumlah 27.420 orang pada Tahun 2016, 27.220 orang pada Tahun 2017, 26.990 pada Tahun 2018, 25.350 pada Tahun 2019 dan 24.230 orang pada Tahun 2020.

Sementara pendapatan keluarga miskin pada Tahun 2015 berjumlah Rp. 301.563 kemudian terus meningkat hingga pada Tahun 2020 menjadi Rp. 392.778. Grafik perkembangan antar waktu jumlah penduduk miskin dengan garis kemiskinan periode Tahun 2015 - 2020 disajikan pada Gambar II.11



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Gambar II.11.

Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk miskin Dengan Garis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2020



Sumber : BPS, Statistik Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan atau *Distributionally Sensitive Index* (P2) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbeck (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

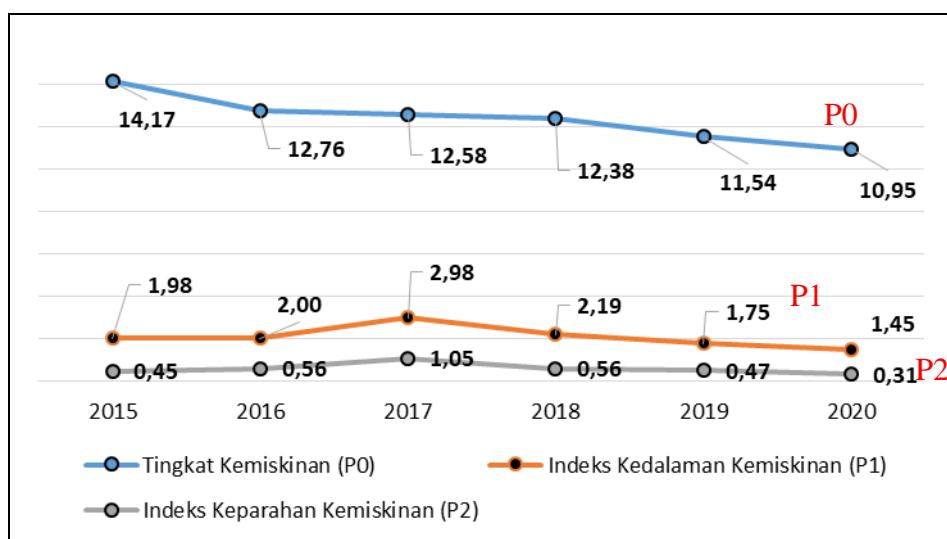


PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan pada Gambar II.12.

Gambar II.12.

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2020



Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021 (diolah)

Indeks kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berfluktuatif selama periode 2015 sampai dengan 2020. dimana pada Tahun 2015 P1 berada di posisi 1,98 persen kemudian pada Tahun 2017 meningkat menjadi 2,98 persen dan mengalami penurunan pada Tahun 2020 sebesar 1,45. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,45 tahun 2015 menjadi 1,05 pada Tahun 2017 dan menurun menjadi 0,31 pada Tahun 2020.



1.2. KELEMBAGAAN

2.1.1 Kewenangan Daerah membentuk Organisasi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan kewenangan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Penataan Kelembagaan sendiri telah melewati masa-masa yang berlalu seiring dengan adanya perubahan peraturan kelembagaan perangkat daerah yang baru. Pengaturan mengenai kelembagaan yang semulanya diatur dalam PP No 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, kemudian diganti dengan PP No 18 Tahun 2007 tentang Perangkat



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Daerah. Penggantian Pengaturan mengenai perangkat daerah sebagai konsekuensi adanya perubahan UU tentang Pemerintahan Daerah. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan perangkat Daerah. Jika dalam UU No 32 Tahun 2004, implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan PP No 41 Tahun 2007 menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas atau dengan kata lain dapat disimpulkan dengan istilah “*Miskin Struktur Kaya Fungsi*”, maka dalam UU No 23 Tahun 2014 berdasarkan PP No 18 Tahun 2014 menerapkan prinsip “*Tepat Struktur (Ukuran) Dan Tepat Fungsi*”.

Oleh karena perbedaan prinsip dalam penataan kelembagaan diatas, maka perbedaan yang sangat mendasar antara PP No 41 tahun 2007 dengan PP 18 Tahun 2014 adalah mengenai besaran organisasi. Jika dalam PP No 41 tahun 2007 menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, maka dalam PP 18 Tahun 2014 tidak menentukan kriteria besaran organisasi, besaran organisasi ditentukan berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi yang nyata di masing-masing daerah. disamping mengenai prinsip diatas, terdapat lagi perbedaan-perbedaan pengaturan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

kelembagaan antara PP No 41 tahun 2007 dengan PP 18 Tahun 2014 yang secara rinci akan diuraikan dalam Tabel Berikut ini.

Tabel 1.4.
Perbedaan substansi Antara PP PP No 41 Tahun 2007 dan PP No 18 Tahun 2016

MATERI	PP No 18 Tahun 2016	PP No 41 Tahun 2007
PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH	<ul style="list-style-type: none">❖ Pengelompokan perangkat daerah:<ul style="list-style-type: none">▪ Setda;▪ Set DPRD;▪ Inspektorat;▪ Dinas;▪ Badan;▪ Kecamatan (khusus untuk Kab/Kota)▪ Perangkat Daerah di Kelompokkan :❖ Sekretariat Sebagai Unsur Pendukung (dukungan administrasi)❖ Sekda sekaligus merangkap sebagai Middle line yaitu fungsi koordinator yang menghubungkan perangkat daerah lain dengan KDH/WK KDH❖ Dinas Melaksanakan urusan pemerintahan dengan tugas utama membreikan layanan langsung kepada masyarakat.❖ Badan sebagai unsur penunjang dengan tugas membrikan dukungan teknokratik kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan dan perangkat daerah sebagai unsur pendukung.	<ul style="list-style-type: none">❖ Pengelompokan perangkat daerah:<ul style="list-style-type: none">▪ Setda;▪ Set DPRD;▪ Inspektorat▪ Lemtekda.▪ Kecamatan (khusus kab/kota)❖ Tidak ada perbedaan fungsi yang tegas antara badan, dinas atau kantor.
MATERI	PP No 18 Tahun 2014	PP No 41 Tahun 2007
TIPOLOGI	<ul style="list-style-type: none">❖ Jumlah perangkat Daerah sesuai dengan jumlah fungsi pendukung, urusan pemerintahan dan fungsi penunjang.❖ Fungsi pendukung, urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan dikelmpukkan menjadi :<ul style="list-style-type: none">▪ Fungsi atau Urusan dengan beban besar, diwadahi perangkat daerah tipe A.▪ Fungsi atau Urusan dengan beban sedang, diwadahi perangkat daerah tipe B▪ Fungsi atau Urusan dengan beban kecil, diwadahi perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none">❖ Jumlah Perangkat Daerah dibatasi dan diwajibkan dilakukan perumpunan.❖ Tidak ada tipologi perangkat daerah, yang ada hanya tipologi daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

	<p>tipe C</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Fungsi atau Urusan dengan beban sangat kecil, tidak menjadi perangkat namun bisa berupa Bidang, atau Seksi/Subbidang.	
PEMETAAN URUSAN	<ul style="list-style-type: none">❖ Tipologi perangkat daerah ditentukan berdasarkan hasil pemetaan beban urusan atau beban penunjang atau beban pendukung.❖ Hasil pemetaan bersifat makro (beban urusan) yang dapat juga digunakan untuk perencanaan dan penganggaran. Penggunaan hasil pemetaan dalam perencanaan dan penganggaran diatur dlm PP Pelaksanaan Urusan	<ul style="list-style-type: none">❖ Tidak ada pemetaan beban masing urusan, fungsi penunjang dan pendukung.❖ Pemetaan dilakukan terhadap Daerah.
JUMLAH PERANGKAT DAERAH	<ul style="list-style-type: none">❖ Jumlah perangkat Daerah Kemungkinan Lebih Banyak dari Sebelumnya, Namun Jumlah Struktur Perangkat Daerah Secara Keseluruhan Akan Berkurang Karena Adanya Perbedaan Jumlah Bidang dan Kasi pada setiap Perangkat Daerah.❖ Jumlah Bidang Minimal 2 Maksimal 4.❖ Tidak dapat menambah perangkat daerah lain di luar yang sudah ditentukan.❖ Untuk memperkecil struktur Birokrasi, Pemerintah Daerah Dapat menurunkan tipe perangkat daerah.	<ul style="list-style-type: none">❖ Jumlah perangkat daerah dibatasi, namun diluar jumlah yang sudah dibatasi masih dapat menambah perangkat daerah jika ada perintah peraturan perundang-undangan.❖ Jumlah bidang antara 4 sampai 7.

Dengan adanya perubahan yang sangat signifikan terhadap pengaturan mengenai kelembagaan, maka setiap pemerintah daerah mutlak harus menata kembali organisasi perangkat daerah mengikuti pengaturan mengenai kelembagaan yang baru. Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Secara normatif, evaluasi kelembagaan pemerintah daerah dapat dilakukan



dengan mengacu pada PP No. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai pengelompokan perangkat daerah, tipologi, pemetaan urusan serta sub-substruktur yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Analisis terhadap kebutuhan perangkat daerah menghendaki adanya evaluasi terhadap kondisi eksisting organisasi perangkat daerah. Hasil evaluasi akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada, baik pada Sekretariat, Dinas, dan Badan.

2.1.2. Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan pada hakikatnya merupakan proses untuk melaksanakan fungsifungsi pengaturan (regulasi), pelayanan, dan pemberdayaan dengan optimal. Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi-fungsi ini menjadi tanggung jawab birokrasi pemerintahan. Dalam konsep birokrasi ideal seperti dikemukakan Max Weber, birokrasi merupakan organisasi yang melaksanakan sejumlah fungsi, yang ditandai dengan karakteristik hirarkhis, memiliki rantai komando, terdapat pembagian dan diferensiasi pekerjaan, dll. Sebagai suatu organisasi, birokrasi memiliki sejumlah struktur yang menjalankan fungsi dan pembagian kerja tersebut. Hal ini sejalan dengan pemahaman organisasi dalam perspektif statis



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

maupun dinamis. Dalam perspektif statis, organisasi mewujud sebagai suatu lembaga atau wadah. Sementara dalam perspektif dinamis, organisasi mengandung aspek ketatalaksanaan dalam proses dinamika organisasi.

Pada prinsipnya, struktur organisasi dan tata hubungan kerja yang lahir sebagai konsekuensi dari bentuk organisasi birokrasi diterapkan dengan berlandaskan pada filosofi “siapa mengerjakan apa serta bagaimana caranya”. Implikasinya, dalam organisasi pemerintahan dikenal adanya struktur organisasi yang melaksanakan fungsi staf, fungsi lini, dan fungsi teknis. Fungsi staf umumnya dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah, sementara fungsi-fungsi lainnya dilaksanakan oleh dinas-dinas otonom di lingkungan Pemerintah Daerah.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membentuk organisasi perangkat daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga;
4. Dinas Perikanan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
5. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

11. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
12. Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan;
13. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
14. Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 19. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 20. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
 22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Badan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 2. Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Kecamatan terdiri dari:
- a. Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Nipah Panjang dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Mendahara dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Rantau Rasau dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Sadu dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Dendang dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Muara Sabak Barat dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Mendahara Ulu dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Kuala Jambi dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Geragai dengan Tipe A; dan
 - k. Kecamatan Berbak dengan Tipe A.

1.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

1.3.1. Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa penyajian permasalahan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan urutan urusan yang diampu oleh pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 6 (enam) Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 6 (enam) Urusan pilihan. Namun demikian untuk Urusan Pilihan, setiap daerah dapat menyesuaikan dengan konteks lokal masing-masing daerah.

Setelah menelaah kajian data dan informasi pada RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026 di BAB 2 dan menelaah hasil analisis



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dengan Organisasi Perangkat Daerah pada saat dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD), diperoleh gambaran permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

Permasalahan Pembangunan Daerah

No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
I. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	Urusan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Jangkauan pelayanan dan daya tampung semua jalur dan jenjang pendidikan belum optimal;2. Mutu pendidikan yang masih rendah;3. Program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun belum dapat terwujud;4. Ketersediaan dan penempatan guru yang belum merata;5. Sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang
2	Urusan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Sarana Prasarana Kesehatan yang belum sesuai standar kesehatan dalam permenkes Nomor 75 Tahun 2014;2. Masih terdapat bangunan Pustu, Polindes dan poskesdes dalam kondisi rusak berat;3. Pembagian kewenangan aset polindes dan poskesdes antara Desa dan Dinas Kesehatan belum sepenuhnya dilaksanakan;4. Penanganan Stunting yang belum optimal;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
		<ol style="list-style-type: none">5. Kualitas derajat kesehatan lingkungan masih rendah;6. Peningkatan kasus covid-19;7. Masih ada desa yang belum UCI;
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none">1. Cakupan luas lahan pertanian yang dapat dialiri oleh air irigasi masih perlu ditingkatkan;2. Konektivitas antar desa, kelurahan dan perkotaan masih perlu ditingkatkan;3. Penyusunan RDTR pada semua wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Perda RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 03 tahun 2020 masih perlu ditingkatkan;
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none">1. Penanganan kawasan permukiman yang belum optimal2. Cakupan Rumah Tangga dengan Air Bersih masih rendah3. Capaian cakupan Desa/Kelurahan dengan Sanitasi Layak masih rendah4. Capaian cakupan kualitas jalan lingkungan dalam kondisi baik masih rendah5. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal6. Masih terdapatnya permukiman dan lahan garapan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam baik yang merupakan bencana hydrometeorologi



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
	dan Perlindungan Masyarakat	<p>maupun bencana geologis</p> <p>2. Masih lemahnya kegiatan pencegahan untuk menghadapi bencana</p> <p>3. Keterlibatan unsur-unsur lain dalam penanggulangan bencana masih belum optimal</p> <p>4. Penyebaran informasi bencana masih</p> <p>5. Belum tersedianya gudang dan peralatan penanganan bencana</p> <p>6. Penanganan pasca bencana baik fisik maupun pemulihan dampak psikologis/trauma belum optimal</p>
6	Urusan Sosial	<p>1. Pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum optimal</p>
II. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	Urusan Tenaga Kerja	<p>1. Kuantitas dan kompetensi masyarakat yang mendapatkan keterampilan khusus sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan lapangan kerja didalam maupun diluar Kabupaten masih rendah</p> <p>2. Keinginan masyarakat untuk membuka lapangan usaha sendiri masih rendah, hal ini karena keterbatasan modal dan sarana penunjang usaha;</p> <p>3. Informasi lowongan kerja dari perusahaan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum terpublikasikan secara luas;</p> <p>4. Terbatasnya kewenangan kabupaten terkait pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dibidang ketenagakerjaan</p>



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none">1. Peran serta perempuan dalam pembangunan belum optimal2. Penanganan kasus perlindungan kekerasan pada anak belum optimal
3	Urusan Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan sebagian pangan strategis masih belum mencukupi dan sebagian cenderung menurun/melandai2. Kondisi ketahanan pangan masyarakat dibeberapa wilayah masih rawan3. Fluktuasi harga pangan masih cukup tinggi4. Terbatasnya distribusi produk pangan masyarakat5. Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan dalam mendukung peningkatan gizi serta pola pangan yang masyarakat masih belum memenuhi standar pangan beragam, bergizi seimbang dan aman6. Masih rendahnya sebagian cakupan gizi masyarakat7. Masih ditemui produk pangan yang berbahaya, dan terbatasnya informasi mengenai keamanan pangan segar asal tumbuhan di masyarakat.
4	Urusan Pertanahan	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat kerawanan konflik sosial yang terjadi di masyarakat masih tinggi khususnya sengketa lahan
5	Urusan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan persampahan di wilayah pesisir Tanjabtim belum maksimal2. Terjadinya Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang di kawasan ekosistem gambut3. Belum optimalnya upaya pengelolaan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
		<ol style="list-style-type: none">4. Tingginya Abrasi di wilayah pesisir5. Semakin maraknya pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara ilegal
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal2. Masih rendahnya warga yang berumur 0 - 17 Tahun yang memiliki KIA3. Cakupan kepemilikan KK dan Dokumen Kependudukan Lainnya khususnya Pendaftaran Penduduk baru dan pindah datang masih rendah
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Tata kelola pemerintah desa khususnya terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan desa belum optimal2. Tingkat keaktifan Bumdes yang semakin menurun3. Inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna di perdesaan serta pemanfaatannya masih terbatas
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none">1. Angka pemakaian Kontrasepsi modern masih rendah2. Angka kelahiran total (TFR) masih relatif tinggi3. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR) masih relatif tinggi4. Meningkatnya angka Unmet need (angka kebutuhan KB)5. Masih rendahnya pemanfaatan PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) sebagai pelayanan publik dalam bentuk pelayanan keluarga dalam komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), konseling, konseling, pembinaan serta rujukan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
9	Urusan Perhubungan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan jasa perhubungan2. Pengawasan dan penegakan hukum dibidang LLAJ belum optimal3. Angka kecelakaan darat dan air yang masih tinggi
10	Urusan Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan informasi publik terhadap masyarakat belum optimal
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none">1. Kesadaran pengelola dan anggota Koperasi untuk melakukan RAT setiap tahun masih rendah2. Kapasitas SDM pengelola Koperasi masih terbatas3. Kepatuhan Gerakan Koperasi terkait Perizinan masih rendah
12	Urusan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none">1. Rendahnya komitmen investor untuk menyampaikan LKPM secara berkala dan tepat waktu2. Pemetaan potensi wilayah3. Jangkauan pelayanan perizinan langsung dilapangan (mobile perizinan) belum optimal
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none">1. Sarana dan Prasarana Olahraga yang masih minim2. Kelompok Pemuda Usaha Produktif yang masih minim
14	Urusan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang sejarah2. Belum terdaftar dan ditetapkannya Objek diduga cagar budaya menjadi cagar budaya benda
15	Unsur Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih rendahnya minat baca masyarakat
16	Unsur Kearsipan	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya pengelolaan arsip OPD secara baku



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
III. URUSAN PILIHAN		
1.	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Peran Pengumpul/Tengkulak terhadap Nelayan masih mendominasi2. Jangkauan wilayah tangkapan (pompong kapasitas rendah) yang masih terbatas3. Sarana alat tangkap ramah lingkungan yang masih terbatas4. Pengolahan hasil tangkapan, untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing belum optimal5. Ketersediaan Es Balok untuk kebutuhan nelayan masih kurang6. Kesadaran nelayan untuk memanfaatkan sarana prasarana penunjang perikanan yang disediakan Pemerintah masih rendah.7. Sarana penyediaan BBM khusus nelayan masih terbatas8. SDM Penyuluh Perikanan masih terbatas9. Tingginya biaya produksi pakan10. Sulitnya jangkauan pemasaran pada masa panen11. Rendahnya kapasitas dan kemauan Pokdakkan untuk mandiri12. Mininya produk olahan perikanan budidaya yang bernilai tambah13. Rendahnya hasil jua produk di tingkat pembudidaya
2	Urusan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
		masih minim
3	Urusan Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Tingginya alih fungsi lahan2. Sebagian besar lahan yang hanya dapat di tanami 1 kali/Tahun3. Sarana dan Prasarana pertanian belum optimal4. Akses/Jalan distribusi hasil belum memadai untuk dilalui kendaraan roda 4 sampai ke lahan5. Kapasitas kelembagaan kelompok tani serta rendahnya kesedaran kelompok mapan untuk berusaha secara mandiri masih rendah6. Sarana prasarana pasca panen masih terbatas7. Jangkauan pemasaran dan promosi menggunakan media online hasil produksi belum tersedia8. Harga jual hasil produksi masih belum stabil dan cenderung situasional.
4	Urusan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none">1. Sarana dan prasana fasilitas yang dimiliki pasar masih kurang, seperti : jumlah lapak/kios, parkir, drainase, mushola, lampu penerangan2. Manajemen pengelolaan pasar yang masih rendah, seperti : terbatasnya SDM pengelola pasar, penenuhan operasional pengurus pasar, operasional masih bersifat mingguan, kebersihan area pasar dan penertiban alat ukur yang digunakan pedangan harus sesuai SNI
15	Urusan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none">1. Kualitas produk yang dihasilkan IKM masih belum dapat bersaing ditingkat regional2. Terbatasnya sarana produksi terpadu pemasaran



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
16	Urusan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya identifikasi lahan eks transmigrasi khususnya lahan fasum dan fasos dalam penertiban sesuai dengan peruntukannya2. Minimnya Database kawasan Ex. Transmigrasi
IV. URUSAN PENUNJANG		
1.	Urusan Administrasi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. Tata kelola kelembagaan, tata laksana serta akuntabilitas Kinerja yang belum optimal2. Belum adanya evaluasi dan penilaian terhadap Reformasi Birokrasi
2	Urusan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi melalui penguatan pengawasan dan pengendalian TIPIKOR dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan penyimpangan dalam pemyelenggaraan pemerintahan2. Belum optimalnya peningkatan kompetensi APIP seiring dengan kebutuhan pengawasan dan jumlah objek pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah SDM3. Belum optimalnya implementasi SPIP pada OPD4. Masih rendahnya level kapabilitas APIP5. Masih rendahnya penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan6. Belum optimalnya pengelolaan keuangan serta aset yang efektif, efisien dan akuntabel
3	Urusan Perencanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Kapasitas Pengampu Perencana di OPD dalam menyusun dan melaporkan dokumen perencanaan baik dari sisi perencanaan program maupun evaluasi



No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		<p>dan pelaporan masih belum optimal</p> <p>2. Sumberdaya manusia bidang perencanaan masih kurang terutama di OPD sehingga Perencanaan, maupun Evaluasi dan Pelaporan hanya ditangani oleh satu orang</p> <p>3. Pelaksanaan aplikasi SIPD dari kemendagri masih belum optimal</p>	
4	Urusan Keuangan	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal	
5	Urusan Kepegawaian	1. Jumlah ketersedian ASN yang belum memadai	2. Kompetensi yang belum kompetitif dan kurang disiplin ASN sehingga berpengaruh pada kinerja

3.1.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan pembangunan berdasarkan urusan penyelenggaran pemerintah daerah sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, maka tahap selanjutnya adalah merumuskan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rumusan permasalahan pembangunan ini merupakan salah satu pijakan dalam menentukan isu strategis pembangunan daerah. Pijakan lainnya dalam penentuan isu strategis daerah adalah isu strategis di tingkat regional, nasional dan internasional.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut

1. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah
2. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan
3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia
4. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5. Belum optimalnya keamanan dan ketertiban daerah

1.4. ISSU-ISSU STRATEGIS

Kondisi geoekonomi global dan regional saat ini dan ke depan akan merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia pada umumnya dan secara khusus terhadap Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam periode 2021-2026 ke depan. Beberapa hal terkait dengan kondisi ekonomi global dan regional tersebut memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah :

1) Fluktuasi harga komoditas minyak dunia.

Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka ekonomi makro Indonesia, harga komoditas seperti minyak dunia mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- a) Tingginya ekspor dari negara- negara anggota OPEC terlepas dari keputusan untuk memotong produksi,
- b) Tingginya persediaan (inventory) minyak mentah dunia,
- c) Terus meningkatnya jumlah pengeboran shale oil di AS,
- d) Meningkatnya produksi minyak dunia dari negara-negara Non OPEC dan
- e) Peningkatan produksi minyak di Libia menjadi faktor yang mendorong menurunnya harga minyak dunia.

Sebagaimana diketahui bahwa komoditas minyak dan gas merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Turunnya harga minyak dunia dan batubara dalam beberapa tahun terakhir mempengaruhi jumlah pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Turunnya pendapatan tersebut sangat mempengaruhi kemampuan fiskal daerah untuk mengalokasikan anggaran program/kegiatan pembangunan daerah. Terkait dengan hal tersebut, fluktuasi harga komoditas minyak dunia dalam beberapa tahun kedepan harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Langkah-langkah strategis untuk mulai menggeser ketergantungan sumber pendapatan daerah dari sektor migas harus segera dilakukan. Keterbatasan anggaran sebagai konsekuensi dari berkurangnya



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

pendapatan daerah akan mengurangi ruang fiskal Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanakan program pembangunan.

2) Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu MEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain: a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) Program Pembangunan MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g)



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC, h) pembentukan Komite Nasional AEC 2015, dan i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen bersama, yaitu Masyarakat ASEAN 2025 yang telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia melalui penandatanganan *The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community* dan *The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Political-Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC). Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Memasuki era MEA 2025, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat produksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun juga sekaligus sebagai produsen sehingga terbuka peluang bagi pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Bonus Demografi

Disela kemajuan zaman dengan segala plus minusnya bagi generasi muda, saat ini, Indonesia dianugerahi “Bonus Demografi” yang harus mendapat perhatian serius. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus tersebut di Tahun 2020-2030 dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Melimpahnya jumlah penduduk usia produktif tersebut akan menguntungkan dari sisi pembangunan dimana banyaknya penduduk yang bekerja maka akan memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bonus demografi tidak didapat secara otomatis, tetapi harus diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana.

Terkait dengan hal tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi. Penduduk usia produktif saat ini mendominasi total populasi penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja tersebut selain meningkatkan angkatan kerja dalam daerah juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi daerah lain bahkan negara lain yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun. Kondisi ini menjadi peluang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyiapkan kebijakan yang tepat bagi generasi mudanya untuk lebih mandiri, kreatif dan berjiwa wirausaha sehingga pada saatnya nanti generasi bonus demografi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4) **Sustainable Development Goals (SDGs)**

Pada tanggal 25-27 September 2015 telah terjadi pertemuan di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Serikat yang di dalamnya merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari kesepakatan dokumen tersebut yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2015 yang juga berlokasi di New York. Saat itu sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*" atau "*Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan*".

SDGs merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDGs (*Millenium Development Goals*), Tujuan Pembangunan Millenium, yang mulai dijalankan pada September 2000 dan berakhir di Tahun 2015. Adapun target MDGs adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015 yang merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium. Deklarasi ini diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut.

SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di Tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini.

Tujuan Global SDGs adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan

Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

2. Tanpa Kelaparan

Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

4. Pendidikan Berkualitas

Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

5. Kesetaraan Gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

6. Air Bersih dan Sanitasi



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

7. Energi Bersih dan Terjangkau

Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak

Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10. Mengurangi Kesenjangan

Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas

Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13. Aksi Terhadap Iklim



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. Kehidupan Bawah Laut

Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15. Kehidupan di Darat

Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian

Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Gambar IV.6.

Tujuan Sustainable Development Goals



Sumber : UNDP, 2015

Rekomendasi KLHS RPJMD diperoleh berdasarkan hasil pengkajian pencapaian indikator Tujuan Pembangunan berkelanjutan dan kondisi lingkungan daerah yang meliputi 6 muatan KLHS, kondisi keuangan dan kelembagaan daerah terhadap isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dalam Tabel IV.8 berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Tabel IV.8
Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Alih fungsi Lahan	1.4.1(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya istrik baik dari PLN dan bukan PLN.	• Kondisi capaian 90,99% (rumah tangga umum) • Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dominan berada pada level sedang dengan jumlah 81,36%, sedangkan pada level Sangat rendah sebesar 0,015% yang yang berada di Kecamatan Dendang dan Mendahara Ulu	1. Belum ada penetapan kawasan LP2B di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2. Masih banyak masyarakat melakukan alih fungsi lahan dari pertanian ke permukiman 3. Masih rendahnya pemahaman terhadap perlindungan dan pengelolaan lahan gambut 4. Masyarakat masih membuka lahan	1. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Program pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan 3. Program pembinaan jasa konstruksi 4. Program penataan ruang 5. Program penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 7. Program pendukung administrasi	a. Pemetaan penetapan kawasan LP2B b. penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan pengedalian kawasan hydrologis gambut (KHG) c. Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang
	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	• Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih dominan berada pada level			
	6.2.1.(b) Persentase rumah				



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Target Tujuan Pembangunan BerkelaJalan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
	tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	sedang dengan jumlah 86.44%, sedangkan pada level Sangat rendah sebesar 1.64% yang yang berada di hamper seluruh kecamatan.	perkebunan secara illegal dikarenakan belum adanya perda mengenai rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	perkantoran pemerintah daerah Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 8. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi situs, sungai, pantai dan sumber daya air lainnya. 9. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, tambak dan jaringan pengairan lainnya 10. Program pengendalian daya rusak air 11. Program pengelolaan kelembagaan, data dan sistem informasi sumber daya air 12. Program penyusunan 13. rencana, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Dinas Pekerjaan umum	



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Target Tujuan Pembangunan BerkelaJutan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
				<p>dan penataan ruang</p> <p>14. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang</p> <p>15. Program pendukung administrasi perkantoran pemerintah daerah Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang</p> <p>16. Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman</p> <p>17. Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>18. Program peningkatan sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman</p>	
Pekerjaan Umum dan Penataan	1.4.1 (k) Persentase rumah tangga miskin dan	• Kondisi capaian 90,99% (rumah)	5. Belum ada penetapan	19. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan	d. Pemetaan penetapan kawasan LP2B



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Target Tujuan Pembangunan BerkelaJalan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
Ruang/Alih fungsi Lahan	<p>rentan yang sumber penerangan utamanya istrik baik dari PLN dan bukan PLN.</p> <p>6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.</p> <p>6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.</p>	<p>tangga umum)</p> <ul style="list-style-type: none">• Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dominan berada pada level sedang dengan jumlah 81.36%, sedangkan pada level Sangat rendah sebesar 0.015% yang yang berada di Kecamatan Dendang dan Mendahara Ulu• Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih dominan berada pada level sedang dengan jumlah 86.44%, sedangkan pada level Sangat rendah sebesar 1.64% yang	<p>kawasan LP2B di Kabupaten Tanjung Jabung Timur</p> <p>6. Masih banyak masyarakat melakukan alih fungsi lahan dari pertanian ke permukiman</p> <p>7. Masih rendahnya pemahaman terhadap perlindungan dan pengelolaan lahan gambut</p> <p>8. Masyarakat masih membuka lahan perkebunan secara illegal dikarenakan belum adanya perda mengenai</p>	<p>dan jembatan</p> <p>20. Program pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan</p> <p>21. Program pembinaan jasa konstruksi</p> <p>22. Program penataan ruang</p> <p>23. Program penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang</p> <p>24. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang</p> <p>25. Program pendukung administrasi perkantoran pemerintah daerah Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang</p> <p>26. Program pengembangan,</p>	<p>e. penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan pengedalian kawasan hydrologis gambut (KHG)</p> <p>f. Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang</p>



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Target Tujuan Pembangunan BerkelaJutan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
		yang berada di hamper seluruh kecamatan.	rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	pengelolaan dan konservasi situ, sungai, pantai dan sumber daya air lainnya. 27. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, tambak dan jaringan pengairan lainnya 28. Program pengendalian daya rusak air 29. Program pengelolaan kelembagaan, data dan sistem informasi sumber daya air 30. Program penyusunan 31. rencana, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang 32. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Pekerjaan umum dan penataan	



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Target Tujuan Pembangunan BerkelaJutan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
				<p>ruang</p> <p>33. Program pendukung administrasi perkantoran pemerintah daerah Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang</p> <p>34. Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman</p> <p>35. Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>36. Program peningkatan sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman</p>	



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

1.5. ISU STRATEGIS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ditengah pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) yang melanda dunia saat ini, tentu berimplikasi luas biasa terhadap pembangunan yang dilaksanakan, perubahan secara masif terjadi mulai dari perekonomian, pembangunan, dan sosial budaya. Rumusan Isu Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur masih menjadi faktor penghambat dalam upaya mendorong pertumbuhan investasi daerah, mendorong tumbuhnya sektor pertanian serta pelayanan dasar guna peningkatan Sumber Daya Manusia;
2. Pertanian sebagai sektor yang menyerap lebih dari 60 persen tenaga kerja belum mampu berkontribusi lebih dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Tanjung Jabung Timur;
3. Perlunya optimalisasi hilirisasi sektor industri olahan khususnya dari sektor pertanian sebagai alat untuk upaya meningkatkan harga komoditi pertanian, sekaligus alat *multiplayer effect* pertumbuhan ekonomi;
4. Tingkat kemiskinan yang meskipun mengalami penurunan setiap tahunnya akan tetapi masih diatas rata-rata Provinsi Jambi;
5. Indek Pembangunan Manusia sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang masih dibawah rata-rata Provinsi Jambi sangat



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

berkolerasi terhadap daya saing masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan yang paling rendah di Provinsi Jambi yang artinya banyak angkatan kerja yang terserap akan tetapi kualitas dari tenaga kerja tersebut masih belum berdaya saing dengan tenaga kerja diluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Era digitalisasi sebagai peluang daerah untuk membangun sistem digital yang mendukung percepatan kemajuan daerah;
8. Terjadinya perlambatan pada penerimaan daerah khususnya dari sumber pendapatan asli daerah sehingga diperlukan strategi khusus baik intensifikasi maupun ekstensifikasi;
9. Terjadinya kerusakan tutupan hutan, ancaman bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan, serta abrasi pantai yang semakin besar;
10. Penyelenggaraan pelayanan publik yang mengacu kepada asas kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, kemampuan meningkatkan Inovasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta penyiapan portal pengelolaan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik.

1.6. MAKSUM DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 adalah untuk memberikan gambaran,



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

tentang pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sedangkan tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2016.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat merumuskan strategi pemecahan masalah, sehingga capaian kinerjanya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.7. LANDASAN PENYUSUNAN

1. Idiil : Pancasila;
2. Konstitusional : UUD 1945
3. Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- j. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026.
- k. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.8. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI TAHUN 2021

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2021 tersebut, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance plan*) tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini, akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

Ikhtisar eksekutif, menjelaskan secara ringkas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana tujuan dan sasaran tercapai, kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas kondisi umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kelambagaan, isu strategis dan permasalahan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

pembangunan, maksud dan tujuan penyusunan LKJIP, landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis atau RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2021-2026, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dan Penetapan Kinerja Tahun 2021. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang rencana strategis, visi-misi dan kebijakan umum serta rencana kinerja tahun 2021.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2021 termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja secara efisiensi.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Bab ini menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis atau RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2021-2026 dan Rencana Kinerja 2021. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang strategi dan arah kebijakan, visi-misi dan kebijakan umum serta rencana kinerja tahun 2021.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 26 Oktober 2021 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2021. Disamping itu RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menjadi



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), serta berfungsi sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan pembangunan selama 5 tahun dan tahunan.

RPJMD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting karena merupakan sarana bagi perwujudan Visi dan Misi serta Strategi Instansi Pemerintah.

Dengan perkataan lain, RPJMD yang disusun setidaknya mengandung Visi, Misi, Program, dan Kegiatan yang realistik dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. RPJMD merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam melakukan pengukuran, penilaian, evaluasi kinerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

RPJM setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) ke mana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dan misi dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan ‘bagaimana kita menuju ke sana’ dijawab dengan merumuskan kebijakan umum dan strategi pembangunan, serta menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2.1 VISI DAN MISI

1. Visi Daerah

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah ‘**Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)**’. Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MERAKYAT mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak ekslusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat.

EKONOMI MERAKYAT Mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan mengurangi kemiskinan rakyat.

2. Misi Daerah

Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencapai Visi Daerah adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan
2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis

3. Agenda Pembangunan

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan yang ingin dicapai melalui 4 (empat) misi diatas, maka perlu ditetapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi agenda prioritas, dengan 5 (Lima) **Agenda Pembangunan** yaitu :

1. Tanjung Jabung Timur Terkoneksi

Infrastruktur yang layak untuk menunjang sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, industri, pasar, destinasi agrowisata dan wisata bahari serta media informasi;

2. Tanjung Jabung Timur Sejahtera

Penguatan ketahanan ekonomi ditopang sektor Pertanian dan Perikanan;

3. Tanjung Jabung Timur Berdaya Saing

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada sektor pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk, serta ketenagakerjaan;

4. Tanjung Jabung Timur Ekonomi Maju

Peningkatan investasi daerah sektor industri dan penguatan simpul ekonomi daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

5. Tanjung Jabung Timur Aman, Nyaman dan Harmonis

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan penguatan kapasitas birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Pembangunan Daerah

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 meliputi 9 (sembilan) tujuan dan 31 (tiga puluh satu) sasaran. Adapun Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas;
4. Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing ;
5. Meningkatkan Nilai Investasi Daerah ;
6. Meningkatkan Daya Serap Tengah Kerja;
7. Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

8. Membangun Birokrasi yang Tangguh, Terampil dan Berintegritas; dan
9. Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis.

2. Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 31 (tiga puluh satu) sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
2. Peningkatan Produksi Perkebunan;
3. Peningkatan Populasi Hewan Ternak;
4. Peningkatan Produksi Hasil Perikanan;
5. Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan;
6. Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan;
7. Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan;
8. Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari
9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu);
10. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman;
11. Peningkatan Perbaikan Sanitasi Masyarakat;
12. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar;
13. Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah;
14. Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Angkatan Kerja;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

15. Peningkatan Pelaksanaan Studi Kerja/Magang;
16. Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah;
17. Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana;
18. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
19. Penyediaan Data dan Informasi Digital Potensi Investasi Daerah;
20. Fasilitasi Pendirian Pabrik;
21. Penyediaan Informasi Lapangan Kerja Berbasis Elektronik;
22. Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja;
23. Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan Berbasis Elektronik;
24. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
25. Pengendalian Tata Ruang;
26. Penataan Kelembagaan dan Organisasi;
27. Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
29. Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur;
30. Terciptanya Kohesi Sosial Masyarakat; dan
31. Peningkatan Rasa Aman Bagi Semua Lapisan Masyarakat.

2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah berisikan program indikatif guna mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Strategi



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

tersebut diperlukan untuk memperinci arah pengembangan program prioritas kepala daerah yang terpilih tersebut.

Strategi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun strategi yang dimaksud adalah:

1. Membangun/Rehab Tanggul dan Jaringan Irigasi Tanaman Pangan;
2. Meningkatkan Optimasi Lahan Sub Optimal;
3. Menyediakan Sarana Prasarana Produksi dan Sarana Pasca Panen;
4. Menyediakan Alsintan;
5. Mencegah dan Menanggulangi Hama Tanaman Pangan dan Hortikultura;
6. Membangun/Rehab Tanggul dan Jaringan Irigasi Perkebunan;
7. Mengoptimalkan Pengelolaan Perkebunan;
8. Menyediakan Sarana Prasarana Produksi dan Sarana Pasca Panen;
9. Meningkatkan Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hama Pekebunan Masyarakat;
10. Meningkatkan Populasi Ternak Besar dan Kecil;
11. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Serta Layanan Kesehatan Ternak Masyarakat;
12. Meningkatkan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

13. Meningkatkan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
14. Meningkatkan Pengawasan Usaha Perikanan;
15. Meningkatkan Kualitas Jalan Produksi Perkebunan, Pertanian dan Perikanan;
16. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Petani dan Nelayan;
17. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluhan;
18. Meningkatkan dan Optimalisasi Sarana dan Peralatan Penyuluhan;
19. Meningkatkan Kelembagaan IKM/UMKM dan Koperasi;
20. Meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku IKM/UMKM;
21. Mengembangkan Sarana Pasarana Pemasaran;
22. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat;
23. Meningkatkan Kepariwisataan Daerah Berbasis Potensi Agrowisata dan Wisata Bahari;
24. Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Faskes;
25. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang di Faskes;
26. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kesehatan;
27. Meningkatkan Kuantitas Tenaga Kesehatan;
28. Meningkatkan Penanganan Stunting;
29. Menyediakan Rumah Layak Huni;
30. Meningkatkan Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh;
31. Menyediakan Layanan Air Bersih;
32. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Pesampahan;
33. Meningkatkan Sanitasi Layak Bagi Masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

34. Meningkatkan Aksesibilitas Sekolah;
35. Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
36. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sekolah dengan Perbaikan Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Perpustakaan, Rumah Dinas, Sanitasi Sekolah Pendidikan Dasar;
37. Mencetak Santri Penghapal Al-Qur'an;
38. Meningkatkan Sarana Prasana dan Peralatan Balai Latihan Kerja Daerah;
39. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Kompetensi, Kualifikasi, Serta Daya Saing Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja;
40. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Instruktur;
41. Menyediakan Jaringan Penyedia Lapangan Kerja;
42. Meningkatkan Layanan Perijinan;
43. Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Wilayah Pertumbuhan Ekonomi;
44. Meningkatkan Intensifikasi Sumber PAD;
45. Meningkatkan Ektensifikasi Sumber PAD;
46. Menyediakan Media Informasi Potensi Investasi Daerah Berbasis Elektronik;
47. Menyiapkan Regulasi Aplikasi Informasi Potensi Investasi Daerah;
48. Menyiapkan Aksesibilitas Penunjang Operasional Pabrik;
49. Menjamin Keamanan dan Kenyamanan Berinvestasi;
50. Menjamin Keamanan dan Kenyamanan Berinvestasi;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

51. Menyediakan Media Informasi Lapangan Kerja Berbasis Elektronik;
52. Menyediakan Regulasi Aplikasi Informasi Lapangan Kerja;
53. Memfasilitasi Pelaku IKM/UMKM dengan Pelaku Jasa Keuangan;
54. Menyediakan Sarana Prasarana Peralatan Pengolahan IKM/UMKM;
55. Memberikan Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan;
56. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Secara Berkesinambungan;
57. Meningkatkan Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Penataan Ruang Kawasan Strategis Sesuai dengan RTRW Kabupaten;
58. Melakukan Penataan dan Penguatan Organisasi yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran;
59. Meningkatkan Kompetensi, Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja, dan Kesejahteraan ASN, Penataan ASN;
60. Meningkatkan Pengendalian Produk Hukum;
61. Mengembangkan Sistem Manajemen Pembangunan Berbasis Kinerja Melalui Penguatan Proses Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Secara Terpadu;
62. Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Perkuatan Kapabilitas APIP dan Perkuatan SPIP;
63. Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Direct Services), serta Membangun Pemerintahan Yang Terbuka (Open Government) dengan Perkuatan Keterbukaan Informasi Publik,



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Transparansi, Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, serta Meningkatkan Komunikasi dan Serapan Aspirasi Publik;

64. Meningkatkan Edukasi Tentang Keberagaman, dan Toleransi Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Sejak Usia Dini, Termasuk Kepada Anak-Anak Usia Sekolah, serta Didukung Upaya Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Pengampu Kepentingan Yang Berkaitan dengan Keberagaman dan Toleransi;
65. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum;
66. Meningkatkan Pencegahan Terhadap Bencana Alam dan Non Alam.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur difokuskan kepada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan turunan dari kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Penetapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih memprioritaskan pada sinergitas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jambi menjadi kebijakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengutamakan fungsi pelayanan umum.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2005 - 2025 juga menjadi acuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimasa yang akan datang. Untuk itu, dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih diarahkan pada :

1. Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang Mendukung Produksi Tanaman Pangan;
2. Meningkatkan, Penataan Sarana Pengairan/Jaringan Irigasi dan Jalan Usaha Tani;
3. Menyediakan Benih Unggul Padi, Jagung, Kedele/PAJALE;
4. Menyediakan Benih Tanaman Hortikultura (Semangka, Melon, Cabe dan Sayuran);
5. Menyediakan Bibit Tanaman Hortikultura (Nenas dan Buah Buahan);
6. Memfasilitasi dan Menyediakan Pupuk;
7. Menyediakan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan;
8. Menyediakan Sarana Pasca Panen Tanaman Hortikultura;
9. Menyediakan Alsintan (*Handtractor, Power Thresher, Combine Harvester, Handsprayer, Mesin Pemotong Rumput, Corn Seller, Cultivator*);
10. Menyediakan Excavator PC. 100 ;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

11. Menyediakan Herbisida, Pesticida dan Insektisida;
12. Memfasilitasi Perlindungan Usaha Tanaman Pangan melalui Jasa AUTP;
13. Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang Mendukung Produksi Perkebunan;
14. Meningkatkan Sarana Pengairan/Jaringan Irigasi, Tangkul dan Jalan Produksi;
15. Melakukan *Updating* Usaha Perkebunan Masyarakat (Komoditi Kelapa Dalam, Sawit);
16. Melakukan Fasilitasi dan Sertifikasi Usaha Perkebunan Sawit Masyarakat (Sertifikasi ISPO dan RSPO) dan Penerbitan STDBP;
17. Menyediakan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao;
18. Meningkatkan Pengawasan Peredaran Bibit Tanaman Perkebunan;
19. Mengoptimalkan Sarana Pembibitan;
20. Menyediakan Peralatan Pengolahan Hasil Perkebunan;
21. Menyediakan Obat-Obatan Hama;
22. Menyediakan Sarana Prasarana dan Peralatan Pemadam Kebakaran Lahan;
23. Memberikan Inseminasi Buatan (IB) pada Ternak Besar Masyarakat Khususnya Ternak Sapi;
24. Melakukan Fasilitasi Pemberian Ternak Kambing;
25. Menyediakan Ternak Unggas;
26. Menyediakan Peralatan Pengolahan Pakan Ternak;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

27. Menyediakan Obat Obatan;
28. Meningkatkan Pengawasan Distribusi Ternak;
29. Melakukan Fasilitasi Jasa Pelindungan Usaha Peternakan Masyarakat Melalui Asuransi Ternak Besar;
30. Menyediakan Benih dan Pakan Ikan;
31. Mengembangkan Budidaya Mina Padi;
32. Melakukan Pendataan Kolam/Tambak;
33. Optimalisasi Kolam Tambak Tidak Produktif;
34. Melakukan Fasilitasi dan Menyediakan Peralatan Pengolahan Pakan;
35. Melakukan Fasilitasi Pendirian Kawasan Kampung Budidaya Ikan Air Tawar (1 Kawasan);
36. Menyediakan Sarana Pasarana Pengembangan Kawasan Kampung Budidaya Ikan Air Tawar;
37. Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Kampung Budidaya Ikan Air Tawar;
38. Melakukan Fasilitasi Pengembangan Budidaya Tambak Udang;
39. Menyediakan Sarana Pasarana Pengembangan Budidaya Tambak Udang;
40. Optimalisasi Pengelolaan Pengembangan Budidaya Tambak Udang;
41. Menyediakan Alat Tangkap Ramah Lingkungan;
42. Meningkatkan Sarana Tempat Pelelangan Ikan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

43. Optimalisasi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
44. Melakukan Fasilitasi Jasa Perlindungan Kerja Nelayan melalui Asuransi Nelayan;
45. Meningkatkan Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan Tangkap;
46. Melakukan Fasilitasi Pengaduan dan Penyelesaian Pelanggaran Sektor Perikanan Tangkap (*Illegal Fishing*) dan Perikanan Budidaya;
47. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
48. Membangun Jalan dan Jembatan yang Menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan;
49. Melaksanakan Pelatihan Teknis Budidaya;
50. Melaksanakan Pelatihan Management Pengelolaan Kelompok;
51. Melaksanakan Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S);
52. Meningkatkan Pembinaan Kelompok;
53. Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM Penyuluhan;
54. Menyediakan Peralatan dan Pelengkapan Kerja Penyuluhan;
55. Meningkatkan Sarana dan Pelengkapan Kantor Satker Penyuluhan dan Puskeswan;
56. Meningkatkan Pengelolaan Demplot Penyuluhan;
57. Melakukan Fasilitasi Perizinan Usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal Produk IKM/UMKM;
58. Melakukan Fasilitasi Perizinan Usaha Perkoperasian;
59. Melakukan Penataan Perkoperasian;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

60. Melaksanakan Pelatihan Management Pengelolaan Usaha IKM/UMKM dan Perkoperasian;
61. Melaksanakan Pelatihan Keterampilan Pelaku IKM/UMKM;
62. Meningkatkan Sarana Prasarana Pasar;
63. Membangun Pasar Baru;
64. Meningkatkan Sarana dan Peralatan Sentra Batik;
65. Optimalisasi Pengelolaan Sentra Batik;
66. Mengembangkan Sentra IKM Olahan Makanan;
67. Menyediakan Aplikasi Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital;
68. Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital;
69. Meningkatkan Pelayanan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi, Keamanan dan Ketahanan Pangan;
70. Menyediakan Stok Cadangan Pangan Daerah;
71. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Ketahanan Pangan Daerah;
72. Melakukan Pemetaan Potensi Keparisataan Berbasis Agrowisata dan Wisata Bahari;
73. Mengembangkan dan Menyediakan Sarana Prasarana Penunjang;
74. Meningkatkan Pelatihan Kelembagaan dan Pengelolaan Kepariwisataan;
75. Menyediakan Sarana dan Aplikasi Promosi Potensi Wisata;
76. Optimalisasi Promosi Potensi Wisata;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

77. Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Faskes;
78. Melakukan Fasilitas Kesehatan yang Layak;
79. Meningkatkan Kualitas Nakes;
80. Meningkatkan Kuantitas Nakes;
81. Meningkatkan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi;
82. Melakukan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
83. Meningkatkan Pengendalian Penyakit;
84. Meningkatkan Program Germas;
85. Meningkatkan Kesehatan Lingkungan;
86. Melakukan Fasilitasi Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
87. Meningkatkan Jalan Lingkungan;
88. Membangun Drainase Permukiman;
89. Membangun Ruang Terbuka Hijau;
90. Mengoptimalkan Penyediaan Air Bersih melalui Sistem Pengelolaan dan Berbasis Masyarakat;
91. Mengoptimalkan Pelayanan Penanganan Persampahan;
92. Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S);
93. Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Sekolah;
94. Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Guru;
95. Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
96. Memberikan Bantuan Pelatihan Dan Keterampilan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

97. Mengembangkan Sarana Ruang Belajar BLK;
98. Memberikan Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja Berbasis Kompetensi;
99. Menyediakan Instruktur Tetap BLK;
100. Meningkatkan Koordinasi dan Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah dengan Penyedia Lapangan Kerja/Perusahaan;
101. Melakukan Fasilitasi Calon Tenaga Kerja Study Kerja di Luar Daerah maupun di Luar Negeri;
102. Meningkatkan Pelayanan Perizinan Secara Terpadu Mudah, Cepat, Tepat dan Akurat;
103. Meningkatkan Kualitas Jalan yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
104. Mengoptimalkan Pajak Daerah;
105. Mengoptimalkan Retribusi Daerah;
106. Mengoptimalkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
107. Mengoptimalkan Lain-Lain PAD yang Sah;
108. Mengoptimalkan Potensi Unit BUMD;
109. Melakukan *Updating* Pemetaan Potensi Investasi Daerah;
110. Menyediakan Aplikasi Sarana Promosi Berbasis Digital;
111. Mengoptimalkan Pemanfaatan Aplikasi Promosi Investasi;
112. Melakukan Fasilitasi Regulasi Aplikasi Informasi Potensi Investasi Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

113. Menyediakan Prasarana Dasar Penunjang Operasional Pabrik;
114. Meningkatkan Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Pelaku Usaha;
115. Melakukan Fasilitasi Regulasi Kemudahan Investasi;
116. Menyediakan Aplikasi Sarana Informasi Bursa Kerja Berbasis Digital;
117. Mengoptimalkan Pemanfaatan Aplikasi Bursa Kerja;
118. Melakukan Fasilitasi Regulasi Aplikasi Informasi Lapangan Kerja;
119. Melakukan Fasilitasi Perolehan Pemodal Usaha IKM/UMKM;
120. Memberikan Bantuan Peralatan Pengolahan;
121. Mengoptimalkan Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan;
122. Meningkatkan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan Indeks Kualitas Lingkungan;
123. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
124. Meningkatkan Perbaikan Kinerja Organisasi;
125. Melaksanakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (SOTK) yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran;
126. Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN;
127. Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui Penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja;
128. Meningkatkan Evaluasi Terhadap Produk Hukum Daerah yang Bertentangan Atau Tidak Sesuai dengan Produk Hukum yang Lebih Tinggi;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

129. Melaksanakan Evaluasi Atas Efektifitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Harmonisasi Peraturan;
130. Mengoptimalkan Sistem Aplikasi dalam Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, Pendapatan, Aset, Data dan Informasi Pembangunan serta Kinerja;
131. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja;
132. Meningkatkan Maturitas SPIP;
133. Meningkatkan Kapabilitas Internal Audit;
134. Meningkatkan Tindaklanjut Temuan;
135. Menyiapkan Rencana Aksi Pecapaian Target SPM;
136. Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima;
137. Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik;
138. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan;
139. Menggerakkan Unit Kerja dalam Melakukan Perubahan dengan Membentuk Agen Perubahan;
140. Meningkatkan Budaya Integritas dan Budaya Kinerja Aparatur;
141. Memetakan Potensi Konflik dan Pemantauan serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi Dimasyarakat;
142. Memberikan Pendidikan Tentang Keberagaman, dan Toleransi Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Sejak Usia Dini;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

143. Meningkatkan Koordinasi dengan Berbagai Pihak Dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Pencegahan Tindak Kriminal;
144. Meningkatkan Penegakan Peraturan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat;
145. Meningkatkan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
146. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
147. Meningkatkan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
148. Mengoptimalkan Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Pandemi Covid-19;
149. Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun visi, misi, sasaran dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 disajikan pada Tabel 2.1. dan arah kebijakan pembangunan daerah dimuat pada Tabel 2.2.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Tabel 2.1

Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
MISI 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan		
1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1 Pembangunan/Rehab Tanggul dan Jaringan Irigasi Tanaman Pangan
		2 Meningkatkan Optimasi Lahan Sub Optimal
		3 Menyediakan sarana prasarana produksi dan sarana pasca panen
		4 Menyediakan Alsintan
		5 Mencegah dan menanggulangi hama tanaman pangan dan Hortikultura
	2 Peningkatan Produksi Perkebunan	6 Membangun/Rehab Tanggul dan Jaringan Irigasi Perkebunan
		7 Mengoptimalkan pengelolaan perkebunan
		8 Menyediakan sarana prasarana produksi dan sarana pasca panen
		9 Meningkatkan penagulangan dan pencegahan kebakaran lahan dan hama pekebunan masyarakat
	3 Peningkatan Populasi Hewan Ternak	10 Meningkatkan populasi ternak Besar dan Kecil
		11 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian distribusi serta layanan kesehatan ternak masyarakat
	4 Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	12 Meningkatkan sarana prasarana perikanan budidaya
		13 Meningkatkan sarana prasarana perikanan tangkap
		14 Meningkatkan pengawasan usaha perikanan
	5 Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan	15 Meningkatkan Kualitas Jalan Produksi Perkebunan, Pertanian dan Perikanan
	6 Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan	16 Meningkatkan kapasitas Kelembagaan petani dan nelayan
		17 Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluhan
		18 Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan peralatan penyuluhan
	7 Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan	19 Meningkatkan kelembagaan IKM/UMKM dan Koperasi
		20 Meningkatkan kapasitas SDM pelaku IKM/UMKM
		21 Mengembangkan sarana pasaran pemasaran
		22 Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat
	8 Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari	23 Meningkatkan kepariwisataan daerah berbasis potensi Agrowisata dan wisata bahari



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
MISI 2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing			
1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani	1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Faskes dan RSU	24	Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Faskes
		25	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang di Faskes
		26	Mengoptimalkan Kualitas Tenaga Kesehatan
		27	Meningkatkan Kuantitas Tenaga Kesehatan
		28	Meningkatkan Penanganan Stunting
	2 Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	29	Menyediakan rumah layak huni
		30	Meningkatkan Penanganan lingkungan Permukiman Kumuh
		31	Menyediakan layanan air bersih
		32	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pesampahan
	3 Perbaikan Sanitasi Masyarakat	33	Meningkatkan Sanitasi Layak Bagi Masyarakat
2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Beradab	1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	34	Meningkatkan Aksesibilitas Sekolah
		35	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		36	Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah dengan perbaikan ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan, rumah dinas, sanitasi sekolah pendidikan dasar
	2 Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah	37	Mencetak Santri penghapal Al-Qur'an
3 Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	1 Peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja	38	Meningkatkan sarana prasana dan peralatan balai latihan kerja daerah
		39	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi, kualifikasi, serta daya saing sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
		40	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Instruktur
	2 Peningkatan Pelaksanaan studi kerja/ magang	41	Menyediakan jaringan penyedia lapangan kerja



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
MISI 3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari				
1 Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	1	Peningkatan Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	42	Meningkatkan layanan perijinan
	2	Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana	43	Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Wilayah Pertumbuhan Ekonomi
	3 Peningkatan PAD		44	Meningkatkan Intensifikasi Sumber PAD
			45	Meningkatkan Ektensifikasi Sumber PAD
	4 Penyediaan data dan Informasi digital potensi investasi daerah		46	Menyediakan media informasi potensi investasi daerah berbasis elektronik
			47	Menyiapkan Regulasi aplikasi informasi potensi investasi daerah
2 Meningkatkan Daya Serap Tengah Kerja	1 Fasilitasi Pendirian Pabrik		48	Menyiapkan aksesibilitas penunjang operasional pabrik
			49	Menjamin keamanan dan kenyamanan berinvestasi
			50	Menjamin kepastian hukum peluang investasi
	2 Penyediaan Informasi Lapangan Kerja berbasis Elektronik		51	Menyediakan media informasi lapangan kerja berbasis elektronik
			52	Menyiapkan Regulasi aplikasi informasi lapangan kerja
	3 Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja		53	Memfasilitasi pelaku IKM/UMKM dengan pelaku Jasa Keuangan
			54	Menyediakan sarana prasarana peralatan pengolahan IKM/UMKM
	4 Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan berbasis elektronik		55	Memberikan Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan
3 Menjamin Keberlangsungan Pembangunan	1 Pengelolaan Lingkungan Hidup		56	Meningkatkan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan
	2 Pengendalian Tata Ruang		57	Meningkatkan Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Penataan Ruang Kawasan Strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis				
1 Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas	1	Penataan Kelembagaan dan Organisasi	58	Melakukan Penataan dan penguatan Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
	2 Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan		59	Meningkatkan kompetensi, pengembangan sistem penilaian kinerja, dan kesejahteraan ASN, penataan ASN
			60	Meningkatkan Pengendalian produk hukum
	3 Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		61	Meningkatkan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			62	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP
	4	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	63	Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat (direct services), serta membangun pemerintahan yang terbuka (open government) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik
2 Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis	1	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	64	Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman dan toleransi.
	2 Peningkatan rasa aman bagi semua lapisan masyarakat		65	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum
			66	Meningkatkan Pencegahan terhadap Bencana alam dan non alam



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Tabel VI.2.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Tanaman Pangan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Tanaman Pangan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Tanaman Pangan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Tanaman Pangan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Tanaman Pangan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Tanaman Pangan
Melakukan penataan sarana pengairan/jaringan irigasi dan jalan usaha tani	Melakukan penataan sarana pengairan/jaringan irigasi dan jalan usaha tani	Melakukan penataan sarana pengairan/jaringan irigasi dan jalan usaha tani	Melakukan penataan sarana pengairan/jaringan irigasi dan jalan usaha tani	Melakukan penataan sarana pengairan/jaringan irigasi dan jalan usaha tani	Melakukan penataan sarana pengairan/jaringan irigasi dan jalan usaha tani
Menyediakan benih unggul Padi, Jagung, Kedele/PAJALE					
Menyediakan benih tanaman hortikultura (semangka, melon, Cabe dan Sayuran)	Menyediakan benih tanaman hortikultura (semangka, melon, Cabe dan Sayuran)	Menyediakan benih tanaman hortikultura (semangka, melon, Cabe dan Sayuran)	Menyediakan benih tanaman hortikultura (semangka, melon, Cabe dan Sayuran)	Menyediakan benih tanaman hortikultura (semangka, melon, Cabe dan Sayuran)	Menyediakan benih tanaman hortikultura (semangka, melon, Cabe dan Sayuran)
Menyediakan bibit tanaman hortikultura (Nenas dan buah buahan)	Menyediakan bibit tanaman hortikultura (Nenas dan buah buahan)	Menyediakan bibit tanaman hortikultura (Nenas dan buah buahan)	Menyediakan bibit tanaman hortikultura (Nenas dan buah buahan)	Menyediakan bibit tanaman hortikultura (Nenas dan buah buahan)	Menyediakan bibit tanaman hortikultura (Nenas dan buah buahan)
Memfasilitasi dan Menyediakan Pupuk					



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menyediakan sarana pasca panen tanaman pangan					
Menyediakan sarana pasca panen tanaman hortikultura					
Menyediakan Alsintan : (Handtraktor, Power thereser, Kombain harvester, Handsprayer, mesin pemotong rumput, corn seller, cultivator)	Menyediakan Alsintan : (Handtraktor, Power thereser, Kombain harvester, Handsprayer, mesin pemotong rumput, corn seller, cultivator)	Menyediakan Alsintan : (Handtraktor, Power thereser, Kombain harvester, Handsprayer, mesin pemotong rumput, corn seller, cultivator)	Menyediakan Alsintan : (Handtraktor, Power thereser, Kombain harvester, Handsprayer, mesin pemotong rumput, corn seller, cultivator)	Menyediakan Alsintan : (Handtraktor, Power thereser, Kombain harvester, Handsprayer, mesin pemotong rumput, corn seller, cultivator)	Menyediakan Alsintan : (Handtraktor, Power thereser, Kombain harvester, Handsprayer, mesin pemotong rumput, corn seller, cultivator)
		Mengadakan Excavator PC. 100 (1 unit)		Mengadakan Excavator PC. 100 (1 unit)	



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Menyediakan Herbisida, pestisida dan Insektisida	Menyediakan Herbisida, pestisida dan Insektisida	Menyediakan Herbisida, pestisida dan Insektisida	Menyediakan Herbisida, pestisida dan Insektisida	Menyediakan Herbisida, pestisida dan Insektisida
	Memfasilitasi perlindungan usaha tanaman pangan melalui jasa AUTP	Memfasilitasi perlindungan usaha tanaman pangan melalui jasa AUTP	Memfasilitasi perlindungan usaha tanaman pangan melalui jasa AUTP	Memfasilitasi perlindungan usaha tanaman pangan melalui jasa AUTP	Memfasilitasi perlindungan usaha tanaman pangan melalui jasa AUTP
Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan
Meningkatkan sarana pengairan/jaringan irigasi, tanggul dan jalan produksi	Meningkatkan sarana pengairan/jaringan irigasi, tanggul dan jalan produksi	Meningkatkan sarana pengairan/jaringan irigasi, tanggul dan jalan produksi	Meningkatkan sarana pengairan/jaringan irigasi, tanggul dan jalan produksi	Meningkatkan sarana pengairan/jaringan irigasi, tanggul dan jalan produksi	Meningkatkan sarana pengairan/jaringan irigasi, tanggul dan jalan produksi
	Melakukan Updating usaha pekebunan masyarakat (komoditi kelapa dalam, sawit)	Melakukan Updating usaha pekebunan masyarakat (komoditi kelapa dalam, sawit)			
			Memfasilitasi dan sertifikasi usaha perkebunan sawit masyarakat (sertifikasi ISPO dan RSPO) dan penerbitan STDBP	Memfasilitasi dan sertifikasi usaha perkebunan sawit masyarakat (sertifikasi ISPO dan RSPO) dan penerbitan STDBP	Memfasilitasi dan sertifikasi usaha perkebunan sawit masyarakat (sertifikasi ISPO dan RSPO) dan penerbitan STDBP



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao
Meningkatkan pengawasan peredaran bibit tanaman pekebunan					
Mengoptimalkan sarana pembibitan					
Menyediakan peralatan pengolahan hasil perkebunan					
Menyediakan obat-obatan hama					
		Menyediakan sarana prasarana dan peralatan pemadam kebakaran lahan		Menyediakan sarana prasarana dan peralatan pemadam kebakaran lahan	
Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Besar masyarakat khususnya ternak Sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Besar masyarakat khususnya ternak Sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Besar masyarakat khususnya ternak Sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Besar masyarakat khususnya ternak Sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Besar masyarakat khususnya ternak Sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Besar masyarakat khususnya ternak Sapi



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Memfasilitasi penyediaan ternak Kambing				
Menyediakan ternak Unggas					
			Menyediakan peralatan pengolahan pakan ternak		Menyediakan peralatan pengolahan pakan ternak
Menyediakan obat obatan					
Meningkatkan pengawasan distribusi ternak					
Melakukan pelindungan usaha peternakan masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan pelindungan usaha peternakan masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan pelindungan usaha peternakan masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan pelindungan usaha peternakan masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan pelindungan usaha peternakan masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan pelindungan usaha peternakan masyarakat melalui asuransi ternak besar
Menyediakan benih dan pakan Ikan					
Mengembangkan budidaya Mina Padi					
		Melakukan Pendataan kolam/tambak	Optimalisasi Kolam tambak tidak produktif		Optimalisasi Kolam tambak tidak produktif



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Melakukan Fasilitasi dan penyediaan peralatan pengolahan pakan		Melakukan Fasilitasi dan penyediaan peralatan pengolahan pakan
	Melakukan Fasilitasi Pendirian kawasan kampung Budidaya Ikan air tawar (1 kawasan)	Menyediakan sarana pasarana pengembangan kawasan kampung Budidaya ikan air tawar	Optimalisasi pengelolaan kawasan kampung Budidaya ikan air tawar	Optimalisasi pengelolaan kawasan kampung Budidaya ikan air tawar	Optimalisasi pengelolaan kawasan kampung Budidaya ikan air tawar
		Melakukan fasilitasi pengembangan budidaya tambak udang	Menyediakan sarana pasarana pengembangan budidaya tambak udang	Optimalisasi pengelolaan pengembangan budidaya tambak udang	Optimalisasi pengelolaan pengembangan budidaya tambak udang
Menyediakan alat tangkap ramah lingkungan	Menyediakan alat tangkap ramah lingkungan	Menyediakan alat tangkap ramah lingkungan	Menyediakan alat tangkap ramah lingkungan	Menyediakan alat tangkap ramah lingkungan	Menyediakan alat tangkap ramah lingkungan
		Meningkatkan sarana tempat pelelangan Ikan	Optimalisasi pengelolaan tempat pelelangan Ikan	Optimalisasi pengelolaan tempat pelelangan Ikan	Optimalisasi pengelolaan tempat pelelangan Ikan
Melakukan fasilitasi jasa perlindungan kerja nelayan malalui Asuransi Nelayan	Melakukan fasilitasi jasa perlindungan kerja nelayan malalui Asuransi Nelayan	Melakukan fasilitasi jasa perlindungan kerja nelayan malalui Asuransi Nelayan	Melakukan fasilitasi jasa perlindungan kerja nelayan malalui Asuransi Nelayan	Melakukan fasilitasi jasa perlindungan kerja nelayan malalui Asuransi Nelayan	Melakukan fasilitasi jasa perlindungan kerja nelayan malalui Asuransi Nelayan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pengawasan distribusi hasil perikanan tangkap					
Melakukan fasilitasi pengaduan dan penyelesaian pelanggaran sektor perikanan tangkap (illegal fishing) dan perikanan budidaya	Melakukan fasilitasi pengaduan dan penyelesaian pelanggaran sektor perikanan tangkap (illegal fishing) dan perikanan budidaya	Melakukan fasilitasi pengaduan dan penyelesaian pelanggaran sektor perikanan tangkap (illegal fishing) dan perikanan budidaya	Melakukan fasilitasi pengaduan dan penyelesaian pelanggaran sektor perikanan tangkap (illegal fishing) dan perikanan budidaya	Melakukan fasilitasi pengaduan dan penyelesaian pelanggaran sektor perikanan tangkap (illegal fishing) dan perikanan budidaya	Melakukan fasilitasi pengaduan dan penyelesaian pelanggaran sektor perikanan tangkap (illegal fishing) dan perikanan budidaya
Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya
Membangun Jalan dan Jembatan yang menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan	Membangun Jalan dan Jembatan yang menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan	Membangun Jalan dan Jembatan yang menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan	Membangun Jalan dan Jembatan yang menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan	Membangun Jalan dan Jembatan yang menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan	Membangun Jalan dan Jembatan yang menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan
Melaksanakan Pelatihan teknis budidaya					
Melaksanakan Pelatihan menagement pengelolaan kelompok					



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Melaksanakan Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S)					
Meningkatkan pembinaan kelompok					
Melakukan Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Penyuluhan					
		Menyediakan peralatan dan pelengkapan kerja		Menyediakan peralatan dan pelengkapan kerja	
Meningkatkan sarana dan pelengkapan kantor Satker Penyuluhan dan Puskeswan	Meningkatkan sarana dan pelengkapan kantor Satker Penyuluhan dan Puskeswan	Meningkatkan sarana dan pelengkapan kantor Satker Penyuluhan dan Puskeswan	Meningkatkan sarana dan pelengkapan kantor Satker Penyuluhan dan Puskeswan	Meningkatkan sarana dan pelengkapan kantor Satker Penyuluhan dan Puskeswan	Meningkatkan sarana dan pelengkapan kantor Satker Penyuluhan dan Puskeswan
Meningkatkan pengelolaan Demplot Penyuluhan					
Melakukan fasilitasi perizinan usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal produk IKM/UMKM	Melakukan fasilitasi perizinan usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal produk IKM/UMKM	Melakukan fasilitasi perizinan usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal produk IKM/UMKM	Melakukan fasilitasi perizinan usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal produk IKM/UMKM	Melakukan fasilitasi perizinan usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal produk IKM/UMKM	Melakukan fasilitasi perizinan usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal produk IKM/UMKM



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Melakukan fasilitasi perizinan usaha perkoperasian	Melakukan fasilitasi perizinan usaha perkoperasian	Melakukan fasilitasi perizinan usaha perkoperasian	Melakukan fasilitasi perizinan usaha perkoperasian	Melakukan fasilitasi perizinan usaha perkoperasian	Melakukan fasilitasi perizinan usaha perkoperasian
Melakukan Penataan perkoperasian	Melakukan Penataan perkoperasian	Melakukan Penataan perkoperasian	Melakukan Penataan perkoperasian	Melakukan Penataan perkoperasian	Melakukan Penataan perkoperasian
Melakukan Pelatihan menagement pengelolaan usaha IKM/UMKM dan perkoperasian	Melakukan Pelatihan menagement pengelolaan usaha IKM/UMKM dan perkoperasian	Melakukan Pelatihan menagement pengelolaan usaha IKM/UMKM dan perkoperasian	Melakukan Pelatihan menagement pengelolaan usaha IKM/UMKM dan perkoperasian	Melakukan Pelatihan menagement pengelolaan usaha IKM/UMKM dan perkoperasian	Melakukan Pelatihan menagement pengelolaan usaha IKM/UMKM dan perkoperasian
Melakukan Pelatihan keterampilan pelaku IKM/UMKM	Melakukan Pelatihan keterampilan pelaku IKM/UMKM	Melakukan Pelatihan keterampilan pelaku IKM/UMKM	Melakukan Pelatihan keterampilan pelaku IKM/UMKM	Melakukan Pelatihan keterampilan pelaku IKM/UMKM	Melakukan Pelatihan keterampilan pelaku IKM/UMKM
Meningkatkan sarana prasarana pasar	Meningkatkan sarana prasarana pasar	Meningkatkan sarana prasarana pasar	Meningkatkan sarana prasarana pasar	Meningkatkan sarana prasarana pasar	Meningkatkan sarana prasarana pasar
			Membangun Pasar baru	Membangun Pasar baru	Membangun Pasar baru
Meningkatkan sarana dan peralatan sentra Batik	Optimalisasi pengelolaan Sentra Batik	Optimalisasi pengelolaan Sentra Batik	Optimalisasi pengelolaan Sentra Batik	Optimalisasi pengelolaan Sentra Batik	Optimalisasi pengelolaan Sentra Batik
		Mengembangkan sentra IKM Olahan Makanan		Mengembangkan sentra IKM Olahan Makanan	
		Menyediakan aplikasi promosi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan berbasis Digital	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi promosi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan berbasis Digital	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi promosi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan berbasis Digital	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi promosi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan berbasis Digital



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pelayanan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan ketahanan pangan.	Meningkatkan Pelayanan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan ketahanan pangan.	Meningkatkan Pelayanan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan ketahanan pangan.	Meningkatkan Pelayanan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan ketahanan pangan.	Meningkatkan Pelayanan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan ketahanan pangan.	Meningkatkan Pelayanan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan ketahanan pangan.
Menyediakan stok cadangan pangan daerah					
Meningkatkan koordinasi lintas sektor ketahanan pangan daerah					
	Melakukan Pemetaan potensi kepariwisataan berbasis agrowisata dan wisata bahari	Mengembangkan dan menyediakan sarana prasarana penunjang			
Meningkatkan Pelatihan kelembagaan dan pengelolaan kepariwisataan					
	Menyediakan sarana dan aplikasi promosi potensi wisata	Optimalisasi promosi potensi wisata	Optimalisasi promosi potensi wisata	Optimalisasi promosi potensi wisata	Optimalisasi promosi potensi wisata
Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Faskes					
Melakukan Fasilitas kesehatan yang layak					



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas Nakes					
Meningkatkan kuantitas nakes					
Meningkatkan kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi	Meningkatkan kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi	Meningkatkan kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi	Meningkatkan kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi	Meningkatkan kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi	Meningkatkan kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi
Melakukan Percepatan Perbaikan gizi masyarakat					
Meningkatkan Pengendalian Penyakit					
Meningkatkan Program Germas					
Meningkatkan Kesehatan Lingkungan					
Melakukan Fasilitasi Perbaikan Rumah MBR					
Meningkatkan Jalan Lingkungan					
Melakukan Pembangunan drainase permukiman					



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Membangun Ruang Terbuka Hijau					
Mengoptimalkan Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Mengoptimalkan Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Mengoptimalkan Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Mengoptimalkan Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Mengoptimalkan Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Mengoptimalkan Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat
Mengoptimalkan pelayanan penanganan persampahan	Optimalisasi pelayanan penanganan persampahan	Optimalisasi pelayanan penanganan persampahan	Optimalisasi pelayanan penanganan persampahan	Optimalisasi pelayanan penanganan persampahan	Optimalisasi pelayanan penanganan persampahan
Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Sekolah					
Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru					



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar
Memberikan bantuan Pelatihan dan Keterampilan	Memberikan bantuan Pelatihan dan Keterampilan	Memberikan bantuan Pelatihan dan Keterampilan	Memberikan bantuan Pelatihan dan Keterampilan	Memberikan bantuan Pelatihan dan Keterampilan	Memberikan bantuan Pelatihan dan Keterampilan
		Mengembangkan sarana ruang belajar BLK	Meningkatkan peralatan pratikum BLK	Mengembangkan sarana ruang Pratikum BLK	Meningkatkan peralatan pratikum BLK
Melaksanakan Pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi	Melaksanakan Pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi	Melaksanakan Pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi	Melaksanakan Pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi	Melaksanakan Pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi	Melaksanakan Pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi
		Menyediakan Instruktur tetap BLK		Menyediakan Instruktur tetap BLK	
	Meningkatkan koordinasi dan Peningkatan kerjasama antara Pemerintah dengan penyedia lapangan kerja/perusahaan	Meningkatkan koordinasi dan Peningkatan kerjasama antara Pemerintah dengan penyedia lapangan kerja/perusahaan	Meningkatkan koordinasi dan Peningkatan kerjasama antara Pemerintah dengan penyedia lapangan kerja/perusahaan	Meningkatkan koordinasi dan Peningkatan kerjasama antara Pemerintah dengan penyedia lapangan kerja/perusahaan	Meningkatkan koordinasi dan Peningkatan kerjasama antara Pemerintah dengan penyedia lapangan kerja/perusahaan
		Melakukan Fasilitasi calon tenaga kerja study kerja di luar Daerah maupun di luar Negeri	Melakukan Fasilitasi calon tenaga kerja study kerja di luar Daerah maupun di luar Negeri	Melakukan Fasilitasi calon tenaga kerja study kerja di luar Daerah maupun di luar Negeri	Melakukan Fasilitasi calon tenaga kerja study kerja di luar Daerah maupun di luar Negeri



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pelayanan peizinan secara terpadu mudah, cepat, tepat dan akurat	Meningkatkan pelayanan peizinan secara terpadu mudah, cepat, tepat dan akurat	Meningkatkan pelayanan peizinan secara terpadu mudah, cepat, tepat dan akurat	Meningkatkan pelayanan peizinan secara terpadu mudah, cepat, tepat dan akurat	Meningkatkan pelayanan peizinan secara terpadu mudah, cepat, tepat dan akurat	Meningkatkan pelayanan peizinan secara terpadu mudah, cepat, tepat dan akurat
Meningkatkan Kualitas Jalan Yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi					
Mengoptimalkan Pajak Daerah					
Mengoptimalkan Retribusi Daerah					
Mengoptimalkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Mengoptimalkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Mengoptimalkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Mengoptimalkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Mengoptimalkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Mengoptimalkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Mengoptimalkan Lain-lain PAD yang Sah					
			Mengoptimalkan potensi unit BUMD	Mengoptimalkan potensi unit BUMD	Mengoptimalkan potensi unit BUMD



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Melakukan Upadating pemetaan potensi investasi daerah	Menyediakan aplikasi sarana promosi berbasis digital	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi promosi investasi	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi promosi investasi	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi promosi investasi
		Melakukan Fasilitasi regulasi aplikasi Informasi potensi investasi daerah			
		Menyediakan prasarana dasar penunjang operasional pabrik	Menyediakan prasarana dasar penunjang operasional pabrik	Menyediakan prasarana dasar penunjang operasional pabrik	Menyediakan prasarana dasar penunjang operasional pabrik
	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelaku usaha	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelaku usaha	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelaku usaha	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelaku usaha	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelaku usaha
	Melakukan Fasilitasi regulasi kemudahan investasi				
		Menyediakan aplikasi sarana informasi bursa kerja berbasis digital	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi bursa kerja	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi bursa kerja	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi bursa kerja
		Melakukan Fasilitasi regulasi aplikasi Informasi Lapangan kerja			
Melakukan Fasilitasi perolehan Pemodaluan usaha IKM/UMKM	Melakukan Fasilitasi perolehan Pemodaluan usaha IKM/UMKM	Melakukan Fasilitasi perolehan Pemodaluan usaha IKM/UMKM	Melakukan Fasilitasi perolehan Pemodaluan usaha IKM/UMKM	Melakukan Fasilitasi perolehan Pemodaluan usaha IKM/UMKM	Melakukan Fasilitasi perolehan Pemodaluan usaha IKM/UMKM



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Memberikan Bantuan peralatan pengolahan	Memberikan Bantuan peralatan pengolahan	Memberikan Bantuan peralatan pengolahan	Memberikan Bantuan peralatan pengolahan	Memberikan Bantuan peralatan pengolahan	Memberikan Bantuan peralatan pengolahan
		Mengoptimalkan Pelayanan administrasi ketenagakerjaan			
Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan indeks kualitas lingkungan	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan indeks kualitas lingkungan	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan indeks kualitas lingkungan	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan indeks kualitas lingkungan	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan indeks kualitas lingkungan	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan indeks kualitas lingkungan
Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi	Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi	Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi	Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi	Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi	Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi
Melaksanakan Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Melaksanakan Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi dan tepat ukuran				
Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN	Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN	Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN	Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN	Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN	Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja	Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja	Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja	Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja	Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja	Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja
Meningkatkan Evaluasi terhadap Produk hukum daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi	Meningkatkan Evaluasi terhadap Produk hukum daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi	Meningkatkan Evaluasi terhadap Produk hukum daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi	Meningkatkan Evaluasi terhadap Produk hukum daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi	Meningkatkan Evaluasi terhadap Produk hukum daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi	Meningkatkan Evaluasi terhadap Produk hukum daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi
Melaksanakan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan	Meningkatkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan	Meningkatkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan	Meningkatkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan	Meningkatkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan	Meningkatkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan
Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja					
Meningkatkan Maturitas SPIP					



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kapabilitas internal audit;					
Meningkatkan Tindaklanjut Temuan					
Menyiapkan Rencana Aksi Pecapaian target SPM					
Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima					
Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik					
Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan
Menggerakkan Unit kerja dalam melakukan perubahan dengan membentuk agen perubahan	Menggerakkan Unit kerja dalam melakukan perubahan dengan membentuk agen perubahan	Menggerakkan Unit kerja dalam melakukan perubahan dengan membentuk agen perubahan	Menggerakkan Unit kerja dalam melakukan perubahan dengan membentuk agen perubahan	Menggerakkan Unit kerja dalam melakukan perubahan dengan membentuk agen perubahan	Menggerakkan Unit kerja dalam melakukan perubahan dengan membentuk agen perubahan
Meningkatkan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur					
Melakukan Pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;	Melakukan Pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;	Melakukan Pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;	Melakukan Pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;	Melakukan Pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;	Melakukan Pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2.4 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mengimplementasikan misi daerah maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Tahun 2021 - 2026 akan melaksanakan program berdasarkan urusan wajib dan pilihan seperti berikut ini :

- I. Untuk mewujudkan misi pertama, yaitu **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:
 - a) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui program antara lain :
 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air ;
 2. Program Penyelenggaraan Jalan;
 - b) Urusan Pertanian, melalui program antara lain :
 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 2. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 4. Program Penyuluhan Pertanian.
 - c) Urusan Pangan, melalui program antara lain :
 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
- d) Urusan Perikanan, melalui program antara lain :
1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 4. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- e) Urusan Industri, melalui Program antara lain :
1. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
 2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- f) Urusan Koperasi dan UMKM, melalui Program antara lain :
1. Program Pemberdayaan UMKM;
 2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 3. Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi;
- g) Urusan Penanaman Modal, melalui program antara lain :
1. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- h) Urusan Perdagangan, melalui program antara lain :
1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- i) Urusan Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

1. Program Aplikasi Infomatika;
- jj) Urusan Pariwisata, melalui program antara lain :
1. Program Peningkatan Dayatarik Destinasi Pariwisata;
 2. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekraf;
 3. Program Pemasaran Pariwisata.
- II. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu **Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:
- a) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui program antara lain :
 - 1) Program Penyelenggaraan Jalan;
 - b) Urusan Kesehatan, melalui program antara lain :
 - 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - c) Urusan Keluarga Berencana, melalui program antara lain:
 - 1) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
 - d) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui program antara lain:
 - 1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
 - 3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
 - 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik.
- e) Urusan Lingkungan Hidup, melalui program antara lain :
 - 1) Program Pengelolaan Persampahan;
 - f) Urusan Pendidikan, melalui program antara lain :
 - 1) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 2) Program Pengelolaan Pendidikan;
 - 3) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.
 - g) Urusan Tenaga Kerja, melalui program antara lain :
 - 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

III. Untuk mewujudkan misi ketiga yaitu **Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:

- a) Urusan Penanaman modal, melalui program antara lain:
 - 1) Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 4) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - 5) Program Promosi Penanaman Modal.
- b) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui program antara lain:
- 1) Program Penyelenggaraan Jalan;
 - 2) Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.
- c) Urusan Perdagangan, melalui program antara lain:
- 1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - 2) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- d) Urusan Keuangan, melalui program antara lain :
- 1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- e) Urusan Pertanian, melalui program antara lain :
- 1) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- f) Urusan Transmigrasi, melalui program antara lain :
- 1) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- g) Urusan Perikanan, melalui program antara lain :
- 1) Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 - 2) Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- h) Urusan Lingkungan Hidup, melalui program antara lain :
- 1) Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan LH;
 - 2) Pengelolaan Persampahan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- 3) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - 4) Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
 - 5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
- i) Urusan Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain :
 - 1) Program Aplikasi Infomatika
 - j) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, melalui program antara lain :
 - 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - k) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui program antara lain :
 - 1) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - l) Urusan Tenaga Kerja, melalui program antara lain :
 - 1) Program Penempatan Tenaga kerja;
 - 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - m) Urusan Koperasi dan UMKM, melalui program antara lain :
 - 1) Pemberdayaan UMKM
 - n) Urusan Industri, melalui program antara lain :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- 1) Perencanaan dan Pembangunan Industri

IV. Untuk mewujudkan misi keempat, yaitu **Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatapan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:**

- a) Urusan Sekretariat Daerah, melalui program antara lain:
 - 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b) Urusan Kepegawaian, melalui program antara lain:
 - 1) Program Kepegawaian Daerah;
- c) Urusan Perencanaan, melalui program antara lain:
 - 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d) Urusan Keuangan, melalui program antara lain :
 - 1) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- e) Urusan Pengawasan, melalui program antara lain:
 - 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
 - 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- f) Urusan Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain:
 - 1) Program Aplikasi Informatika;
 - 2) Program Informasi dan Komunikasi Publik.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- g) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, melalui program antara lain :
- 1) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Social;
 - 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- h) Urusan Pendidikan, melalui program antara lain :
- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- i) Non Urusan, melalui program antara lain :
- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Rencana Capaian Kinerja Tahunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021. Perjanjian Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang diinginkan. Penetapan Kinerja juga harus sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, dimana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Berikut kami sampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 dengan jumlah anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.137.431.201.310,- yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 741.365.623.100,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 235.153.091.379,-
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 14.915.303.453,-
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 145.997.183.378,-

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan
Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020
MISI I : MEWUJUDAKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERTUMPU PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN			
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB	3,23
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	5,45%
2	Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	0,19%
3	Peningkatan Populasi Hewan Ternak	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Terhadap RTRW Kab/Kota (%)	3,6%
4	Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	5,82%
5	Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan	Panjang Jalan Menuju Klaster Lahan Pertanian Dalam Kondisi Mantap (KM)	0
6	Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula (Kelompok)	765



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

		Peningkatan Kelas Kelompok Tani Lanjut (Kelompok)	308
		Peningkatan Kelas Kelompok Tani Madya (Kelompok)	117
		Peningkatan Kelas Kelompok Tani Utama (Kelompok)	4
7	Peningkatan Daya Saing UKM / IKM Sektor Pertanian dan Perikanan	Proporsi Produk IKM Berbahan Baku Hasil Pertanian Yang Berstandar (%)	16,09%
8	Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari	Persentase Peningkatan Destinasi Agrowisata dan Wisata Bahari (%)	0,00

MISI II : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING

2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat	Indeks Kesehatan	0,688
9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan Rumah Sakit	Persentase Sarana dan Prasarana Faskes (%)	2,13%
10	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Pengurangan Luas Permukiman Kumuh (Ha)	119,88
		Persentase Pelayanan Air Bersih (%)	57,07%
		Persentase Volumen Sampah Terangkut Per Hari (%)	88,37%
11	Peningkatan Perbaikan Sanitasi Masyarakat	Persentase Sanitasi Layak (%)	73,08%
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	Indeks Pendidikan	9,52
12	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,33
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,71
13	Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah	Persentase Santri Havidz Qur'an	0%
4	Meningkatkan Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing	Rasio Kesempatan Kerja	71,54
14	Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Angkatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Keterampilan Berbasis Kompetensi (%)	69,94%
15	Peningkatan Pelaksanaan Studi Kerja / Magang	Persentase Tenaga Kerja Magang (%)	0%

MISI III : MENINGKATAN INVESTASI DAERAH YANG KOMPETITIF DAN LESTARI

5	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Invenstasi PMDN / PMA	0
16	Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN / PMA (Miliar)	3,418



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

17	Pengembangan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana	Percentase Aksebilitas Antar Desa dan Kecamatan (%)	73,12%
18	Peningkatan PAD	Percentase Peningkatan PAD	4,61%
19	Penyediaan Data dan Informasi Digital Potensi Investasi Daerah	Percentase Data dan Informasi Potensi Investasi Daerah (%)	0%
6	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	74,18
20	Fasilitasi Pendirian Pabrik	Percentase Pendirian Pabrik Kelapa Sawit, Pinang dan Kelapa Dalam (%)	50%
21	Penyediaan Informasi Lapangan Kerja Berbasis Elektronik	Percentase Informasi Lapangan Kerja Berbasis Elektronik (%)	0%
22	Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja	Percentase Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja	0%
23	Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan Berbasis Elektronik	Indek Kepuasan Pelayanan Ketenagakerjaan	B
7	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Ratio Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	100
24	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,03
25	Pengendalian Tata Ruang	Percentase Kesesuai Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang	100,00%

MISI IV : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI GUNA PENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM TATANAN KEHIDUPAN YANG NYAMAN DAN HARMONIS

8	Membangun Birokrasi Yang Tangguh, Terampil dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	C
26	Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Indeks Kelembagaan	Peringkat 3
27	Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan PerUndang-Undangan	Indeks Profesional ASN	54,4
		Indeks Reformasi Hukum	Baik
28	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Maturitas SPIP	Level 2
		Indeks Perencanaan	Baik
		Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik
		Nilai SAKIP	B
		Opini BPK	WTP
29	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya	Indeks Pelayanan Publik	2,6
9	Menciptakan Kondisi Daerah Yang Aman, Nyaman dan Harmonis	Indeks Rasa Aman	0,49
30	Terciptanya Kohesi Sosial Masyarakat	Indeks Toleransi	71
31	Peningkatan Rasa Aman Bagi Semua Lapisan Masyarakat	Percentase Penegakan Perda (%)	98,93%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk meningkatkan performansi organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menjadi suatu kebutuhan bagi Pemimpin Daerah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolak ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut kelompok urusan pemerintahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



3.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh *stakeholder*. Indikator kinerja haruslah dipandang sebagai *early warning system* yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk pengambilan keputusan stratejik agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengembangan amanat dan pemberi amanat. Dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, indikator kinerja masih bersifat parsial dan komulatif sehingga pada pengukuran capaian kinerja per misi akan diberikan tanda (*) untuk indikator yang bersifat parsial dan tanda (**) untuk indikator yang bersifat komulatif.

3.2. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan Standar Pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut :

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 85 %	Sangat berhasil
2	70 % s.d kurang dari 85 %	Berhasil
3	55 % s.d kurang dari 70 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki ruang lingkup yang dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan, maka segala pencapaian sasaran-sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 tidak dapat dilepaskan dari urusan wajib dan urusan pilihan tersebut.

Beberapa hal yang hendak dianalisa dan dievaluasi dapat diuraikan pada masing-masing urusan sebagai berikut :

3.3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN

Capaian masing-masing sasaran tahun 2021 terhadap target yang direncanakan berdasarkan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

	MISI 1 : MEWUJUDAKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERTUMPU PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN
---	--

Untuk mencapai Misi 1 “**MEWUJUDAKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERTUMPU PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN**” pada tahun 2021 telah dilaksanakan 1 (satu) tujuan dan 8 (delapan) sasaran yaitu :

- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
- 2) Peningkatan Produksi Perkebunan.
- 3) Peningkatan Populasi Hewan Ternak.
- 4) Peningkatan Produksi Hasil Perikanan
- 5) Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan.
- 6) Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan.
- 7) Peningkatan Daya Saing UKM / IKM Sektor Pertanian dan Perikanan.
- 8) Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2021
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB	3,23	0,8	24,76%
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase Terhubungannya Desa / Kelurahan ke Ibu Kota Dengan Kondisi Mantap	5,45%	5,46%	100,15%



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2	Peningkatan Produksi Perkebunan	Percentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	0,19%	45,72	24.065,77%
3.	Peningkatan Populasi Hewan Ternak	Percentase Kesesuaian Pemanfaatan Terhadap RTRW Kab/Kota (%)	3,6%	0,73%	20,2%
4.	Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	Percentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	5,82%	1,99%	34,2%
5.	Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan	Panjang Jalan Menuju Klaster Lahan Pertanian Dalam Kondisi Mantap (KM)	0	29,14	291,4%
6.	Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula (Kelompok)	765	767	100,26%
		Peningkatan Kelas Kelompok Tani Lanjut (Kelompok)	308	295	95,78%
		Peningkatan Kelas Kelompok Tani Madya (Kelompok)	117	121	103,42%
		Peningkatan Kelas Kelompok Tani Utama (Kelompok)	4	4	100,00%
7.	Peningkatan Daya Saing UKM / IKM Sektor Pertanian dan Perikanan	Proporsi Produk IKM Berbahan Baku Hasil Pertanian Yang Berstandar (%)	16,09%	16,09%	100,00%
8	Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari	Percentase Peningkatan Destinasi Agrowisata dan Wisata Bahari (%)	0,00	0,00	0%

Untuk mendukung pencapaian Misi 1 **“Meningkatkan Pembangunan**

Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan”

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 8 sasaran yang

didukung dengan 11 Indikator Kinerja Utama.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Dari 9 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2021 sebesar 2.273,74% atau masuk dalam kategori sangat berhasil. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa stakeholder, yaitu : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisita, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mana kesemuanya itu saling berkaitan dalam mencapai target kepala daerah yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja kepala perangkat daerah.

Berdasarkan tabel standar dan kategori pengukuran kinerja untuk Dinas Perkebunan dan Peternakan, bahwa tahun 2021 persentase capaian kinerja untuk indicator diatas sebesar 24.065,77% dengan kategori sangat berhasil dimana dari target sebesar 0,19% telah terealisasi sebesar 45,72%. Pencapaian indikator ini sangat maksimal dikarenakan Dinas Perkebunan dan Peternakan menetapkan 6 (Enam) Program dengan 11 indikator kinerja program yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Realisasi dan capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 dan target akhir periode Renstra adalah sebagai berikut:



Tujuan Sasaran Program I

Meningkatnya Produksi Perkebunan

Indikator kinerja Sasaran yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran strategis ini adalah:

1. Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Dalam (%)
2. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Sawit (%)
3. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kopi (%)
4. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pinang (%)
5. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Coklat (%)
6. Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman (%)
7. Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan (%)

Uraian Capaian Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Dalam (%)

Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Dalam adalah Jumlah Produksi Kelapa Dalam Tahun 2021 dikurangi Jumlah Produksi Kelapa Dalam Tahun 2020 dibagi Jumlah Produksi Kelapa Dalam Tahun 2020 di Kali 100%.

Realisasi Kinerja tahun 2021 (ASEM) sebesar 57.292 Ton dengan Target 57.292 Ton. Realisasi Kinerja dihitung berdasarkan Realisasi dibagi Target dikali 100%. Pada Umumnya Perkebunan Rakyat dengan Jenis Tanaman Terbanyak dan terluas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

adalah Kelapa Dalam dengan Luas Tanaman pada Tahun 2018 seluas 58.505 Ha.

Dengan Produksi sebesar 51.376 ton. Komoditi Kelapa Dalam ini diperdagangkan dalam bentuk kelapa bulat dan kopra yang merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa, Bungkil, Sabun dan Margarin. Pengusahaan Kelapa Dalam yang terluas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat di Kecamatan Mendahara dengan luas 21.604 Hektar dan Produksi 18.059 Ton (Tahun 2018).

Keberlanjutan Kebun Kelapa Dalam mengalami kenaikan yang tidak begitu tinggi hal ini dikarenakan Harga Kelapa dalam yang rendah. Hal ini mengurangi minat petani melakukan peremajaan dan menggunakan benih bersertifikat yang berasal dari Blok Penghasil Tinggi (BPT) yang berlokasi terletak di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi (Seluas 25 Ha dengan Jumlah Pohon Induk Terpilih (PIT) 248 Pohon) dan di Desa Alang-alang., Kecamatan Muara Sabak Timur seluas 50 Ha dengan Jumlah PIT 600 Pohon. Permasalahan yang dihadapi saat ini anatara lain menurunnya harga kelapa di pasar, dimana pada tahun 2018 berada pada kisaran harga Rp. 800/Butir, sedangkan upah panen cukup mahal, sehingga banyak buah kelapa yang tidak dipanen. Hal ini juga berdampak pada menurunnya keinginan petani untuk melakukan replanting terhadap kebun kelapa miliknya. Sehingga replanting dilakukan dengan menggunakan benih yang diproduksi sendiri, bukan yang



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

direkomendasikan dari BPT di dua lokasi tersebut. Dalam Jangka Panjang, Permasalahan tersebut ditambah dengan kurangnya dukungan teknologi dan Hukum/Lembaga akan mengganggu keberlanjutan BPT. Namun di masa datang, dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi petani sedangkan di sisi lain harga komoditas ini cenderung berfluktuasi dikhawatirkan akan mempengaruhi petani mengambil keputusan untuk mengabaikan BPT Tersebut.

Rincian Produksi Kelapa Dalam Realisasi Kinerja Tahun 2018-2021 terdapat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.1
Produksi Kelapa Dalam Tahun 2018-2021**

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)							
		Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
1.	Kelapa Dalam	51.217	51.376	51.351	51.376	51.484	51.376	57.292	*57.293

* Angka Sementara (ASEM)

2. Persentase Peningkatan Produksi Kopi

Persentase Peningkatan Produksi Kopi adalah Jumlah Produksi Kopi Tahun 2021 dikurangi Jumlah Produksi Kopi Tahun 2020 dibagi Jumlah Produksi Kopi Tahun 2020.

Realisasi Kinerja tahun 2021 (ASEM) sebesar 1.237 Ton dengan Target 1.237 Ton. Realisasi Kinerja dihitung berdasarkan Realisasi dibagi Target. Realisasi Kinerja Tahun 2020 sebesar 107,10% sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 109,18% dan sudah mencapai 105,01 dari target pada akhir



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

periode Renstra sebesar 1.178 Ton. Rincian Produksi Kopi dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2021 terdapat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Produksi Kopi Tahun 2018-2021

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)							
		Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
1.	Kopi	1.112	1.237	1.133	1.237	1.155	1.237	1.237	*1.237

* Angka Sementara (ASEM)

3. Persentase Peningkatan Produksi Pinang

Persentase Peningkatan Produksi Pinang adalah Jumlah Produksi Pinang Tahun 2021 dikurangi Jumlah Produksi Pinang Tahun 2020 dibagi Jumlah Produksi Pinang Tahun 2020. Realisasi Kinerja tahun 2021 masih memakai angka realisasi 2020 karena angka tetap 2021 belum ada jadi masih memakai angka sementara (ASEM) 2021. Realisasi Kinerja Tahun 2021 (ASEM) sebesar 16.136 Ton dengan Target 16.136 Ton. Realisasi Kinerja dihitung berdasarkan Realisasi dibagi Target.

Realisasi Kinerja Tahun 2020 sebesar 105,31% sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 107,44% dan sudah mencapai 101,23% dari target pada akhir periode Renstra sebesar 3.094 Ton. Rincian Produksi Pinang dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2021 terdapat pada Tabel 3.3



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Tabel 3.3
Produksi Pinang Tahun 2018-2021

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)							
		Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
1.	Pinang	2.857	3.207	2.915	3.132	2.974	3.132	16.136	16.136

* Angka Sementara (ASEM)

“Tujuan Sasaran Program 2

Meningkatnya Populasi Hewan Ternak

Indikator kinerja Sasaran yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran strategis ini adalah:

1. Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi (%)
2. Persentase Peningkatan Populasi Ternak Kambing (%)
3. Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Buras (%)
4. Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Broiler (%)
5. Persentase Peningkatan Populasi Ternak Itik (%)
6. Persentase Peningkatan Jumlah Akseptor Inseminasi Buatan (IB) (%)
7. Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Sapi Hasil Inseminasi Buatan (IB) (%)
8. Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)
9. Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan
10. Persentase Pemeriksaan Sampel Kesmavet (%)



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Uraian Capaian Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi, Kambing, Ayam Buras, Ayam Broiler dan Itik

Persentase Peningkatan Populasi Ternak adalah Jumlah Peningkatan Populasi Ternak Tahun 2021 dikurangi Jumlah Populasi Ternak Tahun 2020 dibagi Jumlah Populasi Ternak Tahun 2020 dikali 100%. Pengukuran Capaian Kinerja dihitung berdasarkan Realisasi dibagi Target dikali 100% Realisasi Kinerja Populasi Ternak Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
Peningkatan Populasi Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2019,2020 dan 2021

No	Ternak	2019		2020		2021	
		Target (Ekor)	Realisasi (Ekor)	Target (Ekor)	Realisasi (Ekor)	Target (Ekor)	Realisasi (Ekor)
1.	Sapi	22.389	21.010	23.746	21.204	21.531	21.474
2.	Kambing	46.055	43.941	47.974	44.742	45.431	44.951
3.	Ayam Buras	4.090.154	3.909.743	4.260.577	4.021.985	4.083.924	3.986.492
4.	Ayam Ras/Broiler	71.309	47.895	74.280	58.590	59.492	203.205
5.	Itik	38.295	45.959	39.891	48.772	49.523	54.855

2. Persentase Peningkatan Produksi Daging

Persentase Peningkatan Produksi Daging adalah Jumlah Produksi Daging Tahun 2021 dikurangi Jumlah Produksi Daging Tahun 2020 dibagi Jumlah Produksi Daging Tahun 2020. Daging Ruminansia terdiri dari Ruminansia Besar (Sapi dan Kerbau) dan Ruminansia Kecil (Kambing,



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Domba) sedangkan Daging Unggas Terdiri dari Ayam Buras, Ayam Broiler dan Itik.

Realisasi Kinerja tahun 2021 masih memakai angka sementara (ASEM) 2021. Realisasi Kinerja Tahun 2021 (ASEM) Untuk Daging Ruminansia sebesar 281.065 Kg (97,70%) dengan Target 287.687 Kg sedangkan Realisasi Kinerja Produksi Daging Unggas sebesar 986.684 Kg dari Target tidak ada di RPJMD. Realisasi Kinerja dihitung berdasarkan Realisasi dibagi Target.

Realisasi Kinerja Tahun 2020 Produksi Daging Ruminansia sebesar 93% sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 99% dan sudah mencapai 92% dari target pada akhir periode Renstra sebesar 249.325 Kg. Rincian Produksi Daging Ruminansia dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2021 terdapat pada Tabel 3.5

Tabel 3.5
Peningkatan Produksi Daging Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2021

Produksi	Produksi Daging (Kg)							
	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
a. Ruminansia	240.642	234.802	251.105	248.873	261.568	242.481,18	287.687	281.065
b. Unggas	1.436.242	942.467	998.901	950.154	1.561.132	961.702,91	-	986.684

* Angka Sementara (ASEM)

Realisasi Kinerja Tahun 2021 Produksi Daging Unggas sebesar 63,20% jika dibagi dengan target 2020 karena 2021 tidak ada Target Produksi Daging Unggas pada RPJMD.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



MISI 2 : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING

Untuk mencapai Misi 2 “**MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING**” pada tahun 2021 telah dilaksanakan 3 (tiga) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran yaitu :

- 1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan Rumah Sakit.
- 2) Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman.
- 3) Peningkatan Perbaikan Sanitasi Masyarakat
- 4) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan
- 5) Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah.
- 6) Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Angkatan Kerja.
- 7) Peningkatan Pelaksanaan Studi Kerja / Magang.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2021
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat	Indeks Kesehatan	0,688	0,689	100,15%
1.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan Rumah Sakit	Percentase Sarana dan Prasarana Faskes (%)	2,13%	2,13%	100,00%
2.	Peningkatan Perumahan dan Permukiman	Pengurangan Luas Permukiman Kumuh (Ha)	119,88	6,16%	5,13%
		Percentase Pelayanan Air Bersih (%)	57,07%	1,34%	2,34%
		Percentase Volumen Sampah Terangkut Per Hari (%)	88,37%	100%	113,16%
3.	Peningkatan Perbaikan Sanitasi Masyarakat	Percentase Sanitasi Layak (%)	73,08%	2,12%	2,90%
2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	Indeks Pendidikan	9,52	9,55	100,26%
1.	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,33	12,17	98,70%
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,71	6,92	103,12%
2.	Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah	Percentase Santri Havidz Qur'an	0%	50%	500,00%
3.	Meningkatkan Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing	Rasio Kesempatah Kerja	71,54	55,04	76,93%



3.	Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Angkatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Keterampilan Berbasis Kompetensi (%)	69,94%	55,04%	78,70%
4.	Peningkatan Pelaksanaan Studi Kerja / Magang	Persentase Tenaga Kerja Magang (%)	0%	0%	0%

Misi kedua dari RPJMD ini terdiri dari 7 (tujuh) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2021 sebesar 94%. Jika melihat standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka pelaksanaan dari misi kedua ini dapat dikategorikan sangat berhasil.

Ukuran keberhasilan khususnya di Misi II ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

1. Usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup. Semakin tinggi tingkat harapan hidup, maka pembangunan ekonomi bisa dikatakan berhasil.
2. Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang bisa membaca dan rata-rata tingkat sekolah. Semakin tinggi rata-rata membaca dan rata-rata tingkat sekolah, maka pembangunan ekonomi bisa dikatakan berhasil.
3. Penghasilan yang diukur dengan pendapatan riil yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli atau mata uang masing-masing negara. Semakin tinggi tingkat penghasilan masyarakat,



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

maka pembangunan ekonomi bisa dikatakan berhasil.

Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan dalam Pengukuran Target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam table diatas selanjutnya dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas pendidikan kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun 2021.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU selain IKU dominan yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya sasaran Renstra . Analisis tentang lima sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung jabung Timur sebagai alat untuk mewujudkan strategis.

Pencapaian IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian Akuntabilitas Kinerja dan Administrasi Perkantoran	78	80	80
2	Pengelolaan Pendidikan	Persentase Tercapainya Layanan Pendidikan Dasar	100	85%	85%
		APK PAUD	90,54	74,68	116,85
		Angka rata-rata lama sekolah	6,8	6,92	6,92
		Harapan Lama Sekolah	12,20	12,17	12,17
		APM SD /Sederajat	97,28	91,58	94,28
		APM SMP /Sederajat	85,11	64,32	76,31
		APK SD /Sederajat	105,48	102,35	90,57
		APK SMP /Sederajat	95,28	85,06	92,10
		Angka Partisipasi Sekolah SD	97,79	99,21	94,96
		Angka Partisipasi Sekolah SMP	103,10	76,20	89,69
		Persentase Sekolah Dasar yang berAkreditasi minimal B	49,51	49,03	126,27
		Persentase Sekolah Menengah Pertama yang berAkreditasi minimal B	62,22	38,78	67,12
		Angka Melek Huruf	99,30	99,66	102,27
3	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	87,25	92,14	101,39

Tabel 3.6.

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi
1	Rasio ketersediaan sekolah SD/penduduk usia sekolah	88,33
2	Rasio ketersediaan sekolah SMP/penduduk usia sekolah	64,73
3	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	4,54
4	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	4,13
5	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,77
6	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,21
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	95,56
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	96,03
9	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90,79
10	Persentase Rasio Ideal rombel SD	91,37
11	Persentase Rasio Ideal rombel SMP	91,84

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Bila dikaitkan dengan terwujudnya strategis diatas, pencapaian kinerja Dinas Pendidikan pada Tahun 2021 mencakup beberapa kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan dalam belanja langsung yang mencakup 3 program dan 12 kegiatan dan 60 Sub Kegiatan yang berbeda sebagai rangkaian untuk mewujudkan visi manajemen Dinas Pendidikan yang profesional dan sejahtera.

Dari Pengukuran Target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencakup beberapa Program kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2021.



MISI 3 : MENINGKATAN INVESTASI DAERAH YANG KOMPETITIF DAN LESTARI

Untuk mencapai Misi 3 “**MENINGKATAN INVESTASI DAERAH YANG KOMPETITIF DAN LESTARI**” pada tahun 2021 telah dilaksanakan 3 (tiga) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran yaitu :

- 1) Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah.
- 2) Pengembangan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana.
- 3) Peningkatan PAD.
- 4) Penyediaan Data dan Informasi Digital Potensi Investasi Daerah.
- 5) Fasilitasi Pendirian Pabrik.
- 6) Penyediaan Informasi Lapangan Kerja Berbasis Elektronik.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- 7) Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja.
- 8) Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan Berbasis Elektronik.
- 9) Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 10) Pengendalian Tata Ruang.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2021
1.	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Invenstasi PMDN / PMA	0	13,89%	138,9%
1.	Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN / PMA (Miliar)	3,418	3,586	104,92%
2.	Pengembangan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana	Persentase Aksebilitas Antar Desa dan Kecamatan (%)	73,12%	72,04%	98,52%
3.	Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD	4,61%	16,73%	362,96%
4.	Penyediaan Data dan Informasi Digital Potensi Investasi Daerah	Persentase Data dan Informasi Potensi Investasi Daerah (%)	0%	0%	0%
2.	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	74,18	71,22	96,01%
5.	Fasilitasi Pendirian Pabrik	Persentase Pendirian Pabrik Kelapa Sawit, Pinang dan Kelapa Dalam (%)	50%	50%	100,00%
6.	Penyediaan Informasi Lapangan Kerja Berbasis Elektronik	Persentase Informasi Lapangan Kerja Berbasis Elektronik (%)	0%	0%	0%



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

7.	Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja	Persentase Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja	0%	0%	0%
8.	Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan Berbasis Elektronik	Indek Kepuasan Pelayanan Ketenagakerjaan	B	B	100%
3.	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Ratio Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	100	100	100,00%
9.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,03	67,30	101,92%
10.	Pengendalian Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang	100,00%	100,00%	100,00%

Misi ketiga dari RPJMD ini terdiri dari 10 sasaran dan 10 indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2021 sangat sempurna sebesar 117%. Jika melihat standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka pelaksanaan dari misi ketiga ini dapat dikategorikan sangat berhasil karena memiliki nilai rata-rata diatas 100 %. Indikator yang sangat menonjol adalah persentase peningkatan PAD yang semula di targetkan sebesar 4,61% terealiasi dari target tahun 2021 hanya sebesar 362,96%.

Ukuran keberhasilan khususnya pada indikator peningkatan asli daerah ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

	MISI 4 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI GUNA PENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM TATANAN KEHIDUPAN YANG NYAMAN DAN HARMONIS
---	--

Untuk mendukung Misi 4 telah dilakukan sasaran utama diantaranya :

- 1) Penataan Kelembagaan dan Organisasi.
- 2) Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan PerUndang-Undangan.
- 3) Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.
- 4) Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya.
- 5) Terciptanya Kohesi Sosial Masyarakat.
- 6) Peningkatan Rasa Aman Bagi Semua Lapisan Masyarakat

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2021
1.	Membangun Birokrasi Yang Tangguh, Terampil dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	100%
1.	Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Indeks Kelembagaan	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat Komposit 2 (P-4)
2.	Peningkatan Aparatur Penataan PerUndang-Undangan	Indeks Profesional ASN	54,4	71	130,51%
		Indeks Reformasi Hukum	Baik	NA	-
3.	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja	Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	-
		Indeks Perencanaan	Baik	Sangat Baik	-



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

	dan Keuangan	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Kurang	-
		Nilai SAKIP	B	CC	-
		Opini BPK	WTP	WTP	-
4.	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya	Indeks Pelayanan Publik	2,6	3,27	125,8%
2.	Menciptakan Kondisi Daerah Yang Aman, Nyaman dan Harmonis	Indeks Rasa Aman	0,49	NA	-
5.	Terciptanya Kohesi Sosial Masyarakat	Indeks Toleransi	71	80	112,67%
6.	Peningkatan Rasa Aman Bagi Semua Lapisan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda (%)	98,93%	100,00%	101,08%

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal maka 2 sasaran dengan 6 indikator yang mendukung misi keempat dapat dinyatakan meraih angka sempurna karena seluruh capaian kinerja terhadap target tahun 2021 meraih angka sebesar 107%.

Pencapaian ini didapat karena adanya komitmen dari kepala daerah dan para kepala perangkat daerah khususnya yang telah mampu untuk meraih target yang telah ditetapkan walaupun ada beberapa indikator tidak sesuai dengan target namun dalam hal ini bukan berarti dikatakan gagal dikarena indicator tersebut baru akan dilaksanakan atau dikerjakan di tahun selanjutnya berdasarkan target di RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ukuran keberhasilan khususnya dibidang pemerintahan ini dikarenakan adanya goodwill dari kepala daerah untuk menjadikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi pelayan bagi masyarakatnya selaras dengan visi – misi Bupati “MERAKYAT”

3.4. KINERJA KEUANGAN

1. Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan sebesar Rp. 1.089.315.889.549,- dimana dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.164.679.495.736,45,- atau terealisasi sebesar 106,92%, dapat jelas sebagai berikut :

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	55.858.703.734,21,-	83.151.030.599,45,-	148,86
2	Pendapatan Dana Perimbangan	846.482.218.840,00,-	887.564.206.912,00,-	104,85
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	27.714.845.012,55,-	54.429.958.782,79,-	196,39
	Total	1.089.315.889.549,00-	1.164.679.495.736,45	106,92

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Untuk menilai lebih lanjut kinerja pendapatan daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

1. Pendapatan Asli Daerah

Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri atas penerimaan yang berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Penerimaan dari jenis lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, sumbangan pihak ketiga dan penerimaan lain-lain.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	19.072.000.000,00,-	19.776.698.793,50	103,69
2	Retribusi Daerah	2.277.371.000,00,-	1.855.564.808,43	81,48
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	6.794.487.721,66,-	7.088.808.214,73	104,43
4	Lain – Lain PAD yang sah	27.714.845.012,55	54.429.958.782,79	196,39
Jumlah		55.676.871.346,13,-	49.654.020.387,85,-	89,18

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Total realisasi Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2021 penerimaan yang ditargetkan sebesar Rp. 55.858.703.734,21,-dengan realisasi sebesar Rp. 83.151.030.599,45,-atau 148,86%. Realisasi ini lebih besar dari Tahun 2020 sebesar Rp. 49.654.020.387,85,-.

2. Pendapatan Transfer

Untuk dana perimbangan terdiri atas penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	953.046.093.840,00-	994.128.081.892,00	104,31
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.844.841.974,79	55.961.278.245,00	114,57
Jumlah		1.001.890.935.814,79	1.050.089.360.137,00	104,81

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Total realisasi pendapatan transfer selama tahun 2021 melebihi target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.001.890.935.814,79,-. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi Rp. 1.050.089.360.137,00,- atau 104,81%.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari dana hibah; dana darurat; dana bagi hasil pajak provinsi dan pemda lainnya; dana penyesuaian dan Otonomi khusus (Dana Pengembangan Desentralisasi Fiskal); dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan	31.566.250.000,-	31.439.105.00,-	99,60
Jumlah		31.566.250.000,-	31.439.105.00,-	99,60

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2. Belanja Daerah

Secara umum anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satuan pagu tertinggi guna pelaksanaan kegiatan, sehingga apabila dalam pengeluaran tertentu tidak mencapai catatan target belanja, dapat diartikan adanya efisiensi. Dengan pengeluaran tetap mengedepankan azas manfaat dan target kinerja masing-masing kegiatan yang telah direncanakan.

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	738.531.449.577,62,-	674.314.634.400,70,-	91,30
2	Belanja Modal	244.544.117.910,00,-	229.985.510.379,13,-	94,05
3	Belanja Tidak Terduga	14.743.138.683,38,-	280.866.511,00,-	1,91
4	Belanja Transfer	145.997.183.378,00,-	145.346.442.316,00,-	99,55
	Total	1.143.815.889.549,00,-	1.049.927.453.606,83	91,79

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Pada tahun anggaran 2021 belanja daerah hanya sebesar 91,79% dari total belanja, hal ini seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah 2021-2026.

Total realisasi belanja daerah sebesar Rp. **1.049.927.453.606,83,-** dari target yang ditetapkan sebesar Rp. **1.143.815.889.549,00,-** atau terealisasi sebesar **91,79%**, dimana belanja operasi terealisasi sebesar Rp. 674.314.634.400,70,- atau 91,30%, belanja modal terealisasi sebesar Rp.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

229.985.510.379,13,- atau 94,05%, belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp. 280.866.511,00,- atau 1,91%, dan Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp. 145.346.442.316,00,- atau 99,55%.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN/TARGET	REALISASI
1	Penerimaan Pembiayaan	55.000.000.000,-	38.295.149.755,44,-
	- SILPA	55.000.000.000,-	38.295.149.755,44,-
2	Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00,-	500.000.000,00,-
	- Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	500.000.000,00,-	500.000.000,00,-
3	Pembiayaan Netto	54.500.000.000,-	38.295.149.755,44

* Data Sementara(unaudit)
Sumber : BKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2020, data

Dari sisi penerimaan pembiayaan tahun 2021, anggaran SILPA ditargetkan sebesar Rp. 55.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

38.295.149.755,44,-atau 69,63%, sedangkan sisip pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp. 500.000.000,00,- atau 100% sama dengan Tahun 2020. Pembiayaan netto tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 54.500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 38.295.149.755,44 atau sebesar 70,27%.



BAB IV PENUTUP

Bab ini menyimpulkan seluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

4.1. KESIMPULAN

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran, tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari, bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran, tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator sasaran yang telah disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021–2026, sesuai dengan tahapan target pencapaian per



tahun, maka pada tahun 2021 seluruh indikator sasaran sudah dapat diidentifikasi perkembangan capaiannya.

Dari seluruh indikator sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah seluruhnya sudah bisa diidentifikasi tingkat capaiannya, meskipun disadari masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021. Hal ini akan menjadi strategi untuk diselesaikan pemecahannya pada tahun berikutnya.

4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sangat mengharapkan adanya/ peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk:

1. Partisipasi *stakeholders*, antara lain : Perangkat Daerah (Sekretariat, Dinas, Badan, dan perangkat daerah lainnya), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.
2. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

penyelarasan dengan program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Perubahan paradigma aparat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. ROMI HARIYANTO, SE.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAMPIRAN I



INDIKATOR KINERJA UTAMA



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berisi Indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerjanya, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022
NOMOR. 2...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2021-2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Capaian Kinerja Kondisi Awal 2020	Target Kinerja						Sumber Data	SKPD PELAKSANA						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026								
VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (MERAKYAT)																	
MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan																	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB	BPS		2,68	3,23	3,78	4,33	4,88	5,43	6,00	Primer	Dinas TPH, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga					

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Capaian Kinerja Kondisi Awal 2020	Target Kinerja							Sumber Data	SKPD PELAKSANA
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
MISI 2 : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing												
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Indeks Kesehatan	IK = (UHH-UHH Min)/(UHH Maks-UHH Min)	0,687	0,688	0,690	0,691	0,692	0,693	0,695	Primer	Dinas Kesehatan, RSUD NH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas LH, Dinas PPKB	
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	Indeks Pendidikan	IP = (HLS + Rata2 Lama Sekolah)/2	9,43	9,52	9,61	9,70	9,79	9,88	9,97	Primer	Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah	
Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	Rasio Kesempatan Kerja	BPS	71,53	71,54	71,56	71,57	71,59	71,60	71,61	Primer	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
MISI 3 : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari												
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	Target Tahun n/Total Target x 100	0	0	5,4	5,7	10,53	11,54	11,79	Primer	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Badan Keuangan Daerah, OPD yang mendapatkan Target PAD, Satpol PP Damkar	

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Capaian Kinerja Kondisi Awal 2020	Target Kinerja						Sumber Data	SKPD PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Data TPAK BPS	74,180	74,180	75,282	76,384	77,486	78,588	79,69	Primer	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UMKM	
Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Rasio Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	Jumlah Perusahaan yang Taat izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dibagi total Perusahaan x 100	100	100	100	100	100	100	100	Primer	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	
MISI 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis												
Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian Menpan RB	NA	C	CC	CC	B	B	B	Primer	Seluruh OPD	
Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis	Indeks Rasa Aman	Survey	NA	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53	0,54	Primer	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satpol PP Damkar	

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAMPIRAN II



PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN TAHUN 2021



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ROMI HARIYANTO

Jabatan : BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muara Sabak, November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Pemerintah Kabupaten
Tahun

: Tanjung Jabung Timur
: 2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
MISI I : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan			
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB	3,23
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	5,45%
2	Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	0,19%
3	Peningkatan Populasi Hewan Ternak	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota (%)	3,6%
4	Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	5,82%
5	Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan	Panjang Jalan Menuju Klaster Lahan pertanian dalam kondisi mantap (Km)	0
6	Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kelas Kelompoktani Pemula (Kelompok)	765
		Peningkatan Kelas Kelompoktani Lanjut (Kelompok)	308
		Peningkatan Kelas Kelompoktani Madya (Kelompok)	117
		Peningkatan Kelas Kelompoktani Utama (Kelompok)	4
7	Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan	Proporsi Produk IKM berbahan baku hasil petanian yang berstandar (%)	16,09%
8	Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari	Persentase peningkatan destinasi agrowisata dan wisata bahari (%)	0,00
MISI II : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing			
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Indeks Kesehatan	0,688
9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan Rumah Sakit	Persentase Sarana Prasarana Faskes (%)	2,13%
10	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Pengurangan Luas Permukiman Kumuh (Ha)	119,88
		Persentase Pelayanan Air Bersih (%)	57,07%
		Persentase Volume Sampah terangkut perhari (%)	88,37%
11	Peningkatan Perbaikan Sanitasi Masyarakat	Persentase Sanitasi Layak (%)	73,08%
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	Indeks Pendidikan	9,52
12	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,33
		Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	6,71
13	Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah	Persentase Santri Havidz Qur'an (%)	0%
4	Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	Rasio Kesempatan Kerja	71,54
14	Peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis kompetensi (%)	69,94%
15	Peningkatan Pelaksanaan studi kerja/ magang	Persentase tenaga kerja magang (%)	0%

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
MISI III : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari			
5	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	0
16	Peningkatan Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN/PMA (Miliar)	3,418
17	Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana	Persentase aksesibilitas antar desa dan kecamatan (%)	73,12%
18	Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD (%)	4,61%
19	Penyediaan data dan Informasi digital potensi investasi daerah	Persentase data dan informasi potensi investasi daerah (%)	0%
6	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	74,18
20	Fasilitasi Pendirian Pabrik	Persentase Pendirian Pabrik Kelapa Sawit, Pinang dan Kelapa Dalam (%)	50%
21	Penyediaan Informasi Lapangan Kerja berbasis Elektronik	Persentase informasi lapangan kerja bebas elektronik (%)	0%
22	Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan permodalan usaha kerja dan Peralatan Kerja (%)	0%
23	Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan berbasis elektronik	Indeks Kepuasan Pelayanan ketenagakerjaan	B
7	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Rasio Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	100
24	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,03
25	Pengendalian Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	100,00%
MISI IV : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatatan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis			
8	Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	C
26	Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Indeks Kelembagaan	Peringkat 3
27	Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Profesionalitas ASN Indeks Reformasi Hukum	54,4 Baik
28	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Maturitas SPIP Indeks Perencanaan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai SAKIP Opini BPK	Level 2 Baik Baik B WTP
29	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya	Indeks Pelayanan Publik	2,6
9	Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis	Indeks Rasa Aman	0,49
30	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	Indeks Toleransi	71
31	Peningkatan rasa aman bagi semua lapisan masyarakat	Persentase Penegakan Perda	98,83%

Jumlah Belanja APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 1.137.431.201.310 yang terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi sebesar Rp. 741.365.623.100
- 2) Belanja Modal sebesar Rp. 235.153.091.379
- 3) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 14.915.303.453
- 4) Belanja Transfer sebesar Rp. 145.997.183.378

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAMPIRAN III



RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN TAHUN 2021



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020
MISI I : MEWUJUDAKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERTUMPU PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN			
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB	3,23
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	5,45%
2	Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	0,19%
3	Peningkatan Populasi Hewan Ternak	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Terhadap RTRW Kab/Kota (%)	3,6%
4	Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	5,82%
5	Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan	Panjang Jalan Menuju Klaster Lahan Pertanian Dalam Kondisi Mantap (KM)	0
6	Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula (Kelompok)	765
		Peningkatan Kelas Kelompok Tani Lanjut (Kelompok)	308
		Peningkatan Kelas Kelompok Tani Madya (Kelompok)	117
		Peningkatan Kelas Kelompok Tani Utama (Kelompok)	4
7	Peningkatan Daya Saing UKM / IKM Sektor Pertanian dan Perikanan	Proporsi Produk IKM Berbahan Baku Hasil Pertanian Yang Berstandar (%)	16,09%
8	Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari	Persentase Peningkatan Destinasi Agrowisata dan Wisata Bahari (%)	0,00
MISI II : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING			
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat	Indeks Kesehatan	0,688
9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan Rumah Sakit	Persentase Sarana dan Prasarana Faskes (%)	2,13%
10	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Pengurangan Luas Permukiman Kumuh (Ha)	119,88
		Persentase Pelayanan Air Bersih (%)	57,07%
		Persentase Volumen Sampah Terangkut Per Hari (%)	88,37%
11	Peningkatan Perbaikan Sanitasi Masyarakat	Persentase Sanitasi Layak (%)	73,08%

3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	Indeks Pendidikan	9,52
12	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,33
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,71
13	Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah	Percentase Santri Havidz Qur'an	
4	Meningkatkan Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing	Rasio Kesempatan Kerja	71,54
14	Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Angkatan Kerja	Percentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Keterampilan Berbasis Kompetensi (%)	69,94%
15	Peningkatan Pelaksanaan Studi Kerja / Magang	Percentase Tenaga Kerja Magang (%)	0%

MISI III : MENINGKATAN INVESTASI DAERAH YANG KOMPETITIF DAN LESTARI

5	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Percentase Peningkatan Invenstasi PMDN / PMA	0
16	Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN / PMA (Miliar)	3,418
17	Pengembangan Aksebilitas Sarana dan Prasarana	Percentase Aksebilitas Antar Desa dan Kecamatan (%)	73,12%
18	Peningkatan PAD	Percentase Peningkatan PAD	4,61%
19	Penyediaan Data dan Informasi Digital Potensi Investasi Daerah	Percentase Data dan Informasi Potensi Investasi Daerah (%)	0%
6	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	74,18
20	Fasilitasi Pendirian Pabrik	Percentase Pendirian Pabrik Kelapa Sawit, Pinang dan Kelapa Dalam (%)	50%
21	Penyediaan Informasi Lapangan Kerja Berbasis Elektronik	Percentase Informasi Lapangan Kerja Berbasis Elektronik (%)	0%
22	Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja	Percentase Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja	0%
23	Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan Berbasis Elektronik	Indeks Kepuasan Pelayanan Ketenagakerjaan	B
7	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Ratio Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	100
24	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,03
25	Pengendalian Tata Ruang	Percentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang	100,00%

MISI IV : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI GUNA PENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM TATANAN KEHIDUPAN YANG NYAMAN DAN HARMONIS

8	Membangun Birokrasi Yang Tangguh, Terampil dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	C
26	Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Indeks Kelembagaan	Peringkat 3
27	Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan PerUndang-Undangan	Indeks Profesional ASN Indeks Reformasi Hukum	54,4 Baik

28	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Maturitas SPIP	Level 2
		Indeks Perencanaan	Baik
		Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik
		Nilai SAKIP	B
		Opini BPK	WTP
29	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya	Indeks Pelayanan Publik	2,6
9	Menciptakan Kondisi Daerah Yang Aman, Nyaman dan Harmonis	Indeks Rasa Aman	0,49
30	Terciptanya Kohesi Sosial Masyarakat	Indeks Toleransi	71
31	Peningkatan Rasa Aman Bagi Semua Lapisan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda (%)	98,93%

Muara Sabak, November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. ROMI HARIYANTO, SE.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAMPIRAN IV



PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN KABUPATEN TAHUN 2021



**PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021			CAPAIAN TARGET TAHUN 2020
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET	
MISI I : MEWUJUDAKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERTUMPU PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN						
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB	3,23	0,8	24,76%	27,76
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	5,45%	5,46%	100,15%	112,47%
2	Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	0,19%	45,72	24.065,77 %	NA
3	Peningkatan Populasi Hewan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak	3,6%	0,73%	20,2%	91,95%
4	Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	5,82%	1,99%	34,2%	6,89%
5	Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan	Panjang Jalan Menuju Klaster Lahan Pertanian Dalam Kondisi Mantap (KM)	0	29,14	291,4%	NA
6	Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula (Kelompok)	765	767	100,26%	213%
		Peningkatan Kelas Kelompok Tani Lanjut (Kelompok)	308	295	95,78%	54,9%
		Peningkatan Kelas Kelompok Tani Madya (Kelompok)	117	121	103,42%	51,6%
		Peningkatan Kelas Kelompok Tani Utama (Kelompok)	4	4	100,00%	43,6%
7	Peningkatan Daya Saing UKM / IKM Sektor Pertanian dan Perikanan	Proporsi Produk IKM Berbahan Baku Hasil Pertanian Yang Berstandar (%)	16,09%	16,09%	100,00%	NA
8	Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari	Persentase Peningkatan Destinasi Agrowisata dan Wisata Bahari (%)	0,00	0,00	0%	NA

MISI II : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING						
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat	Indeks Kesehatan	0,688	0,689	100,15%	NA
9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan Rumah Sakit	Persentase Sarana dan Prasarana Faskes (%)	2,13%	2,13%	100,00%	0
10	Peningkatan Kualitas Perumahan Permukiman	Pengurangan Luas Permukiman Kumuh (Ha)	119,88	6,16%	5,13%	4,12%
		Persentase Pelayanan Air Bersih (%)	57,07%	1,34%	2,34%	5,91%
		Persentase Volume Sampah Terangkut Per Hari (%)	88,37%	100%	113,16 %	100%
11	Peningkatan Perbaikan Sanitasi Masyarakat	Persentase Sanitasi Layak (%)	73,08%	2,12%	2,90%	10,12%
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	Indeks Pendidikan	9,52	9,55	100,26%	NA
12	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,33	12,17	98,70%	106,85%
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,71	6,92	103,12%	95,71%
13	Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah	Persentase Santri Havidz Qur'an	0%	50%	500,00%	30%
4	Meningkatkan Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing	Rasio Kesempatan Kerja	71,54	55,04	76,93%	75,47%
14	Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Angkatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Keterampilan Berbasis Kompetensi (%)	69,94%	55,04%	78,70%	75,47%
15	Peningkatan Pelaksanaan Studi Kerja / Magang	Persentase Tenaga Kerja Magang (%)	0%	0%	0%	0%
MISI III : MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH YANG KOMPETITIF DAN LESTARI						
5	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Invenstasi PMDN / PMA	0	13,89%	138,9%	NA
16	Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN / PMA (Milyar)	3,418	3,586	104,92%	47,66%
17	Pengembangan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana	Persentase Aksebilitas Antar Desa dan Kecamatan (%)	73,12%	72,04%	98,52%	98,52%
18	Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD	4,61%	16,73%	362,96%	89,18%
19	Penyediaan Data dan Informasi Digital Potensi Investasi Daerah	Persentase Data dan Informasi Potensi Investasi Daerah (%)	0%	0%	0%	0%

6	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	74,18	71,22	96,01%	71,22%
20	Fasilitasi Pendirian Pabrik	Persentase Pendirian Pabrik Kelapa Sawit, Pinang dan Kelapa Dalam (%)	50%	50%	100,00%	NA
21	Penyediaan Informasi Lapangan Kerja Berbasis Elektronik	Persentase Informasi Lapangan Kerja Berbasis Elektronik (%)	0%	0%	0%	NA
22	Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja	Persentase Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja	0%	0%	0%	NA
23	Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan Berbasis Elektronik	Indek Kepuasan Pelayanan Ketenagakerjaan	B	B	100%	B
7	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Ratio Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	100	100	100,00%	100
24	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,03	67,30	101,92%	107,39%
25	Pengendalian Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%

MISI IV : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI GUNA PENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM TATANAN KEHIDUPAN YANG NYAMAN DAN HARMONIS

8	Membangun Birokrasi Yang Tangguh, Terampil dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	100%	C
26	Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Indeks Kelembagaan	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat Komposit 2 (P-4)	NA
27	Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan PerUndang-Undangan	Indeks Profesional ASN	54,4	71	130,51%	71%
		Indeks Reformasi Hukum	Baik	NA	-	NA
28	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	-	Level 2
		Indeks Perencanaan	Baik	Sangat Baik	-	NA
		Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Kurang	-	Kurang
		Nilai SAKIP	B	CC	-	CC
		Opini BPK	WTP	WTP	-	WTP
29	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya	Indeks Pelayanan Publik	2,6	3,27	125,8%	3,27

9	Menciptakan Kondisi Daerah Yang Aman, Nyaman dan Harmonis	Indeks Rasa Aman	0,49	NA	-	NA
30	Terciptanya Kohesi Sosial Masyarakat	Indeks Toleransi	71	80	112,67%	81%
31	Peningkatan Rasa Aman Bagi Semua Lapisan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda (%)	98,93%	100,00%	101,08%	197,20%

Muara Sabak, November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. ROMI HARIYANTO, SE.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAMPIRAN V



PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **S A P R I L, S.IP**
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Oktober 2021

Pihak Kedua,

H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,

S A P R I L, S.IP
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690419 198908 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Pelayanan Instansi	1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mengkatkan Pelayanan yang Teransparan dalam Penyelenggara Pemerintah	1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100%
Jumlah APBD Tahun 2021 Sebesar		Rp. 33.235.155.191 terdiri dari :
1. Belanja Operasional Sebesar	Rp. -	
2. Belanja Modal Sebesar	Rp. 2.926.800.000	
3. Belanja Tidak Terduga Sebesar	Rp. -	
4. Belanja Transfer Sebesar	Rp. -	
5. Belanja Pegawai Sebesar	Rp. 12.104.436.735	
6. Belanja Barang dan Jasa Sebesar	Rp. 18.310.728.456	
No	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.735.305.795,- APBD
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.216.547.984,- APBD
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.390.111.412,- APBD


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE


SEKRETARIS DAERAH


SAPRIL, S.IP

Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690419 198908 1 001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAFARUDDIN, S.IP
Jabatan : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ROMI HARIYANTO, SE
Jabatan : BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DPRD

SYAFARUDDIN, S.IP

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Peran DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasi, penganggaran dan Pegawasan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Perda	100
2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	98
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	77
		Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai

Jumlah APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 37.606.118.018,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 36.615.002.054,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 991.115.964,00

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 30.395.975.560,00	
2	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 7.210.142.458,00	
Jumlah		Rp. 37.606.118.018,00	

Muara Sabak, November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


H. ROMI HARYANTO, SE

SEKRETARIS DPRD

SYAFARUDDIN, S.I.P

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUHAS PURROJANI, S.Sos**

Jabatan : Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji, akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. ROMI HARIYANTO, SE

Muara Sabak, November 2021

Pihak Pertama,

SUHAS PURROJANI, S.Sos

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Indek Pelayanan Instansi	78%
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD yang Efektif, Efisien, dan Ekantabel	Persentase Kepatuhan Pengembalian Temuan BPK	40%
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Meningkatnya Level IACM (Internal Auditor Capability Model)	2

Jumlah APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 8.798.776.192,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi Sebesar Rp. 7.560.020.655,00
2. Belanja Modal Sebesar Rp. 1.238.755.537,00
3. Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp. -
4. Belanja Transfer sebesar Rp. -

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5,985,620,375	
2	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 2,623,437,822	
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 189,717,995	
	Jumlah	Rp 8,798,776,192	

Muara Sabak, November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

INPEKTUR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


SUHAS PURROJANI, S.Sos

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. ALI FAHRUDDIN, M.P.A**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


H. ROMI HARIYANTO, S.E


Drs. ALI FAHRUDDIN, M.P.A

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021
1	Mengoptimalkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi RKPD dalam APBD	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Target Sasaran RPJMD	94%
3	Menyediakan data yang akurat dan valid sebagai bahan Perencanaan dan Informasi	Persentase pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	100%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81
		Nilai AKIB	72
		Laporan Keuangan sesuai SAP	Sesuai

Jumlah APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 7.245.987.839.24 yang terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi Rp. 7.068.244.179 dan,
- 2) Belanja Modal sebesar Rp. 177.743.660

No	Program	Belanja Langsung (Rp)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,528,111,932.24
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,014,826,979.00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,703,048,928.00
Jumlah		7,245,987,839.24

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, S.E

Kepala Bappeda

Drs. Ali Fahruddin, M.PA

**PERYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ANGGARAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. HADI FIRDAUS, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



H. ROMI HARIYANTO, SE

Muara Sabak, Oktober 2021

Pihak Pertama



Drs. HADI FIRDAUS, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	68
		Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai
1	Peningkatan Profesionalitas Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah	Nilai Bobot Kualifikasi Pendidikan ASN	12,04%
		Nilai Bobot Kompetensi ASN	12,40%
		Nilai Bobot Kinerja ASN	25,00%
		Nilai Bobot Disiplin ASN	4,99%
2	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Skor Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	70

PROGRAM		ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.459.715.716
2	Program Kepegawaian Daerah	3.695.704.323
Jumlah		10.155.420.039

Muara Sabak, Oktober 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARYANTO, SE

KEPALA BKPSDM

Drs. HADI FIRDAUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19670722198908 1 001

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. IMRON TB, M.Pd**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya di sebut pihak Pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. ROMI HARIYANTO, SE

Drs. IMRON TB, M.Pd

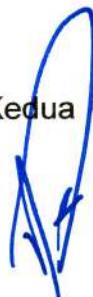
PERJANJIAN KONFERENSI PERUBAHAN TAHUN 2021
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan lingkungan yang kondusif di masyarakat	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat yang Difasilitasi	100%
2	Menciptakan Stabilitas Politik yang demokratis agar tetap tegaknya persatuan dan kesatuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Indeks Kebebasan Sipil	82%
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75
		Nilai AKIP	65
		Laporan Keuangan	susuai

Jumlah APD Tahun 2021 sebesar	Rp	4,637,580,557.00
1 Belanja Operasi Sebesar	Rp	4,602,032,156.00
2 Belanja Modal Sebesar	Rp	35,548,401.00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2,945,243,743.00	
2	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 23,660,000.00	
3	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 855,174,760.00	
4	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 32,094,000.00	
5	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp 57,681,400.00	
6	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 723,726,654.00	
	JUMLAH	Rp 4,637,580,557.00	

Pihak Kedua



H. ROMI HARIYANTO, SE

Muara Sabak, November 2021
Pihak Pertama

Drs. IMRON TB, M.Pd



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ZEKKI ZULKARNAEN, S.Sos**
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO**
Jabatan : Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,

H. ROMI HARIYANTO

Pihak Pertama,

ZEKKI ZULKARNAEN, S.Sos
Pembina TK I (IV/b)
NIP.19740331 200012 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		TARGET
1.	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Indeks Pelayanan Instansi	65
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	63
		3	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai
2.	Peningkatan Kualitas kajian yang digunakan dalam kebijakan daerah		Persentase Penelitian dan Pengembangan	100

NO	PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	30.771.716
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	3.042.368.732,07
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	161.854.918
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	25.800.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	116.780.000
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	100	16.850.000
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	51.864.000
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	136.339.736
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	178.142.072
Jumlah				3.760.771.174,00	

Jumlah APBD Tahun 2021 Sebesar Rp.3.760.771.174,00,- yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi Sebesar Rp. 3.760.771.174,00,-
2. Belanja Modal Rp. 0,-
3. Belanja Tidak terduga Rp.0,-
4. Belanja Transfer Sebesar Rp.0-

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.377.575.366,07	
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	383.195.808	
Jumlah		3.760.771.174,00,-	

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

H. ROMI HARIYANTO

ZEKKI ZULKARNAEN, S.Sos
Pembina TK I (IV/b)
NIP.19740331 200012 1 001

**PERNYATAAN PERGESERAN PENETAPAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERGESERAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUSIRWAN, SE**
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji, akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. ROMI HARIYANTO, SE

Muara Sabak, November 2021

Pihak Pertama

NUSIRWAN, SE

PERGESERAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	1. Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan	1 Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	100
2.	1. Terwujudnya Kepatuhan SKPD terhadap Pelaporan yang sesuai Standard Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk memperoleh Opini WTP 2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku 3 Terlaksananya Penyusunan APBD dan Perubahan APBD 4 Terwujudnya Penatausahaan aset daerah yang sesuai dengan peraturan Perundangan 5 Terwujudnya Data Aset Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang Akurat dan Akuntabel	1 Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan berbasis Akrual tepat waktu dan tepat sasaran 2 Persentase SKPD yang melaksanakan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 3 Persentase SKPD yang menyampaikan RKA, DPA, DPPA tepat waktu 4 Persentase jenis aset yang memiliki <u>nilai perolehan</u> Persentase jenis aset yang teridentifikasi kepemilikan dan keberadaan	100 100 100 100 100
3.	1 Peningkatan Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) 3 Laporan Keuangan Sesuai SAP	76,00 67,25 Sesuai

Jumlah APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 180.899.558.114,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 19.172.671.283,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 814.400.000,00
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 14.915.303.453,00
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 145.997.183.378,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KET
1	2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.960.243.561,00	
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	164.291.803.398,00	
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	892.000.000,00	
IV	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	755.511.155,00	
Jumlah		180.899.558.114,00	

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO

Muara Sabak, November 2021
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

NUSIRWAN, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680908 199403 1 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT KERJA
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **J A K F A R, S.Sos**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kab. Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya di sebut pihak Pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua



H. ROMI HARIYANTO, S.E.

Pihak Pertama

J A K F A R, S.Sos.

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Skor Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	75
		Nilai AKIP	70
		Laporan Keuangan	100%
2.	Melindungi masyarakat dari bencana	Persentase desa tangguh bencana	29,35%
3.	Meningkatnya waktu penanganan korban bencana dan terpenuhinya kebutuhan logistik dan peralatan	Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti tepat waktu (sesuai SOP)	100%
4.	Bantuan untuk masyarakat korban bencana	Prosentase Masyarakat korban yang diberikan bantuan	100%

Jumlah APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 7.296.160.233 Yang terdiri dari:

- 1 Belanja Operasi sebesar Rp. 7.077.174.864
- 2 Belanja Modal sebesar Rp. 218.985.369
- 3 Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp. -
- 4 Belanja Transfer sebesar Rp. -

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabu	Rp 4,268,299,568	
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp 3,027,860,665	
		Rp 7,296,160,233	

Muara Sabak, November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARYANTO

KEPALA PELAKSANA BPBD
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR


JAKFAR, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 196806121988101001

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Ir. RAJITO**
Jabatan : Kepala Dinas Perkebunan dan Pernakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO,SE**
Jabatan : Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. ROMI HARIYANTO,SE

Muara Sabak, November 2021

Pihak Pertama,

Ir. RAJITO
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660211199203 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Produksi Perkebunan	1. Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan 2. Persentase Ketersediaan TAM 3. Persentase Jalan Produksi 4. Persentase Penilaian Usaha Perkebunan 5. Persentase Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan 6. Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman 7. Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan 8. Cakupan Bina Kelompok Tani	16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 2% 0,16% 0,29%
2	Meningkatnya Populasi Hewan Ternak	9. Persentase Inseminasi Buatan Ternak 10. Persentase Produksi HPT 11. Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak 12. Persentase Sampel Pangan Asal Hewan/ Hasil Pangan Asal Hewan	33,47% 41,67% 0,15% 40,65%
3	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	13. Indeks Pelayanan Instansi	78

Jumlah APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 7.454.479.877,53 yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 7.380.787.577,53
2. Belanja Modal sebesar Rp. 73.692.300,00

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5,907,512,745.53	APBD II
2. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 661,271,200.00	APBD II
3. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 413,632,332.00	APBD II
4. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 214,333,400.00	APBD II
5. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 185,887,600.00	APBD II
6. Penyuluhan Pertanian Jumlah	Rp. 71,842,600.00	APBD II
	Rp. 7,454,479,877.53	

Muara Sabak, November 2021

Bupati Tanjung Jabung Timur

H. ROMI HARIYANTO,SE

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Ir. RAJITO

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660211199203 1 003

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SYAHBUDIN, M.H**
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,

H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,

Drs. SYAHBUDIN, M.H

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Daya Saing UKM/IKM Sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase Usaha Mikro Aktif	64,04%
		Persentase KSP/USP Aktif	8%
		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	25%
		Persentase Koperasi Sehat	56%
		Persentase Koperasi yang mendapatkan diklat perkoperasian	51%
		Persentase Koperasi Mandiri	00.00
2	Memfasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	14,15%
3	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Instansi	78%

Jumlah APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 4.392.580.454,00

- 1 Belanja Operasional sebesar Rp. 4.382.380.454,00
- 2 Belanja Modal Rp. 10.200.000,00
- 3 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 0
- 4 Belanja Transfer sebesar Rp. 0

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.960.983.524,00	
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	14.654.598,00	
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	24.654.000,00	
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	72.471.136,00	
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	97.166.830,00	
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	20.071.763,00	
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.148.755.705,00	
8	Program Pengembangan UMKM	53.822.898,00	
	Jumlah	4.392.580.454,00	

Muara Sabak, November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

KEPALA DINAS

Drs. SYAHBUDIN, M.H




**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARIONTONI, S.Sos**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

NAMA : **H. ROMI HARIYANTO**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. ROMI HARIYANTO

Muara Sabak, Januari 2021

Pihak Pertama

MARIONTONI, S.Sos

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
: 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan sesuai kompetensi dan atau tenaga kerja terampil mandiri	70%
2.	Meningkatnya Hubungan Industrial tenaga Kerja	1. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan jaminan sosial. 2. Persentase tenaga kerja yang diberikan upah sesuai peraturan. 3. Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	100% 100% 100%
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kawasan eks Transmigrasi	Persentase Rata-rata pendapatan masyarakat eks transmigrasi \geq Rp. 1.700.000,-	85%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1. Indeks kepuasan masyarakat 2. Nilai AKIP 3. Laporan Keuangan	80 75 Sesuai SAP

NO	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 4.367.205.169,00
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 302.275.000,00
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 49.950.000,00
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 102.679.734,00
5.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 458.664.830,00
JUMLAH		Rp. 5.280.774.733,00

Bupati Tanjung Jabung Timur

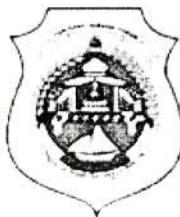
H. ROMY HARIYANTO

Muara Sabak, Januari 2021

KEPALA DINAS

MARIONTONI, S.Sos

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DEDDY ARMADI, SH.MH**

Jabatan : Kepala Dinas Parbudpora Kab. Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua

H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,

DEDDY ARMADI, SH.MH

Pembina Utama Muda
Nip. 197506152000121004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan Berdaya Saing	Persentase Peningkatan KSPD	16,7
Peningkatan Pemasaran Pariwisata	Persentase Jumlah Wisatawan	16,7
Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan	Persentase Masyarakat yang mempunyai Capabilitas di Bidang Pariwisata	16,7
Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM	77
	Nilai SAKIP OPD	68
	Laporan Keuangan	65
Meningkatkan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda yang Berprestasi	33,3
Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Persentase Atlet yang Berprestasi	56,3
Meningkatnya Olahraga yang Berprestasi	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	46,9
Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata dan Olahraga	Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata dan Olahraga	32,6
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	14,3
Berkembangnya Situs dan Pelestarian Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	23,8

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Rp. 1.126.646.000	
2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2. Rp. 3.818.791.232	
3. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	3. Rp. 250.000.000	
4. Pengembangan Kebudayaan	4. Rp. 429.142.178	
5. Pengembangan Kesenian Tradisional	5. Rp. 1.154.682.000	
6. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	6. Rp. 357.972.000	

PROGRAM

7. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
9. Pemasaran Pariwisata
10. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

ANGGARAN

7. Rp. 4.897.979.850
8. Rp. 482.102.000
9. Rp. 495.477.000
10. Rp. 93.858.000

KETERANGAN

Bupati Tanjung Jabung Timur



H. ROMI HARIYANTO, SE

Kepala Dinas Parbudpora



DEDDY ARMADI, SH.MH

Nip. 197506152000121004

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **Drs. IBNU HAYAT, M.M**
JABATAN : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

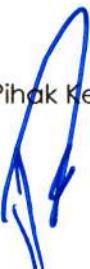
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

NAMA : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
JABATAN : Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut Pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


H. ROMI HARIYANTO, SE

Muara Sabak, November 2021
Pihak Pertama



Drs. IBNU HAYAT, M.M
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19690214 198908 1001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : DINAS PERIKANAN
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN			INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)			TARGET
1	2			3			4
1.	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			Persentase Produksi Perikanan Tangkap			85,06 %
2.	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya			Persentase Produksi Perikanan Budidaya			59,16 %
3.	Peningkatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			18,18 %
4.	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			Persentase produksi olahan hasil perikanan			50,00 %
				Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat			38,00 Kg/kpt
5..	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan			Indeks Pelayanan Instansi			100 %

Jumlah APBD tahun 2021 Sebesar Rp. 7.514.596.170,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 7.484.384.492,00
2. Belanja Modal Sebesar Rp. 30.211.678,00
3. Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp. 0,00

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.839.422.557,00	
2.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.610.844.000,00	
3.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	272.359.000,00	
4.	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	221.811.742,00	
5.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	570.158.871,00	
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		7.514.596.170,00	

Pihak Kedua

H. ROMI HARIYANTO, SE

Muara Sabak, November 2021

Pihak Pertama


Drs. IBNU HAYAT, M.M
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19690214 198908 1001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. HERO SURATMAN

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ROMI HARIYANTO, SE

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Nopember 2021

Pihak Kedua,


H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,


Drs. HERO SURATMAN

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Investasi Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Pertumbuhan IKM Produktif	668 IKM
		Persentase Pertumbuhan IKM	75 %
2	Meningkatnya stabilitas harga barang serta Jaringan Distribusi Barang dan Jasa	- Persentase Kegiatan Pengawasan Barang dan Jasa	90 %
		- Terciptanya tertib ukur dan pedagang yang jujur serta konsumen cerdas	10 Kali
		- Persentase Pelaksanaan tertib ukur dan pedagang yang	75 %
		- tersedianya tempat promosi dan penjualan souvenir dan pusat informasi unggulan daerah	3 Lokasi
		- Persentase Usaha Pemasaran Produk Batik ke-Pihak ketiga	75 %
3	Meningkatnya kualitas dan Prasarana pasar tradisional	- meningkatnya manajemen SDM pengelola pasar Tradisional	9 Pasar
		Persentase pasar dalam kondisi baik	75 %
		Persentase Peningkatan Pasar	80 %

Jumlah APBD Tahun 2021 Sebesar Rp. 6.244.780.503,57 yang terdiri dari :

- 1 Belanja Operasi Sebesar Rp. 4.980.094.247,57
2. Belanja Modal Sebesar Rp. 1.264.686.256,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN Rp
1	Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.640.540.592,57
3	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp 1.753.184.099,00
4	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp 60.159.800,00
5	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 5.274.100,00
6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 114.770.000,00
7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 44.431.812,00
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 26.420.100,00
Jumlah		Rp 6.244.780.503,57

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

Muara Sabak, Nopember 2021
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Drs. HERO SURATMAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ADIL P ARITONANG**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,


H. ROMI HARIYANTO

Pihak Pertama,


Drs. ADIL P ARITONANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Berkurangnya permukiman kumuh	1 Persentase pengurangan luas permukiman kumuh	4.72%
2	Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan lingkungan	2 Persentase jalan lingkungan kondisi baik	66.75%
3	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih	3 Persentase rumah tangga yang memanfaatkan air bersih	90.00%
4	Meningkatkan Sanitasi Layak Bagi Masyarakat	4 Persentase rumah tangga yang bersanitasi aman	74.80%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	5 Skor IKM 6 Nilai AKIP 7 Laporan Keuangan	70% 70% sesuai

Jumlah APBD tahun 2021 Sebesar Rp. 56.824.532.235,00 Yang terdiri dari :

1 Belanja Operasi sebesar Rp	34,424,134,964.00
2 Belanja Modal sebesar Rp.	22,400,397,271.00

NO	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	35,492,398,660.00	
a	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	629,200,000.00	
b	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10,566,208,316.00	
c	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8,576,943,560.00	
d	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	595,935,605.00	
e	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	15,124,111,179.00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	21,332,133,575.00	
f	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	12,924,267,310.00	
g	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	304,185,420.00	
h	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	8,103,680,845.00	
		56,824,532,235.00	

Muara Sabak, November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN MAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG AJBUNG TIMUR

Drs. ADI P. ARITONANG

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ARMAN**

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,

H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,

Drs. ARMAN

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Pelayanan Instansi	78
2	Peningkatan Minat Baca	IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat)	19
4	Peningkatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan arsip secara baku	23,26%

Jumlah APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 3.727.577.962,00 Yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 3.385.161.286,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 342.416.676,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Rp 3.642.871.780	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 3.413.691.618	
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 217.658.162	
3.	Program Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota	Rp 11.522.000	
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Rp 84.706.182	
1.	Program Pengelolaan Arsip	Rp 84.706.182	
TOTAL		Rp 3.727.577.962	

Muara Sabak, November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


H. ROMI HARIYANTO, SE

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR**


Drs. ARMAN

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. BERILYAN**
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,


H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,


Drs. BERILYAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan good and clean government	Percentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai aturan	100%
2	Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Percentase kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG	18%
3	Meningkatkan dan berfungsinya BUMDesa yang sudah terbentuk	Percentase peningkatan BUMDesa yang aktif	68,49%
4	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM	78
		Nilai AKIP	69
		Laporan Keuangan sesuai SAP	Sesuai

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3,053,529,802.01	APBD
2. Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 386,855,400.00	APBD
3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 1,038,728,400.00	APBD
JUMLAH	Rp 4,479,113,602.01	

Bupati Tanjung Jabung Timur


H. ROMI HARIYANTO, SE

Muara Sabak, 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa



Drs. BERILYAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Barusman, S.Sos
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ROMI HARIYANTO, SE
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


H. ROMI HARIYANTO, SE

Muara Sabak, November 2021

Pihak Pertama,


Barusman, S.Sos
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19650418 198703 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada Faskes dan RS	Indeks Pelayanan Instansi	78
		LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	0,90
		Angka KeLahiran Total (TFR) per WUS Usia 15 - 49 Tahun	2,74
		Angka Prevelansi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	58
		Presentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	14
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15 - 19 Tahun)	37
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,43

Jumlah APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 8.809.350.322,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 8.200.099.952,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 623.100.000,00

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.968.368.860,00	APBD (6 kegiatan)
2	Program Pengendalian Penduduk	Rp 129.547.000,00	APBD (2 kegiatan)
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 4.077.256.924,00	APBD/BOKB/DAK (4 kegiatan)
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 648.027.168,00	APBD/BOKB (1 kegiatan)

Bupati Tanjung Jabung Timur

(H. Romi Nariyanto, SE)

Muara Sabak, November 2021

Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB


(Barusman, S.Sos)

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RISDIANSYAH, ST.MM**
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,

H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,

RISDIANSYAH, ST.MM

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan Infrastruktur Dasar Jalan dan Jembatan Penunjang Pertanian dan Perikanan, potensi agrowisata dan wisata bahari, pelayanan kesehatan pada Fasilitas kesehatan, akses dan mutu pendidikan dasar, Fasilitas pendirian pabrik.	Persentase Terhubungnya desa/kelurahan ke ibukota kecamatan dengan kondisi mantap	73,12%
2	Peningkatan PAD dari Sewa Alat Berat	Persentase Capaian PAD dari Sewa Alat Berat	100%
3	Peningkatan Infrastruktur Dasar Jaringan Irigasi, saluran dan tanggul yang mendukung Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan	Cakupan Luas Irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik	50,12%
		Cakupan Luas Saluran dan Tangggul Perkebunan dalam Kondisi Baik	55,26%
4	Peningkatan Pengendalian Penataan Ruang	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	100%
5	Peningkatan kompetensi Penyedia Barang dan Jasa yang Kapabel dan Profesional	Persentase Angkatan Kerja Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi	86%
6	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Pelayanan Instansi	78

Jumlah APBD Tahun 2021 sebesar Rp. **153.187.503.862,00** yang terdiri dari :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Belanja Operasi sebesar | Rp. 29.855.485.675,00 |
| 2. Belanja Modal sebesar | Rp. 123.332.018.187,00 |

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.992.793.703,00	
2. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 33.399.038.500,00	
3. Penyelenggaraan Jalan	Rp. 104.778.514.784,00	
4. Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 371.579.257,00	
5. Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.645.577.618,00	
JUMLAH	Rp. 153.187.503.862,00	

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,



H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,



RISDIANSYAH, ST.MM

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUNARNO, SP**
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Nopember 2021

Bupati Tanjung Jabung Timur,

H. ROMI HARIYANTO, SE

Kepala Dinas,

SUNARNO, SP

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	%
1	Peningkatan produksi Tanaman Pangan	Persentase peningkatan Produksi tanaman Pangan	5,45	%
2	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Persentase peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	2,50	%
3	Peningkatkan Daya Saing Pertanian dan Perikanan	Cakupan Bina Kelompok Tani	43,93	%
4	Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD	16,67	%
5	Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas, Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	
		Laporan Keuangan	SESUAI	

Jumlah APBD Tahun 2021 Sebesar Rp.14.983.208.107,00 yang terdiri dari :

PROGRAM		Anggaran Rp.
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kota	10.295.552.708
2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.682.789.447
3	Penyediaan dan Pengembangan Praarana Pertanian	2.021.719.459
4	Penngendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	182.111.000
5	Penyuluhan Pertanian	801.535.493
JUMLAH		14.983.208.107

Muara Sabak, Nopember 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARYANTO,SE

KEPALA DINAS,



SUNARNO, SP

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERNAWATI,S.Kep,Ns.M.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,


H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,


ERNAWATI,S.Kep,Ns.M.Kes
Pembina Tk.I/IVb
NIP 19690619199503 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	65.70 Tahun
		Indeks Keluarga Sehat	0.20%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	76.65%

Jumlah Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2021 Sebesar Rp. 119,848,637,299.00

1. Belanja Operasi	Rp	104,161,497,990.00
2. Belanja Modal	Rp	15,687,139,309.00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 49,925,295,462.00	APBD/DAK
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 58,386,818,731.00	APBD/DAK
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 10,254,887,667.00	APBD
4	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 547,583,400.00	APBD/DAK
5	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 734,052,039.00	DAK

Bupati Tanjung Jabung Timur

H. ROMI HARIYANTO,SE

Muara Sabak, November 2021

Kepala Dinas Kesehatan



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD RIDWAN, S.I.P.**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARYANTO, S.E.**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. ROMI HARYANTO, S.E.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Pertama,

MUHAMMAD RIDWAN, S.I.P.
NIP. 19721207 199203 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
1	2	3			
Meningkatkan perlindungan, pemberdayaan, jaminan dan rehabilitasi sosial keluarga dan fakir miskin	1. Cakupan masyarakat miskin yang mendapat perlindungan sosial 2. Persentase masyarakat miskin desil 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan sosial 3. Cakupan masyarakat miskin yang memiliki jaminan sosial 4. Cakupan masyarakat Disabilitas mandiri	75 10 70 10			
Meningkatkan Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IDG)				70
Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	1. Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2. Status Kabupaten Layak Anak (KLA)				100 Madya
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai AKIP				80 62

Program/Kegiatan	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.940.128.958,-
2. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 11.278.800,-
3. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 173.393.676,-
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 367.114.737,-
5. Program Penanganan Bencana	Rp. 38.860.000,-
6. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 55.113.900,-
7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 393.764.974,-
8. Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 43.912.471,-
9. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 461.845.800,-
Jumlah	Rp. 5.485.413.316,-

Muara Sabak, November 2021

BUPATI TANJUNG AJABUNG TIMUR

H. ROMI HARYANTO, S.E.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MUHAMMAD RIDWAN, S.I.P.

NIP. 19721207 199203 1 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. JUNAEDI RAHMAD, MH**

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.ROMI HARIYANTO,SE**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

H.ROMI HARIYANTO, SE

Muara Sabak, November 2021

PIHAK PERTAMA

DRS.JUNAEDI RAHMAD, MH
Pembina utama Muda/IVc
NIP.19690103 1990031004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : **Dinas Pendidikan**
 Tahun Anggaran : **2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1. Angka Rata-rata Lama Sekolah	7 Tahun
		2. Harapan Lama Sekolah	11,40
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	1. Indek Kepuasan Masyarakat	83,25
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	67,39

Jumlah APBD Tahun 2021 sebesar Rp.304.265.687.844,00 yang terdiri dari :

1 Belanja Operasi	Rp 259,067,489,765,00
2 Belanja Modal	Rp 45,198,189,079,00

NO.	PROGRAM	PAGU
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	210,761,076,558,00
2	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	93,202,926,227,00
3	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	301,676,059,00
		304,265,678,844,00

Muara Sabak, November 2021

Bupati Tanjung Jabung Timur

H. ROMI HARIYANTO,SE

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Drs. Junaedi Rahmad, MH
 Pembina Utama Muda/IVc
 NIP.19690103 199003011004

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARUJI, SH**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,

H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,

ARUJI, SH

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)		(4)
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	1 Indeks Pelayanan Instansi	78
		1 Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	100 %
		2 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	100 %
		3 Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	20,93 %
		4 Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Datang	100 %
		5 Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Permanen	100 %
		6 Pendaftaran Penduduk Rentan dan Rentan Bencana Administrasi Kependudukan	100 %
2.	Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Masyarakat	7 Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	100 %
		8 Persentase penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	100 %
		9 Persentase penerbitan Kutipan Akta Perceraian	100 %
		10 Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun	99,83 %
		11 Persentase ketersediaan data Agregat kependudukan	100 %
		12 Persentase ketersediaan data profil kependudukan	100 %
		13 Persentase Pemanfaatan data kependudukan	25,58 %

Jumlah APBD Tahun 2021 Sebesar Rp. 5.488.676.989,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi Sebesar Rp. 5.291.704.489,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 196.972.500,00
3. Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp -
4. Belanja Transfer Sebesar Rp. -

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.285.699.889,00	
2	Pendaftaran Penduduk	108.327.300,00	
3	Pencatatan Sipil	34.488.800,00	
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	54.165.000,00	
5	Pengelolaan Profil Kependudukan	5.996.000,00	
	TOTAL	5.488.676.989,00	

Muara Sabak, November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ARUJI, SH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. HADI FIRDAUS, M.Si**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**

Jabatan : Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

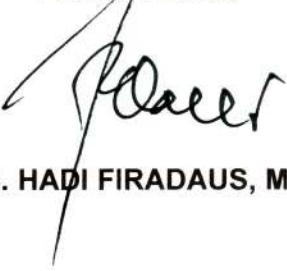
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Januari 2021

Pihak Kedua,


H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,


Drs. HADI FIRADAUS, M.Si

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Keselamatan Dan Kenyamanan Transportasi Darat Maupun Air	Persentase Penurunan Kecelakaan Darat	0,25%
		Persentase Pemasangan Perlengkapan Keselamatan	82,61%
		Persentase Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas	14,63%
		Persentase Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100,00%
		Persentase Ketersediaan Terminal	100,00%
2	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
		Nilai AKIP	B
		Laporan Keuangan	Sesuai

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.114.116.064,00	
2	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	907.640.000,00	
3	Pengelolaan Pelayaran	350.310.000,00	

Muara Sabak, Januari 2021

Bupati Tanjung Jabung Timur

H. ROMI HARIYANTO, SE

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Drs. HADI FIRDAUS, M. Si

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HERMAN TONI, S.E, M.E**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, S.E**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


H. ROMI HARIYANTO, S.E

Muara Sabak, November 2021

Pihak Pertama,


HERMAN TONI, S.E, M.E

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

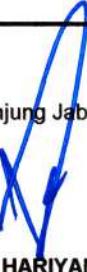
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Pelayanan Instansi	78
2	Peningkatan Akses Layanan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	74,42%
		Persentase Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah	72,73%
3	Peningkatan Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang di Informasikan	50%
4	Peningkatan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	23,26%

Jumlah APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 4.717.871.989,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 4.543.371.989,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 174.500.000,00

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.099.710.090,00	APBD II
2.	Informasi dan Komunikasi Publik	169.422.199,00	APBD II
3.	Aplikasi Informatika	1.361.633.100,00	APBD II
4.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	79.565.500,00	APBD II
5.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	7.541.100,00	APBD II
Jumlah			4.717.871.989,00

Bupati Tanjung Jabung Timur


H. ROMI HARIYANTO, S.E

Muara Sabak, November 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


HERMAN TONI, S.E, M.E

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : IDRIS, SE

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : H. Romi Hariyanto, S.E

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan sanksi.

Pihak Kedua,

H. ROMI HARIYANTO, S.E

Muara Sabak,
Pihak Pertama,

2021

IDRIS, SE
Pembina TK.I/IV b
Nip. 19650914 198603 1003

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021
1	2	3	4
1	Peningkatan ketahanan pangan	1. Ketersediaan Konsumsi Energi 2. Skor PPH 3. Persentase penanganan daerah rawan pangan 4. Prevalensi harga pangan 5. Sampel PSAT dan bahan pangan lainnya 6. Kelompok Lumbung Pangan yang di Berdayakan	2.125 90,5 93,55 CV <10% 40 13
2	Peningkatan Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 indeks Pelayanan Instansi 2 Nilai SAKIP 3 Nilai laporan keuangan	78 65 Sesuai

Jumlah APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 4,794,712,853,00 yang terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi Sebesar Rp. 4,787,712,853,00
- 2) Belanja Modal Sebesar Rp. 7,000,000,00
- 3) Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp. 0
- 4) Belanja Transfer Sebesar Rp. 0

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	3,547,753,828,00	APBD
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	607,225,724,00	APBD
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	589,264,205,00	APBD
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	46,439,696,00	APBD
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	4,029,400,00	APBD
Jumlah		4,794,712,853,00	APBD

Pihak Kedua,

H. ROMI HARIYANTO, S.E

Muara Sabak,
Pihak Pertama,

2021

IDRIS, SE
Pembina TK.I/IV b
Nip. 19650914 198603 1 003

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **GUSTIN WAHYUDI, S.STP**

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,

H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,

GUSTIN WAHYUDI, S.STP

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Pelayanan Persampahan	Persentase Volume sampah terangkut perhari (ton)	88,37%
2	Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan	Persentase Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan	100%
3	Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Persentase Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	100%
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,03
5	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81
		Nilai AKIP	65
		Laporan Keuangan	Sesuai

Jumlah APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 5.875.418.552,00 yang terdiri dari :

- 1 Belanja Operasi sebesar Rp. 5.851.704.672,00
- 2 Belanja Modal sebesar Rp. 23.713.880,00

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. 5.188.580.520,00	
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2. 231.301.000,00	
3.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	3. 9.935.000,00	
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	4. 92.850.000,00	
5.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	5. 65.332.400,00	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6. 287.419.632,00	
	JUMLAH	Rp 5.875.418.552,00	

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

Muara Sabak, November 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


GUSTIN WAHYUDI, S,STP

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. MUHAMAD EDUARD**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua


H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,


Drs. MUHAMAD EDUARD

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31
2.	Meningkatkan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah	1. Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	148710
3.	Peningkatan Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (Nilai IPI, AKIP dan Laporan Keuangan)	1. Nilai Indek Kepuasan Instansi 2. Nilai AKIP 3. Laporan Keuangan	88,31 76,00 Sesuai

Jumlah APBD Tahun 2021 sebesar Rp.3.777.310.715 terdiri dari :

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| 1. Belanja Operasional sebesar | : | Rp. 3.707.743.098,00 |
| 2. Belanja Modal sebesar | : | Rp. 69.567.617,00 |

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.111.527.688,00	APBD
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	81.433.920,00	APBD
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	157.586.853,00	APBD
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	384.408.314,00	APBD
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	42.353.940,00	APBD

Bupati Tanjung Jabung Timur

H. ROMI HARIYANTO, SE

Muara Sabak, November 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. MUHAMAD EDUARD

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **dr. H. MUHAMMAD NASRUL FELANI**

Jabatan : Direktur RSU Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ROMI HARIYANTO, SE**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,


ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,


dr. H. MUHAMMAD NASRUL FELANI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan Rumah Sakit.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RSUD. 2. Presentase SDMK yang Memiliki Kompetensi sesuai Standar RS Kelas C.	87% 66,22%

Jumlah APBD Tahun 2021 sebesar Rp 46.180.535.558,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp 32.185.385.726,00
2. Belanja Modal sebesar Rp 13.995.149.832,00

PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.961.557.768,00	8 Kegiatan	25 Subkegiatan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	18.585.678.890,00	3 Kegiatan	10 Subkegiatan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	633.298.900,00	2 Kegiatan	2 Subkegiatan

Muara Sabak, November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

ROMI HARIYANTO, SE

DIREKTUR RSU NURDIN HAMZAH

dr. H. MUHAMMAD NASRUL FELANI

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT MUARA SABAK BARAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ARIE JULIAN SAPUTRA, S.I.P.,MH**
Jabatan : Camat Muara Sabak Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,


H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,


ARIE JULIAN SAPUTRA, S.I.P.,MH

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN MUARA SABAK BARAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77
	Nilai AKIP	62.25
	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai
	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	200 Orang
Peningkatan Retribusi dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Persentase Peningkatan PAD Kecamatan	100%
	Jumlah Proposal Pelayanan alat berat Kecamatan	4 Proposal
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100%
	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%

Jumlah APBD Tahun 2021 Sebesar Rp. 10.483.931.455

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Belanja Operasi sebesar | Rp. 9.513.256.318 |
| 2. Belanja Modal sebesar | Rp. 970.675.137 |
| 3. Belanja Tidak Terduga sebesar | Rp. 0 |
| 4. Belanja Transfer sebesar | Rp. 0 |

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,691,298,980	
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	132,315,475	
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.632.917.000	
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27,400,000	

Muara Sabak, November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

CAMAT MUARA SABAK BARAT

ARIE JULIAN SAPUTRA, S.I.P., MH

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT MUARA SABAK TIMUR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ZULFAISYAL,S.AP**
Jabatan : Camat Muara Sabak Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,


H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,


ZULFAISYAL, S.AP

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75
	Nilai AKIP	62.25
	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai
	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	220 Orang
Peningkatan Retribusi dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Persentase Peningkatan PAD Kecamatan	100%
	Jumlah Proposal Pelayanan alat berat Kecamatan	4 Proposal
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100%
	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%

Jumlah APBDP Tahun 2021 Sebesar Rp. 5.720.260.257,-

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Belanja Operasi sebesar | Rp. 5.349.927.095,- |
| 2. Belanja Modal sebesar | Rp. 370.333.162,- |
| 3. Belanja Tidak Terduga sebesar | Rp. 0 |
| 4. Belanja Transfer sebesar | Rp. 0 |

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.158.992.089,-	
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	184.997.168,-	
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.301.271.000,-	
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75.000.000,-	

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE



Muara Sabak, November 2021

CAMAT MUARA SABAK TIMUR



ZULFAISYAL, S.AP

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT RANTAU RASAU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BUDI WAHYU, S. STP**
Jabatan : Camat Rantau Rasau

Selanjutnya disebut pihak pertama

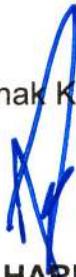
Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

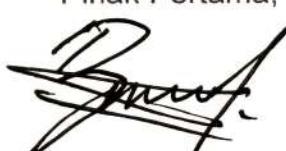
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,

H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,

BUDI WAHYU, S. STP

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN RANTAU RASAU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75
	Nilai AKIP	62.00
	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai
	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	200 Orang
Peningkatan Retribusi dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Persentase Peningkatan PAD Kecamatan	100%
	Jumlah Proposal Pelayanan alat berat Kecamatan	4 Proposal
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100%
	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%

Jumlah APBD Tahun 2021 Sebesar **Rp. 3.470.383.556,00**

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Belanja Operasi sebesar | Rp. 3.397.789.796,00 |
| 2. Belanja Modal sebesar | Rp. 72.593.760,00 |
| 3. Belanja Tidak Terduga sebesar | Rp. 0,00 |
| 4. Belanja Transfer sebesar | Rp. 0,00 |

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.797.214.723,00	
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	57.393.522,00	
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.016.606,00	
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9.120.000,00	
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	591.638.705,00	

Muara Sabak, November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

CAMAT RANTAU RASAU



BUDI WAHYU, S. STP

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN NIPAH PANJANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HELMI AGUSTINIUS, SE**

Jabatan : Camat Nipah Panjang

*Selanjutnya disebut **Pihak Pertama***

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**

Jabataan : Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

*Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua***

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami..

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. ROMI HARIYANTO, SE

Muara Sabak, Nopember 2021

Pihak Pertama

HELMI AGUSTINIUS, SE

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN NIPAH PANJANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan Retribusi IMB dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Persentase Peningkatan PAD Kecamatan	100%
	Persentase Pelayanan alat berat kecamatan	2 jenis pelayanan
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Mengoptimalkan Pelayanan Publik diKecamatan	100%
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Keuangan	100%
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Mengoptimalkan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	100%

Jumlah APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 5.640.686,253,- , yang terdiri dari :

1 Belanja Operasi	Rp	5.332.321.293
2 Belanja Modal	Rp	308.364.960

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4.212.567.505,00	
2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 65.995.000,00	
3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.348.066.710,00	
4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 14.057.038,00	
JUMLAH	Rp 5.640.686.253,00	

Bupati Tanjung Jabung Timur

H. ROMI HARIYANTO, SE

Camat Nipah Panjang

HELMI AGUSTINIUS, SE

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT MENDAHARA ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HENDRI, SE**
Jabatan : Plt. Camat Mendahara Ulu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,

H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,

HENDRI, SE

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN MENDAHARA ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77
	Nilai AKIP	62.25
	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai
	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	120 Orang
Peningkatan Retribusi dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Persentase Peningkatan PAD Kecamatan	100%
	Jumlah Proposal Pelayanan alat berat Kecamatan	2 Proposal
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100%
	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%

Jumlah APBD Tahun 2021 Sebesar Rp. 2.968.808.835

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Belanja Operasi sebesar | Rp. 2.854.068.335 |
| 2. Belanja Modal sebesar | Rp. 114.740.500 |
| 3. Belanja Tidak Terduga sebesar | Rp. 0 |
| 4. Belanja Transfer sebesar | Rp. 0 |

ROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.234.617.156	
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 87.064.429	
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 622.181.000	
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 24.946.250	
JUMLAH	Rp. 2.968.808.835	

Muara Sabak, November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARYANTO, SE

Plt.CAMAT MENDAHARA ULU

HENDRI, SE

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN MENDAHARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **AMRI JUHARDY, S.IP**
Jabatan : Camat Kecamatan Mendahara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,

H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,

AMRI JUHARDY, S.IP

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN MENDAHARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	78
	Nilai AKIP.	60
	Laporan Keuangan Berdasarkan LHE Inspektorat Kabupaten.	Sesuai
	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	150 Orang
Peningkatan Retribusi dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Persentase Peningkatan PAD Kecamatan	100%
	Jumlah Proposal Pelayanan alat berat Kecamatan	4 Proposal
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100%
	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%

Jumlah APBD Perubahan Tahun 2021 sebesar Rp. 3.200.641.025,92 yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 2.916.498.525,92
2. Belanja Modal sebesar Rp. 284.142.500,-

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;	2.574.950.125,92	
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;	6.990.000,00	
3. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;	597.181.000,00	
4. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	21.519.900,00	

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,


H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,


AMRI JUHARDY, S.I.P

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT KUALA JAMBI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **TAUFIQ KURNIAWAN, S. STP**
Jabatan : Camat Kuala Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,

H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,

TAUFIQ KURNIAWAN, S. STP

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KUALA JAMBI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78
	Nilai AKIP	60
	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai
	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	619 Orang
Peningkatan Retribusi dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Persentase Peningkatan PAD Kecamatan	75%
	Jumlah Proposal Pelayanan alat berat Kecamatan	10 Proposal
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100%
	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%

Jumlah APBD Tahun 2021 Sebesar Rp. 3.451.690.616

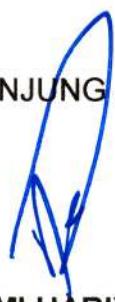
- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Belanja Operasi sebesar | Rp. 2.896.845.700 |
| 2. Belanja Modal sebesar | Rp. 554.844.916 |
| 3. Belanja Tidak Terduga sebesar | Rp. 0 |
| 4. Belanja Transfer sebesar | Rp. 0 |

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,066,511,795	
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	27,441,907	
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.357.736.914	
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	

Muara Sabak, November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE



CAMAT KUALA JAMBI

TAUFIQ KURNIAWAN, S. STP



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT GERAGAI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SUWANDI,A.Md**
Jabatan : Camat Geragai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

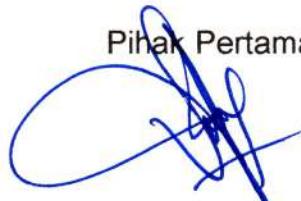
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Nopember 2021

Pihak Kedua,

H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,

SUWANDI.A.Md

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN GERAGAI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
	Nilai AKIP	65.00
	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai
	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	200 Orang
Peningkatan Retribusi dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Persentase Peningkatan PAD Kecamatan	100%
	Jumlah Proposal Pelayanan alat berat Kecamatan	4 Proposal
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100%
	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%

Jumlah APBD Tahun 2021 Sebesar **Rp. 3.498.267.296,00**

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Belanja Operasi sebesar | Rp. 3.280.485.180,00 |
| 2. Belanja Modal sebesar | Rp. 217.782.116,00 |
| 3. Belanja Tidak Terduga sebesar | Rp. 0,00 |
| 4. Belanja Transfer sebesar | Rp. 0,00 |

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.723.549.412,00	
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90.722.884,00	
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	673.995.000,00	
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000,00	

Muara Sabak, Nopember 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

CAMAT GERAGAI



SUWANDI, A.Md

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **AMIRUDDIN,S.Sos**
Jabatan : Camat Dendang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MuaraSabak, November 2021

Pihak Kedua,
H. ROMI HARIYANTO,SE

Pihak Pertama,
AMIRUDDIN,S.Sos

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN DENDANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
	Nilai AKIP	65
	Laporan Keuangan Berdasarkan LHE Inspektorat Kabupaten	Sesuai

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.349.000,00	
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.887.045.614,84	
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.100.000,00	
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.161.438,00	
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	41.450.000,00	
6. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.900.000,00	
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	40.296.800,00	
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	10.000.000,00	
9. Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	49.800.000,00	
10. Pelaksanaan urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat	15.001.365,00	
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27.088.691,00	
12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	595.181.000,00	
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.997.500,00	

Muara Sabak, November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE



CAMAT DENDANG

AMIRUDDIN,S.Sos



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT BERBAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD YANI, SE**
Jabatan : Camat Berbak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

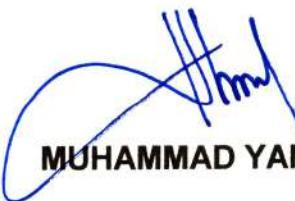
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua,

H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,

MUHAMMAD YANI, SE

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BERBAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75
	Nilai AKIP	62.00
	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai
	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	200 Orang
Peningkatan Retribusi dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Persentase Peningkatan PAD Kecamatan	100%
	Jumlah Proposal Pelayanan alat berat Kecamatan	4 Proposal
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100%
	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%

Jumlah APBD Tahun 2021 Sebesar **Rp. 2.810.454.870,14**

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Belanja Operasi sebesar | Rp. 2.625.636.432,14 |
| 2. Belanja Modal sebesar | Rp. 184.818.438,00 |
| 3. Belanja Tidak Terduga sebesar | Rp. 0,00 |
| 4. Belanja Transfer sebesar | Rp. 0,00 |

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.059.009.060,14	
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	83.341.200,00	
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	19.332.160,00	
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	47.050.000,00	
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	601.722.450,00	

Muara Sabak, November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

CAMAT BERBAK

MUHAMMAD YANI, SE